KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ITA WOTU NUSA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

TEMA:

Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Peningkatan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa bertdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk angka waktu 1 (satu) Tahun jo pasal 104 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tangga 25 Juli 2023

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tangga 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 522

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel vii

Daftar Gambar ix

Daftar Grafik x

BAB. I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Hubungan Antar Dokumen 11
1.4 Maksud dan Tujuan 14
a. Maksud 14
b. Tujuan 14
1.5 Sistematika RKPD 15

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **1**
2.1 Kondisi Umum Daerah 1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi 1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1
2.1.1.2 Karakteristik Letak dan Kondisi Geografis 3
2.1.1.2.1 Posisi Astronomis 3
2.1.1.2.2 Kondisi Geografis 4
2.1.1.3 Kondisi Topografi 4
2.1.1.3.1 Kondisi Hidrologi 4
2.1.1.3.2 Kondisi Klimatologi 5
2.1.1.3.3 Penggunaan Lahan 9
2.1.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah 10
2.1.1.4 Demografi 19
2.1.1.4.1 Penduduk 19
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 20
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 21
1. Pertumbuhan PDRB 21
1) Struktur Ekonomi 14
2) Pertumbuhan Ekonomi 25
3) PDRB Per Kapita 28
2. Pertumbuhan dan Peran PDRB Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 29
3. Kemiskinan 42
4. Indeks Pembangunan Manusia 44
4.1 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur 44

4.2 Disparitas Pembangunan Manusia 45
5. Ekspor Barang dan Jasa 46
6. Impor Barang dan Jasa 47
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 48
2.1.2.2.1 Pendidikan 48
2.1.2.2.2 Kesehatan 50
2.1.2.2.3 Pemuda dan Olahraga 53
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 54
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 54
1. Urusan Pendidikan 54
2. Urusan Kesehatan 61
3. Urusan Pekerjaan Umum dan PR 68
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 70
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 78
6. Urusan Sosial 80
2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 81
1. Urusan Tenaga Kerja 81
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 82
3. Urusan Ketahanan Pangan 85
4. Urusan Lingkungan Hidup 88
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 90
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 90
8. Urusan Perhubungan 91
9. Urusan Komunikasi dan Informatika 92
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 94
11. Urusan Penanaman Modal 94
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 95
13. Urusan Statistik 96
14. Urusan Kebudayaan 97
15. Urusan Perpustakaan 97
16. Urusan Kearsipan 98
2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan 99
1. Urusan Perikanan 99
2. Urusan Pertanian 107
3. Urusan Kehutanan 111
4. Urusan Energi Sumberdaya Mineral 112
5. Urusan Perdagangan 113

6. Urusan Transmigrasi 114
2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 114
1. Urusan Perencanaan 114
2. Urusan Keuangan 115
3. Urusan Pengawasan 116
4. Urusan Kepegawaian 118
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk 119
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 120
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 120
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah 124
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 130
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 131
1. ketenagakerjaan 132
2.15. Standar Pelayanan Minimal 134
1. Pendidikan 134
2. Kesehatan 135
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 136
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 138
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 139
6. Sosial 140
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 141
2.3. Permasalahan Pembangunan 344
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 344
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 345
A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan pelayanan Dasar 345
1. Pendidikan 345
2. Urusan Kesehatan 346
3. urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 346
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 346
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 348
6. Urusan Sosial 348
B. Pelasanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 348
1. Urusan Tenaga Kerja 348
2. Urusan Penanaman Modal 349
3. Urusan kepemudaan dan Olahraga 349
4. Urusan Kebudayaan 350
5. Urusan Perpustakaan 350

6. Urusan Kearsipan 350
7. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 351
8. Urusan Statistik 351
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 351
10. Urusan Pangan 352
11. Urusan Pertanahan 352
12. Urusan Lingkungan Hidup 352
13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 353
14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 353
15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 354
16. Urusan Perhubungan 354
17. Urusan Komunikasi dan Informatika 355

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan 355
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 355
2. Urusan Pariwisata 356
3. Urusan Pertanian 357
4. Urusan Perdagangan 357

D. Penunjang Urusan Pemerintah 358
1. Administrasi Pemerintahan 358
2. Urusan perencanaan 359
3. Urusan Keuangan 359
4. Urusan Pengawasan 360
5. Urusan Kepegawaian 360

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 2
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi 2
3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 4
3.1.3 Struktur Ekonomi 8
3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 10
3.1.5 PDRB Per Kapita 11
3.1.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022 12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 15
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 19
3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah 23
3.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 7
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 7
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 8
4.2.3. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD 9
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 29
A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 29
B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 . 29
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Taun 2024 34
4.3. Kebijakan Pembangunan 53
4.3.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang 53
A. Wilayah Pengembangan 55
B. Sistem Perkotaan 57
C. Rencana Sistem perkotaan dan Perdesaan 61
D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan 63
E. Rencana sistem Kawasan Perdesaan 64
F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan 65
4.3.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 66
A. Rencana Kawasan Lindung 66
B. Rencana Hutan Lindung 67
C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya 67
D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat 68
E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam 69
F. Kawasan Rawan Bencana Alam 70
G. Rencana Kawasan Lindung Geologi 72
H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya 72
I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya 72
J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 74
K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 77
L. Kawasan Peruntukan Pertanian 77
M. Kawasan Peruntukan Perkebunan 79
N. Kawasan Peruntukan Perikanan 82
O. Kawasan Peruntukan Pertambangan 85
P. Kawasan Peruntukan Industri 88
Q. Kawasan Pariwisata 89
R. Rencana Kawasan Pengembangan Kawasan Permukiman 91

BAB.V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024 1
5.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024 1
5.2. Rencana Program dan kegiatan yang Bersumber dari APBD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2024 7
5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 16
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 1
6.1. Indikator Kinerja Utama 2
6.2. Indikator Kinerja Kunci 3
6.3. Indikator Makro Pembangunan 4
6.4. Arah Kebijakan DAK Tahun 2024..... 5
BAB. VII PENUTUP..... 1

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Hal
I.1.	Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	4
I.2.	Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 202	6
I.3.	Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	6
II.1.	Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan	2
II.2.	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	2
II.3.	Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur	4
II.4.	Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan peruntukannya	12
II.5.	Wilayah Komoditas	13
II.6.	Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	14
II.7.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur	16
II.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2022	19
II.9.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 – 2 (miliar rupiah)	22
II.10.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliaran Rupiah), 2018–2022	23
II.11.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018 – 2022	24
II.12.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022	27
II.13.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	28
II.14.	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022	30
II.15.	Nilai PDRB ADHB Kategori Pertambangan dan Penggalian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Milyar) Tahun 2018 – 2022	31
II.16.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022	33
II.17.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022	34
II.18.	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022	36
II.19.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022	37
II.20.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022	39
II.21.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022	40
II.22.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2018 – 2022	43

No Tabel	Judul	Hal
II.23.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2017 – 2021	43
II.24.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2021	44
II.25.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2022	45
II.26.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	46
II.27.	Perkembangan Impor Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	48
II.28.	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	49
II.29.	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	50
II.30.	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	50
II.31.	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	51
II.32.	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	52
II.33.	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	53
II.34.	Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	54
II.35.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	56
II.36.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	56
II.37.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2022	57
II.38.	Jumlah Ketersediaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2022	57
II.39.	Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	58
II.40.	Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2022	58
II.41.	Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	59
II.42.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang PAUD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	60
II.43.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SD/Mi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	60
II.44.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	60
II.45.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	60
II.46.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	61
II.47.	Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	62
II.48.	Jumlah Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	63
II.49.	Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	66
II.50.	Jumlah Kasus Tubercolosis (TB) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	66
II.51.	Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	67
II.52.	Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian	67

No Tabel	Judul	Hal
	Timur Tahun 2018-2022	
II.53.	Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	68
II.54.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)	69
II.55.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)	70
II.56.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)	70
II.57.	Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022	71
II.58.	Data dan Penanganan RTLH di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022	73
II.59.	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Daya Utama yang digunakan Rumah Tangga Tahun 2022	75
II.60.	Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur	77
II.61.	Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur	78
II.62.	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2021	79
II.63.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial (Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur	80
II.64.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Berdasarkan Jumlah PMKS Yang mendapat Bantuan	80
II.65.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2022	81
II.66.	Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2022	82
II.67.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	82
II.68.	Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	82
II.69.	indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2022	83
II.70.	Persentase penanganan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022	84
II.71.	Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2022	84
II.72.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022	85
II.73.	Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	87
II.74.	Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	88
II.75.	Ketersediaan Jenis Air Minum di di Kabupaten Seram Bagian Timur	89
II.76.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur	89
II.77.	Jumlah Kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022	90
II.78.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022	91
II.79.	Nama Pelabuhan dan Kedalamannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	92
II.80.	Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	92

No Tabel	Judul	Hal
II.81.	frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	92
II.82.	Jumlah Sistem Informasi dan Expo Informasi Data di Kabupaten Seram Bagian Timur	93
II.83.	Jumlah Koperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	94
II.84.	Jumlah PMDN/PMA di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2022	95
II.85.	Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	95
II.86.	Ketersediaan Informasi Manual Book di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	96
II.87.	Perkembangan Pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur	97
II.88.	Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	98
II.89.	Jumlah SDM dan Pengelola Arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur	98
II.90.	Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenisnya Tahun 2018-2022	100
II.91.	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi IkanMenurut Jenis Budidaya Perikanan Tahun 2021-2022	100
II.92.	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2022	100
II.93.	Perkembangan Jumlah Nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2022	100
II.94.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	101
II.95.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ton)	101
II.96.	Luas dan Kondisi Mangrove di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)	103
II.97.	Luas dan Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)	104
II.98.	Luas dan Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)	107
II.99.	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2022	109
II.100.	Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	109
II.101.	Luas Areal Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 - 2022	110
II.102.	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ekor)	111
II.103.	Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ekor	111
II.104.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2022 (ha)	112
II.105.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/ Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	112
II.106.	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan/Desa pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	113
II.107.	Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	113
II.108.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	115
II.109.	Proporsi Belanja Pegawai APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	116

No Tabel	Judul	Hal
II.110.	Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2022	117
II.111.	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	118
II.112.	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	118
II.113.	Jumlah ASN Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	119
II.114.	Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur	119
II.115.	PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	120
II.116.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	122
II.117.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	123
II.118.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	124
II.119.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)	124
II.120.	Nama Pelabuhan dan Kedalamannyadi Kabupaten Seram Bagian Timur	125
II.121.	Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	125
II.122.	frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	125
II.123.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/ Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur	116
II.124.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/ Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur	126
II.125.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	127
II.126.	Nama Akomodasi, Alamat, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022	127
II.127.	Nama Akomodasi Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur	128
II.128.	Data Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	129
II.129.	Ketersediaan Jenis Air Bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur	129
II.130.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	130
II.131.	Jumlah Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	131
II.132.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022	133
II.133.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan	135
II.134.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan	136
II.135.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138
II.136.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	139
II.137.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	140
II.138.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial	141
III.139.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun	143

No Tabel	Judul	Hal
	Berjalan di Kabupaten Seram Bagian Timur	
III.1.	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2018-2022	6
III.2.	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2018-2022	7
III.3.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022	9
III.4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2018-2022	11
III.5.	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018 - 2022	12
III.6.	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022 (miliar rupiah)	14
III.7.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022	15
III.8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2021 s/d 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur	22
III.9.	Realisasi dan Proyeksi/target Belanja tahun 2021 s/d 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur	25
III.10.	Realisasi dan Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 s/d 2024	27
IV.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	3
IV.2.	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur	10
IV.3.	Keterkaitan antara Isu Strategis dan prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Ti Tahun 2024	32
IV.4.	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	33
IV.5.	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	35
IV.6.	Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Seram Bagian Timur	60
IV.7.	Potensi Kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur	73
IV.8.	Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur	75
IV.9.	Usulan Alih Fungsi Hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur	76
IV.10.	Luas Lahan Kawasan Pertanian	78
IV.11.	Luas Lahan Perkebunan	81
IV.12.	Wilayah Komoditas	81
IV.13.	Wilayah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Daerah Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya	84
IV.14.	Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur	85
IV.15.	Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	88
IV.16.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur	91
IV.17.	Penyebaran Lokasi Transmigrasi	93
V.1.	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	2
V.2.	Program Prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2024	4
V.3.	Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	7
V.4.	Rencana Kerja Program/Kegiatan Stunting Kabupaten Seram BagianTimur Tahun 2024	9
V.5.	Penyelarasan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada SPM Tahun 2024	17

No Tabel	Judul	Hal
V.6.	Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024	31
V.7.	Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	32
VI.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Timur	2
VI.2.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Seram Bagian Timur	3
VI.3.	Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur	4

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Hal
I.1	**Hubungan antar dokumen**	12
II.1	Peta Kabupaten Seram Bagian Timur	3
II.2	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Seram Bagian Timur	10
III.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2018–2022	5
IV.1	Konsep Struktur Ruang Kota Kabupaten Seram Bagian Timur	54
IV.2	Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur	57
IV.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	61
IV.4	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	69
IV.5	Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur	69
IV.6	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur	74
IV.7	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur	79
IV.8	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur	84
IV.9	Peta Konsesi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur	87
IV.10	Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur	91
IV.11	Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur	92

DAFTAR GRAFIK

No Gambar	Judul	Hal
II.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010	26
II.2.	Kotribusi Subkategori Terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen) Tahun 2021-2022	32
II.3.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Riil Kategori Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (persen) Tahun 2018 – 2022	35
II.4.	Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022	45

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 mencerminkan komitmen dan *effort* daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fungsi mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Arahan penyusunan RENJA dan RKA OPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.1.1. Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. ***Persiapan Penyusunan RKPD;***

   Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. ***Penyusunan Rancangan Awal RKPD;***

   Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan top-down/bottom-up, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan Pokok pokok pikiran DPRD.

3. ***Penyusunan Rancangan RKPD;***

   Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4. ***Pelaksanaan Musrenbang RKPD;***

   Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan

provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. ***Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan***

   Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.

6. ***Penetapan RKPD.***

   Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan bahwa output dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel I.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJPD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dengan isu strategis
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan

PRINSIP	INDIKATOR
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dengann program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2024
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2024
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program dan output kegiatan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja)
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten Seram Bagian Timur

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Detail konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOMUP)	Usulan dari Musrenbang desa dan kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2024
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024
TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Pertimbangan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
	Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel I.3 Pendekatan Substansi RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan

PENDEKATAN	PARAMETER
	lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut

Gambar I.1 Hubungan antar dokumen

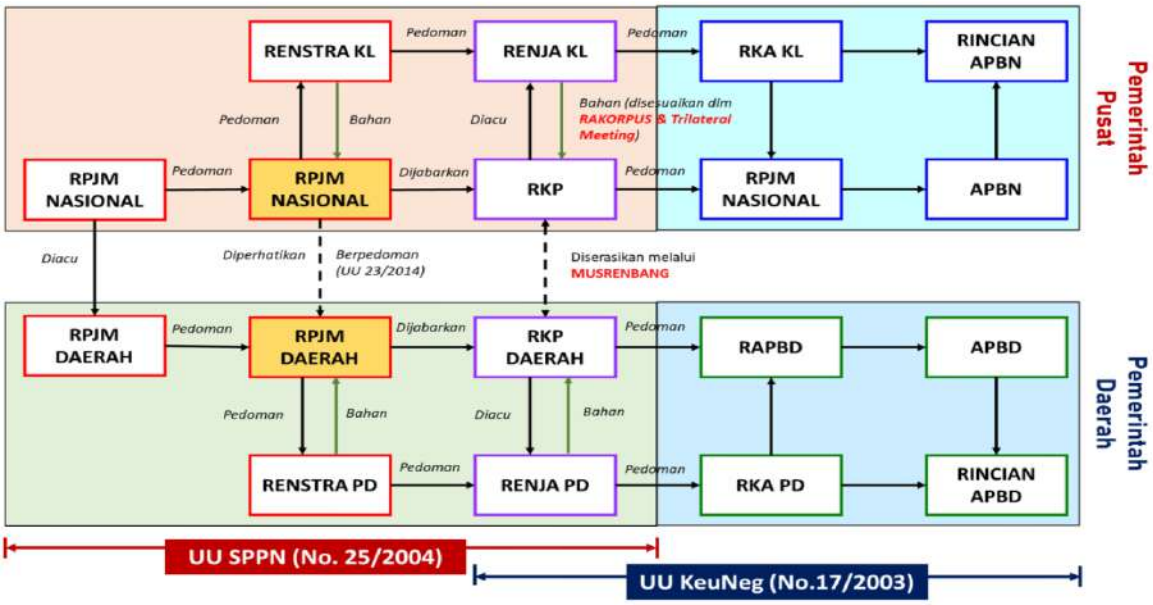

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat Korelasi antar dokumen perencanaan, Dokumen-dokumen perencanaaan yang bersifat a-spasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial. Secara Detil keterkaitan RKPD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut;

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 disusun dengan maksud menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Maksud :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Tujuan :

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun anggaran 2024.

1.5. Sistematika RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri atas :

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lainyang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum;
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah;
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalanan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;

2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur;

2.3.4. Kondisi Inovasi Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.5. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.3. Kebijakan Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

5.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024

5.2. Rencana Program dan kegiatan yang Bersumber dari APBD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2024

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

6.2. Indikator Kinerja Kunci

6.3. Indikator Makro Pembangunan

6.4. Arah Kebijakan DAK Tahun 2024

BAB VII Penutup

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian Timur dan Selatan Pulau Seram Provinsi Maluku, dimana secara geografis berada pada 128°20´ – 130°10´ BT dan 02°50´ – 04°40´ LS. Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki luas 20.656,894 km² dengan tiga dimensi kewilayahan yang meliputi dataran rendah, dataran tinggi dan laut. wilayah daratan tinggi dan rendah memiliki luas 5.779,123 km², sedangkan wilayah lautan memiliki luas 14.877,771 km², serta mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu : Pulau Gorom, Kesui Watubela, Teor, Gorom Timur, Pulau Panjang, Seram Timur, Tutuk Tolu, Kilmury, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Werinama, Siwalalat, Bula, Bula Barat dan Teluk Waru. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Werinama yaitu sebesar 993,84 km² atau sekitar 17,20 persen dari luas Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula Barat memiliki luas kedua terbesar, yaitu 880,29 km² atau 15,23 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah kecamatan Pulau Panjang, yaitu sebesar 20,53 km² atau 0,36 persen.

Sementara itu, jumlah pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 62 pulau, dimana terdapat 10 pulau besar yaitu Pulau Seram 554.737,325 Ha, Pulau Gorom 6.852,661 Ha, Pulau Manawoka 5.099,812 Ha, Pulau Kesui 3.014,497 Ha, Pulau Teor/Wanin 2.328,542 Ha, Pulau Panjang

2.052,636 Ha, Pulau parang 1.235,226 Ha, Pulau Seram Laut 939,683 Ha, Pulau Merwaru 411,301 Ha, Pulau Watubela 406,652 Ha.

Tabel II.1. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Prosentase (%)	Jumlah Desa
1.	Pulau Gorom	Kataloka	91,303	1,58	24
2.	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58	0,65	18
3.	Teor	Wermaf Kampung Tengah	23,41	0,41	10
4.	Gorom Timur	Miran	29,29	0,51	23
5.	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53	0,36	6
6.	Seram Timur	Geser	73,35	1,27	16
7.	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09	5,71	11
8.	Kilmury	Kilmury	837,62	14,49	14
9	Kian Darat	Watu-Watu	129,23	2,24	10
10.	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37	2,98	10
11.	Werinama	Werinama	993,84	17,20	10
12.	Siwalalat	Atiahu	847,19	14,66	12
13.	Bula	Bula	643,36	11,13	10
14.	Bula Barat	Waiketam Baru	880,29	15,23	13
15.	Teluk Waru	Waru	669,67	11,59	11
Jumlah			**5.799,123**	**100,00**	**198**

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel II.2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pulau Gorom	24	24	24	24	24
Kesui Watubela	18	18	18	18	18
Teor	10	10	10	10	10
Gorom Timur	23	23	23	23	23
Pulau Panjang	6	6	6	6	6
Seram Timur	16	16	16	16	16
Tutuk Tolu	11	11	11	11	11
Kilmury	14	14	14	14	14
Kian Darat	10	10	10	10	10
Siritaun Wida Timur	10	10	10	10	10
Werinama	10	10	10	10	10
Siwalalat	12	12	12	12	12
Bula	10	10	10	10	10
Bula Barat	13	13	13	13	13
Teluk Waru	11	11	11	11	11
Jumlah	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan untuk menjelaskan posisi letak geografis dari Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1.Peta Kabupaten Seram Bagian Timur

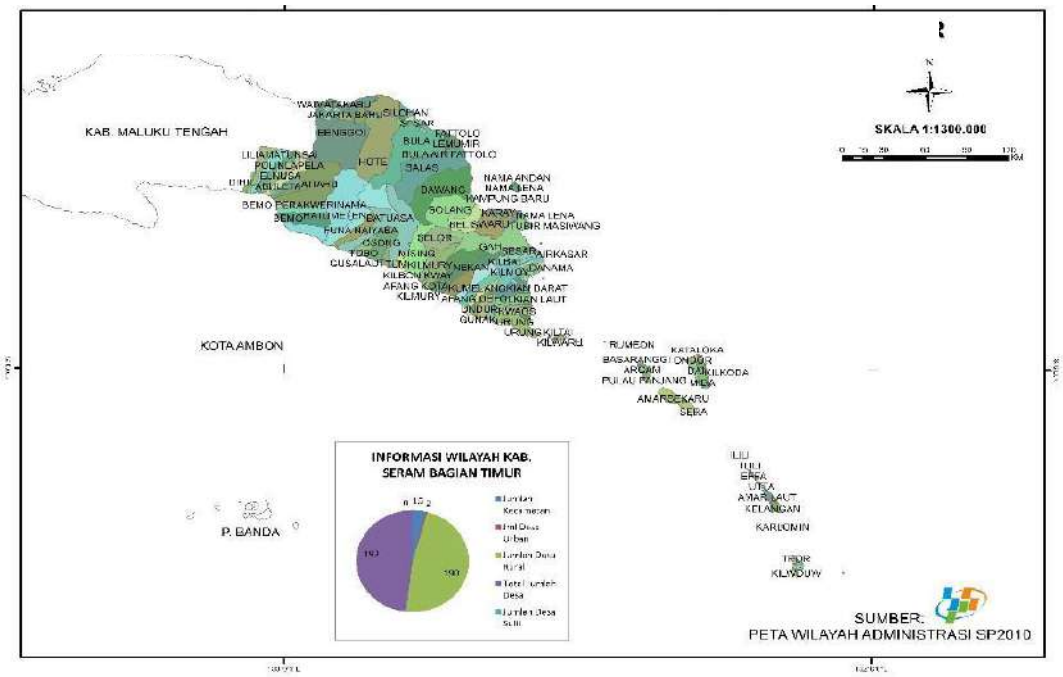

2.1.1.2 Karakteristik Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.2.1 Posisi Astronomis

Secara astronomis Kabupaten Seram Bagian Timur terletak antara 129° 50'00 - 131° 50'00 Bujur Timur dan 020 50'00" – 040 50'00 lintang selatan.

Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dikelompokkan kedalam beberapa satuan geografis yaitu (1) Satuan geografis Pegunungan yang menempati bagian tengah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan kelurusan Timur-Barat, dan puncak tertinggi adalah Gunung Hatu Balimakiam (896 m) dan Gunung Hatu Abalwan (875 m); (2) Satuan Geografis perbukitan merupakan lereng pegunungan dengan tonjolan tonjolan bukit, yang menempati lereng Utara dan Selatan pada sepanjang Timur Barat Kabupaten Seram Bagian Timur; Satuan Geografis Dataran Tinggi dan Lembah Bantaran Sungai yang membelah bagian tengah agak ke selatan dan memanjang Timur Barat Kabupaten Seram Bagian Timur; (3) Satuan geografis Dataran Pantai dan Delta, terdapat meluas di sepanjang timur

barat Pantai Utara dan relative menyempit di Pantai Selatan, serta Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; dan (4) Satuan Geografis Pulau-pulau berupa Kepulauan Geser dan Watubela, yang terdapat di bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Kondisi geografis yang sangat bervariatif tersebut diatas mengakibatkan Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki wilayah yang sulit diakses dengan jalan darat antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, baik yang menghubungkan wilayah bagian utara dan selatannya, maupun wilayah timur dan baratnya. Hal ini di sebabkan oleh kondisi pegunungan dan perbukitannya yang mempunyai lereng yang terjal dan curam, dengan kondisi iklim yang memiliki curah hujan sangat tinggi, sehingga sungai-sungai besar sering terjadi banjir.

2.1.1.2.2 Posisi geografis

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sekitar 20.656,894 km² yang tediri dari wilayah laut seluas 14.877,771 km² dan wilayah daratan seluas 5.779,123 km². Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berupa (i) deretan pulau yang berjumlah 49 buah pulau; (ii) mempunyai 132aliran sungai di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada ketinggian rata-rata antara 0-500 m s.d 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %. dataran rendah di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapatdi Daerah Masiwang, Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.3. Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan lahan	Rata-rata antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %
2	Ketinggian lahan	Rata-rata antara 0-500 m dan antara 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl)

2.1.1.3.1 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari air laut, air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Arewan, Kian, Kilaba, Aruan, Masiwang, Kadar, Bitorik, Bemo, Bobot, Tian, Daut, Tunsa, Salas, Balifar dan Sungai Bulawa, serta Sungai Waimiran.

Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur T terdiri atas sungai perenial (mengalir sepanjang musim) dan sungai intermiten (sungai musiman). Sungai-sungai perenial merupakan sungai-sungai utama di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengalir sepanjang musim dengan debit yang bervariasi. Adanya variasi debit aliran disebabkan pengurangan jumlah pasokan debit air ke sungai utama akibat perubahan penggunaanlahan pada wilayah DAS.

29 buah sungai yang tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih maupun sebagai pengairan lahan pertanian. Jumlah sungai yang paling banyak ditemukan di pulau Seram, terutama di bagian selatan Pulau Seram yang meliputi Kecamatan Werinama, Kilmury dan Siwalalat dengan 15 buah sungai dan bagian utara Pulau Seram termasuk dalam wilayah Bula dan sekitarnya dengan 9 buah sungai. Bentuk alur sungai utama di wilayah utara dan seram umumnya berbentuk V. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan masa air tawar yang memasuki wilayah lembah sungai ini memiliki lingkungan sekitar dengan tutupan lahan bergetasi hutan, sehingga fungsi tangkapan air masih tetap berlangsung secara baik. Walaupun demikian, telah banyak lahan hutan mengalami pembukaan, terutama untuk aktifitas HPH. Akitivitas HPH berpotensi merusak sistem aliran pada wilayah DAS jika tidak dikelola secara baik.

2.1.1.3.2 Kondisi Klimatologi

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas,

sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim seirama dengan musim yang ada. klim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seirama dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman. **Distribusi** iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasion pengamatan iklim.

1. Wilayah kecamatan Pulau-Pulau Gorom termasuk dalam zona Iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah P. Panjang, P. Amaskaru dan P. Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi P. Garogos, P. Koon, bagian Tengah dan Selatan P. Gorom, P. Kesui, Kepulauan Watubela dan P. Teor.
2. Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur di yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.
3. Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3 ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.

4. Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagan di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seirama dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman.

Distribusi iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasion pengamatan iklim. Bedasarkan pada asumsi yang mengklasifikasikan data klimatologi spasial oleh Oldeman (1980), maka pengelompokan wilayah curah hujan dalam bentuk zona Agroklimat untuk Kabupaten Seram Timur sebagaiberikut :

Zona I.3 : Curah hujan tahunan 2000 – 4000 mm

Zona II. 6 : Curah hujan Tahunan 2500-4000 mm, tercakup

		didalamnya zona B2 (7-9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman
Zona III.1	:	Curah hujan tahunan 2000-2500 mm, tercakup di dalamnya zona C2 (5-6 B, 2-3 BK) menurut Oldeman. Termasuk zona ini adalah sebagian wilayah Kecamatan Werinama
Zona III.2	:	Curah hujan tahunan 2000-3000 mm, tercakup di dalamnya zona C1 (56BB dan < 2 BK) menurut Oldeman. Puncak curah hujan pada bulan Juni-Juli atau Juli Agustus
Zona IV.1	:	Curah hujan tahunan 3000-4000 mm, tercakup di dalamnya zona A2 (>9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman

Wilayah Kecamatan Pulau Gorom termasuk dalam zona Iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah P. Panjang, P. Amaskaru dan P. Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi P. Garogos, P. Koon, bagian Tengah dan Selatan P. Gorom, P. Kesui, Kepulauan Watubela dan P. Teor.

Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3 ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.

Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagan di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Data perkembangan cuaca sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah, temperatur rata-rata sekitar 28,8°C. Dimana temperatur tertinggi rata-rata pada kisaran 34,7°C dan minimum rata-rata 23°C. Tekanan udara rata-rata setahun 1009,9 Milibar dan kelembaban nisbi rata-rata 92 %. Pada tahun yang sama mengalami hari hujan sebanyak 27 hari, dengan rata-rata curah hujan 776,8 mm per bulan.

Sementara itu, kecepatan angin rata-rata 30 knot, sedangkan jumlah hari hujan yang terjadi sepanjang tahun 2022, adalah paling sedikit terjadi di bulan Januari dan desember yaitu sebanyak 13 hari hujan dan yang paling banyak terjadi di bulan Mei sebanyak 27 hari hujan.

2.1.1.3.3 Penggunaan Lahan

Pada dasarnya penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai organisasi tata ruang maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur terbagi menjadi 9 (Sembilan) jenis dengan total luas penggunaan lahan sebesar1.116.230,8 ha. Adapun penggunaan lahan

tersebut terdiri dari airdanau/situ, air tawar sungai, hutan rimba, bukit pasir darat, bukit pasirlaut, perkebunan, permukiman/tempat kegiatan, semak belukar/alang-alang, dan tegalan/ladang.

Gambar II.2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Seram Bagian Timur

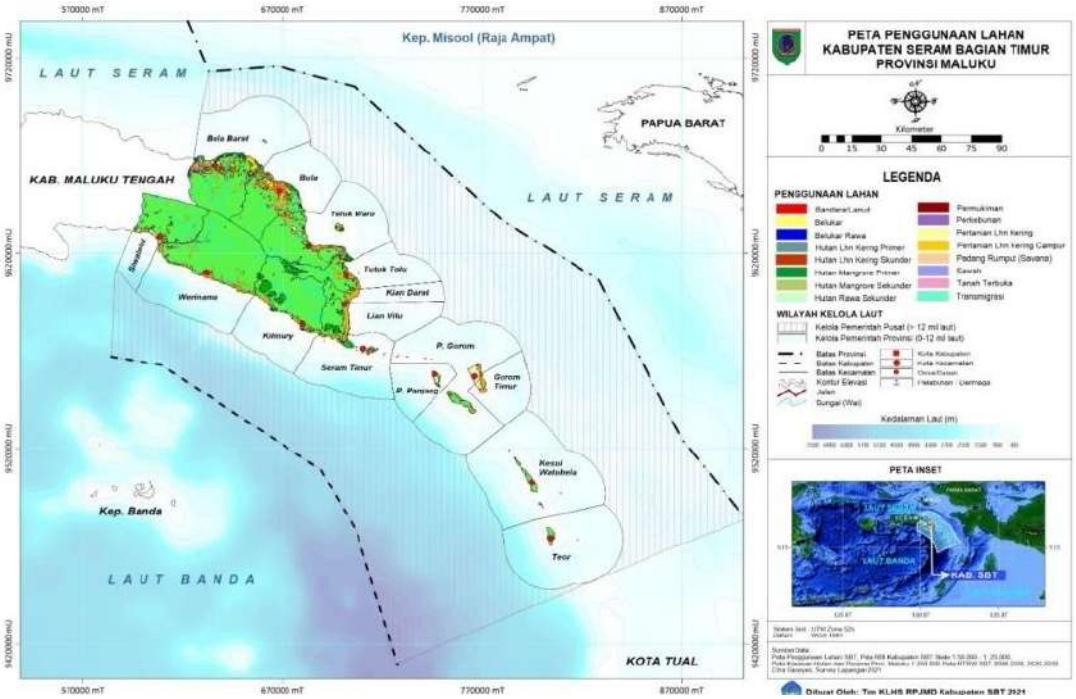

2.1.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya perairan, maka memiliki 2 (dua) aspek yang satu dengan yang lain saling memiliki peluang, tantangan dan ancaman. Pada satu sisi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur banyak terkendala oleh kondisi geografi, demografi dan kondisi keterbatasan infrastruktur, terutama infrastruktur laut. Pada sisi lain, memiliki potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah jika dikelola secara profesional, seperti potensi wisata laut dan potensi wilayah daratan dengan pemandangan yang indah. Oleh karena itu, dalam mendorong terwujudnya percepatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pendekatan terkait dengan pengembangan wilayah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat dipertimbangkan dengan mendorong berbagai kawasan untuk

dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan kawasan-kawasan dimaksud, antara lain terdiri dari (1) Kawasan untuk pengembangan pertanian; (2) Kawasan untuk pengembangan perikanan; (3) Kawasan untuk pengembangan peternakan; (4) Kawasan untuk pengembangan perkebunan; (5) Kawasan untuk pengembangan industri; (6) Kawasan untuk pengembangan pariwisata; (7) Kawasan untuk permukiman; dan (8). Kawasan untuk pengembangan aktivitas lainnya. Penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, karena memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu

a. Kasawan Pertanian

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan khususnya, umumnya mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang disiapkan untuk penanaman padi dan palawija agar diupayakan tersedia lahan persawahan yang relatif luas sesuai kebutuhan.

Sampai saat ini Kecamatan Bula Barat (Waimatakabo, Waisamet, Akebobo, Waiketam Baru, Jakarta Baru, Sumber Agung, Jembatan Basah) merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memberikan kontribusi yang cukup besar terutama pada sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan potensi kawasan yang merupakan dataran yang menunjukkan bahwa kawasan ini adalah kawasan yang dikembangkan secara intensif sebagai kawasan pertanian. Masuknya transmigran ke kawasan ini juga merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan kawasan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengn kawasan-kawasan lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Kawasan Perikanan

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan ikan laut. Namun demikian potensi perikanan air tawar juga

dipertimbangkan tetap dapat dikembangkan. Berdasarkan analisis data 5 (lima) tahun yang lalu, maka untuk mendorong terwujudnya potensi perikanan laut yang melimpah, maka perlu untuk dipertimbangkan berbagai langkah kebijakan, antara lain sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan yang memadai, pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan, dan mendekatkan serta memudahkan akses pada permodalan, informasi dan pasar.

Rencana pengembangan budidaya perikanan yang dapat digunakan untuk kegiatan seluas 8.274,69 ha, luasan tersebut terbagi pada beberapa wilayah perairan yaitu perairan Kecamatan Teluk Waru pada lokasi Pulau Parang dengan total luas ± 536 Ha, Kecamatan Seram Timur pada lokasi P. Keffing, P. Geser, P. Kilwaru, P. Seram Laut, P. Kifar, P. Neding, Desa Kuffar, Desa Urung dengan total luas ± 5.348 Ha dan Kecamatan Gorom pada lokasi P. Garogos, P. Panjang, P. Manawoka dengan total luas ±2.391 Ha. Areal terluas yang dapat dimanfaatkan sebagai areal kegiatan usaha budidaya laut adalah perairan Desa Kuffar.

Tabel II.4. Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya

Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Budidaya
P. Parang	323,43	Ikan Kerapu
P. Parang	119,92	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Parang	92,46	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Keffing	794,66	Rumput laut, Teripang
P. Geser	99,81	Rumput laut
Kilwaru	407,98	Rumput laut
P. Seram Laut	324,87	Rumput laut
P. Kifar	356,80	Rumput laut
P. Neding	356,80	Rumput laut
P. Garagos	315,24	Rumput laut
P. Panjang	1.080,10	Rumput laut, Teripang
Manawoka	254,70	Rumput laut
P. Gorom	733,62	Rumput laut, Ikan
Kufar	2.123,74	Udang
Urung	924,85	Penyu
Jumlah	**8.274,69**	

c. Kawasan Perkebunan

Memperhatikan data dan informasi perkembangan bidang urusan perkebunan periode 5 (lima) tahun yang lalu, maka pengelolaan bidang urusan perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi salah satu fokus yang akan didorong untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan terus mendorong mewujudkan bidang ini yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, lahan yang disiapkan untuk kegiatan dimaksud relatif cukup luas. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat terpacu untuk mengembangkan bidang urusan perkebunan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi Perkebunan dengan komuditas unggulan adalah Pala, Cengkeh, Coklat dan Kelapa, tetapi yang menjadi komoditas unggulan Primer adalah Pala dengan penyebaran lokasi terbesar berada pada Kecamatan P.Gorom dan Kesui Watubela. Berikut ini tabel wilayah sebaran komuditas unggulan.

Tabel II.5. Wilayah Komoditas

No	Jenis Komoditi	Wilayah Sebaran Komodit Unggulan Masing-Masing Kecamatan
1.	Pala	Kataloka, Ondor, Day, Mida, Amarwatu, Kotasirih, Kilkoda, Miran, Rarat, Amarsekaru, Pulau Panjang Kataloka, Tamher Warat, Kelangan, Teor Werinama, Polin, Tunsai, Lapela, Hatumeten Danama, Kilbat, Kilmoy, Sesar, Air Kasar
2.	Cengkeh	Werinama Atiahu, Tunsai, Polin, Batuasa, Tobo Danama, Kilbat, Kilmoy, Sesar, Air Kasar Utta, amar laut, kelangan, tamher timur, tamher warat, Teor (Kilwouw) Ondor, Kataloka, Amar sekaru, Mida, Day, Amarwatu, Miran, Rarat
3.	Coklat	Gah, Waras - waras Atiahu, Werinama, Bemo, Batuasa, Tum, Osong, Elnusa, Abuleta, Lapela, Lilyama, Dihil. Waru,Salas,Dawang, Hote,Banggoi
4.	Kelapa	Werinama, Bemo, Atiahu, Elnusa, Lapela, Dihil, Lilyama Waras-waras,Gah Rumui, Rumalusi, Kilwouw, Kerker, Wermaf Lapang,Tamher Warat, Tamher Timur, Utta Hote, Banggoi, Salas, Dawang, Belis, Waru, Karay

d. Kawasan Perindustrian

Bidang industri, merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukan, bahwa kontribusi berbagai bidang perindustrian terhadap kesejahteraan masyarakat relatif cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk pengembangan industri kedepan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, supaya mempertimbangkan kiranya dapat menyiapkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan

Pengembangan kawasan industri dipengaruhi oleh jenis industri komoditas unggulan dan keterkaitan industri terhadap perekonomian. Keterkaitan kegiatan industri terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Keterkaitan ke belakang adalah hubungan industri tersebut dengan sektor / industri yang menyediakan bahan baku. Keterkaitan kedepan adalah hubungan antara industri tersebut dengan sektor/industri yang menggunakan output industri tersebut. Penentuan daerah industri berdasarkan potensi daerah masing - masing, mengingat Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah kepualauan, maka penentuan lokasi industri menyebar berdasarkan potensi unggulan daerah setempat :

Tabel II.6. Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Industri	Potensi
Bula	Meubel	Kayu
Werinama	Meubel dan Anyaman	Kayu dan Rotan
Seram Timur	Pengolahan Ikan, Udang dan Rumput Laut	Perikanan
P. Gorom	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Cengkeh dan Pala	Perikanan dan Perkebunan
Tutuk Tolu	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan
Kesui Watubela	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan

e. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Dari data yang ada diketahui, bahwa pengelolaan potensi pariwisata dalam 5 (lima) tahun yang lalu belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, padahal potensi dan jenis wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara (wisnus), maupun wisatawan mancanegara (wisman) sangat potensial. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong potensi pariwisata sebagai salah satu unggulan yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu didukung dengan berbagai regulasi dan penganggaran yang memadai.

Berdasarkan analisis kondisi biofisik, oseanografi dan kehadiran habitat utama dengan disertai keanekaragarnan sumberdaya hayati didalamnya rnaka terdapat sejumlah lokasi di perairan pesisir dan laut Kabupaten Seram Bagian Timur yang layak dikembangkan rnenjadi daerah wisata yaitu wisata budaya dan wisata alam. Pariwisata budaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan lokasi-lokasi yang menjadi pengembangan wisata alam dimaksud adalah:

1. Kecamatan seram Timur :
   - Kiffura;
   - Keffing;
   - Urung;
   - Kon;
2. Kecamatan Pulau Gorom
   - Garogos
   - Amarsekaru;
3. Kecamatan Gorom Timur
   - Wawatu.
4. Kecamatan Werinama
   - Tobo;
   - Hatumeten;
   - Osong;

- Batuasa.

5. Kecamatan Bula
   - Englas;
   - Sesar;
   - Waihul.
6. Kecamatan Teluk Waru
   - Pulau Panjang,
7. Kecamatan Bula Barat
   - Hote;
   - Silohan.
8. Kecamatan Tutuk Tolu
   - Pulau Akat.
9. Kecamatan Kesui Watubela
   - Pulau Igar:
   - Pulau Baam.
10. Kecamatan Teor
    - Pulau Kurkaf.

Seluruh lokasi yang disebut diatas memiliki keindahan pesisir pantai, terumbu karang danke ragaman biota yang cukup tinggi, sehingga memberikan nuansa panorama pesisir dan bawah laut yang unik dan menarik. Lokasi-lokasi tersebut merupakan spot untuk berenang (skin diving) dan menyelam (scuba diving) baru, serta ekowisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Berikut ini merupakan potensi kawasan pariwisata di Kabupaten seram Bagian Timur yang tgersaji dalam Tabel II.7

Tabel II.7. Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Danau Sole	Wisata Bahari (Karang, Magrove, Ikan, Pasir Putih)	Amar sekaru	Pulau Gorom
Pantai Gumummae	Wisata Bahari (Surfing dan Diving) dan Wisata Alam	Bula	Bula
Karang Bais	Wisata Bahari / Wisata Bawah Laut (Ikan, Terumbu Karang, Surfing, (Diving)	Hote	Bula Barat

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Pulau Akat	Penyangga Kota Kabupaten Hunimua, Wisata Bahari, Pulau Terapung (Ikan, Burung Kenari, Surfing, Diving	Air Kasar	Tutu kTolu
Pulau Madoran, Kidan, Neden	Wisata Bahari	Kian Darat	Kian Darat
Gugus Pulau Nukus, Khon dan Garogos	Wisata Bahari, dan Wisata Alam	Kataloka	Pulau Gorom
Gugus Batu	Wisata Sejarah dan Budaya	Kian Darat	Kian Darat
Penangkaran Rusa	Wisata cagar Alam (dijadikan Taman Perburuan Rusa)	Nif dan Werinama	Bula dan werinama
Air Terjun	Wisata Alam	Gusa Laut	Werinama

f. *Kawasan Permukiman*

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur per September 2022 adalah 136.903 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 3,26% dan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,72% serta penduduk dengan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 3,65%. Selanjutnya rasio jenis kelamin tercacat sebanyak 104 dan sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bula yakni sebayak 26,023 jiwa atau 18,86% dan yang paling kecil berada di Kecamatan Pulau Panjang yakni sebanyak 2.692 jiwa atau 1,95% dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Pertumbuhan pendudukan yang relatif cepat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (2010-2020) dapat dimaknai sebagai bonus demografi yang jika dikelola dengan baik akan mampu menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan daerah, sebaliknya tingkat pertumbuhan dan laju perumbuhan yang cepat itu juga dapat menimbulkan permasalahan yang terkait langsung dengan ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik pada satu sisi. Pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga secara pararel memerlukan tersedianya lahan yang memadai untuk berbagai aktivitas seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pasar, rumah sakit dan terminal.

g. Kawasan Untuk Pengembangan Aktifitas Lainnya

Untuk memenuhi berbagai aktivitas diluar aktivitas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 diatas, maka dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, supaya juga dipertimbangkan untuk menambah luasan lahan yang akan diperuntukan bagi permukiman penduduk dan berbagai aktivitas lainnya, antara lain (i) kawasan untuk perdagangan dan jasa; (ii) kawasan untuk rumah sakit, pendidikan dan ruang terbuka hijau; dan (iii) kawasan untuk fasilitas terminal, pelabuhan dan bandara.

h. Kawasan Rawan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan ruang lingkup rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai wilayah perairan yang kelilingi oleh laut, maka ada beberapa kawasan yang kadangkala terjadi bencana walaupun dalam skala yang relatif kecil. Bencana alam dan jenis bencana alam yang kadang terjadi di wilayah Kebupaten Seram Bagian Timur, antara lain banjir, angin puting beliung, kebakaran dan gelombang pasang yang sangat berpengaruh pada aktivitas nelayan dan penangkapan ikan laut.

Hasil identifikasi kawasan-kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa ada beberapa potensi rawan bencana yang perlu ditangani secara serius, antara lain : abrasi, kecelakaan laut, banjir, erosi dan sedimentasi. Beberapa lokasi yang teridentifikasi merupakan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten seram Bagian Timur antara lain :

1. Di muara DAS Masiwang dan Waibobot berpotensi untuk terjadinya banjir yang mengakibatkan sedimentasi di wilayah sekitarnya.

2. Daerah rawan gempa tektonik adalah di Bula, Waru, Masiwang dan kawasan sebelah utara pulau-pulau kecil di Kecamatan Seram Timur yakni Pulau Geser, Gorom, Manawoka dan Madorang.
3. Di bagian selatan yakni di Undur, Kilmuri, Batuasa serta Banda dan sekitamya yang merupakan daerah batas lempeng tektonik adalah daerah rawan tektonik berskala besar berpeluang terjadi tsunami.
4. Daerah sekitar Pulau Igar, Pulau Kon, Pulau Panjang dan antara Pulau Geser dan Pulau Keffing yang terimbas oleh ruseddies.
5. Daerah muara sungai Masiwang dan Salas berpotensi untuk terjadinya bencana pelayaran karena adanya "saaru".
6. Daerah rawan abrasi pantai berada di daerah Kepulauan Gorom, Watubela dan Werinama Arahan-arahan dalam

2.1.1.4 Demografi

2.1.1.4.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2022 berdasarkan Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka sebanyak 137.359 jiwa, terdiri dari 69.565 jiwa laki-laki dan 67.794 jiwa perempuan.

Tabel II.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pulau Gorom	21.726	20.752	22.134	21.960	21.692
2	Kesui Watubela	9.068	7.750	9.110	9.100	8.932
3	Teor	2.874	2.959	2.955	2.915	3.076
4	Gorom Timur	9.176	8.618	9.293	9.446	9.374
5	Pulau Panjang	2.609	2.214	2.719	2.644	2.633
6	Seram Timur	12.570	11.857	12.378	12.278	12.185
7	Tutuk Tolu	7.370	5.466	6.996	6.964	6.993
8	Kilmury	5.923	4.931	6.338	6.248	6.335
9	Siritaun Wida Timur	6.724	5.514	6.832	6.832	6.947
10	Kian Darat	5.766	5.501	6.153	6.209	6.329
11	Werinama	6.152	5.830	5.943	5.837	5.805
12	Siwalalat	6.236	5.459	6.355	6.270	6.288
13	Bula	24.505	16.537	25.713	26.113	26.558
14	Bula Barat	7.771	6.795	8.186	8.408	8.629
15	Teluk Waru	5.199	4.493	5.362	5.385	5.583
Seram Bagian Timur		**133.669**	**114.677**	**136.467**	**136.609**	**137.359**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan mengamati data pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan sepanjang kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 133.669 jiwa sampai dengan tahun 2022 telah tumbuh menjadi 137.359 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingindicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 460,43 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 3,18 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya kenaikan harga.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 1,97 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,05 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini dipicu oleh perbaikan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha dibandingkan tahun 2021. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,61 persen.

1) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018 - 2022) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Seram Bagian Timur pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan

dan perikanan yaitu mencapai 27,17 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 28,83 persen. Persentase terbesar ketiga dihasilkan oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,02 persen. Bila dilihat lagi secara kontribusi, penyumbang terbesar ke empat dalam perekonomian Seram Bagian Timur adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,29 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi, sebesar 6,90 persen.

Jika dikelompokan dalam 2 lapangan usaha (barang dan jasa), maka stuktur perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha barang yaitu sebesar 71,82 persen; sedangkan untuk lapagan usaha jasa hanya sebesar 28,18 persen.

Tabel. II.9. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 – 2022 (juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	763,647.21	806,872.52	854,418.69	883,973.45	988,502.81
2	Pertambangan dan Penggalian	819,854.93	756,835.67	704,043.92	843,455.02	1.048,749.36
3	Industri Pengolahan	46,517.51	47,584.82	47,097.04	48,303.70	56,613.59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	413.95	433.27	454.71	488.74	524.90
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,743.06	1,790.03	1,880.59	1,991.63	2,128.89
6	Konstruksi	204,206.92	212,781.87	214,980.41	232,203.67	251,146.75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	203,128.61	214,491.58	213,281.32	232,310.89	265,394.30
8	Transportasi dan Pergudangan	79,525.52	83,982.45	79,177.98	85,270.89	99,925.68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,643.48	14,358.88	14,423.28	15,108.15	16,901.82
10	Informasi dan Komunikasi	16,698.14	17,644.66	18,285.02	19,591.95	21,589.73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,644.47	49,387.86	53,866.30	59,656.37	65,874.33
12	Real Estate	10,130.96	10,324.04	10,359.82	10,632.27	11,219.21
13	Jasa Perusahaan	3,724.66	3,897.79	3,910.29	4,128.30	4,543.55

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	464,316.60	496,515.17	506,604.80	539,248.35	583,005.62
15	Jasa Pendidikan	67,976.14	71,244.91	71,551.60	75,250.07	81,437.81
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	67,885.98	71,901.02	75,931.70	81,288.95	90,890.99
17	Jasa Lainnya	42,200.12	44,351.92	43,811.87	44,808.67	49,693.40
Produk Domestik Regional Bruto ADHB		**2,850,258.28**	**2,904,398.46**	**2,914,079.35**	**3,177,711.08**	**3,638,142.75**

Sumber Data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Tabel di atas menunjukan selama lima tahun (2018-2022), pertumbuhan PDRB semakin meningkat. Kontribusi terbesar pertama terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2022 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sedangkan kontribusi ketiga terbesar yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan mencermati data PDRB menunjukan struktur ekonomi Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur dalam lima tahun masih didominasi oleh sektor Primer (Pertambangan dan Penggalian). Kontribusi terendah terhadap pembentukan PDRB dalam lima tahun (2018-2022) yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, rata-rata kontribusi 0,01 persen.

Tabel. II.10. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018—2022

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	503,421.73	526,641.04	546,249.20	561,140.88	601,141.37
2	Pertambangan dan Penggalian	589,993.85	547,771.79	534,425.44	507,843.26	491,108.32
3	Industri Pengolahan	28,080.39	28,439.91	27,723.24	28,078.01	31,813.96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	311.78	323.51	337.05	356.29	372.83
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,515.05	1,552.01	1,611.39	1,676.08	1,736.20
6	Konstruksi	121,082.42	125,657.38	124,685.51	132,794.00	139,355.09
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	141,160.01	145,673.77	140,155.61	150,012.54	162,518.75
8	Transportasi dan Pergudangan	55,134.27	57,485.50	52,842.92	54,292.95	57,263.74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,619.68	8,998.51	8,851.25	9,230.60	10,013.60

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
10	Informasi dan Komunikasi	14,705.73	15,337.54	15,492.21	16,204.56	17,419.53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,576.59	32,152.06	35,285.22	36,912.93	37,089.72
12	Real Estate	7,347.66	7,432.15	7,419.06	7,558.14	7,861.89
13	Jasa Perusahaan	3,050.25	3,161.08	3,119.47	3,245.56	3,464.71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	290,615.15	307,791.21	307,679.74	322,212.21	341,402.35
15	Jasa Pendidikan	50,126.14	52,223.83	52,067.80	54,126.87	57,540.04
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	45,127.57	47,381.74	49,602.88	52,616.32	56,916.07
17	Jasa Lainnya	27,825.29	28,860.13	28,241.33	28,562.64	30,490.73
Produk Domestik Regional Bruto ADHK		**1.917,693.54**	**1.936,883.16**	**1.935,789.31**	**1.966,863.84**	**2.047,508.87**

Sumber Data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Tabel II.11. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,79	27,78	29,32	27,82	27,17
2	Pertambangan dan Penggalian	28,76	26,06	24,16	26,54	28,83
3	Industri Pengolahan	1,63	1,64	1,62	1,52	1,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	7,16	7,33	7,38	7,31	6,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	7,13	7,39	7,32	7,31	7,29
8	Transportasi dan Pergudangan	2,79	2,89	2,72	2,68	2,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,49	0,49	0,48	0,46
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,61	0,63	0,62	0,59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,57	1,70	1,85	1,88	1,81
12	Real Estate	0,36	0,36	0,36	0,33	0,31
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	16,29	17,10	17,38	16,97	16,02

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
15	Jasa Pendidikan	2,38	2,45	2,46	2,37	2,24
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2,38	2,48	2,61	2,56	2,50
17	Jasa Lainnya	1,48	1,53	1,50	1,41	1,37
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selain pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya barang dan jasa yang bias dihasilkan, yang berarti akan lebih banyak orang yang dapat ikut menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. Namun, jika barang dan jasa yang dihasilkan bertambah tanpa disertai dengan pemerataan akan menambah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010

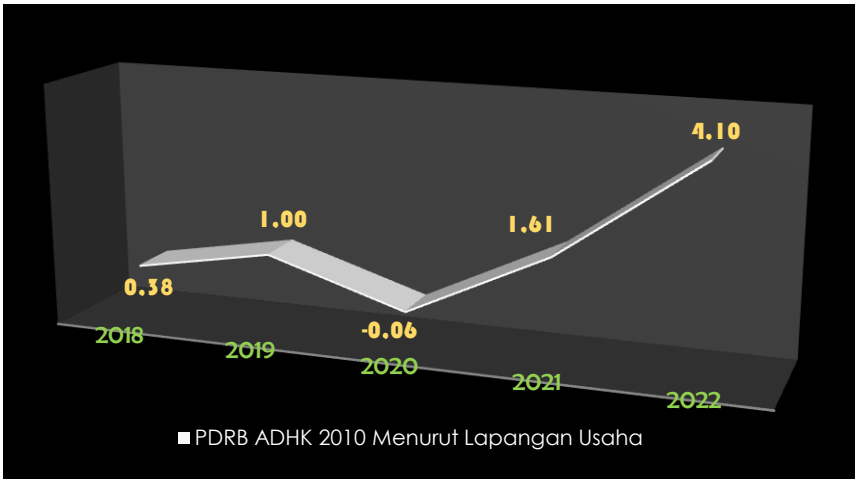

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB Seram Bagian Timur tahun 2022 adalah 4,10 persen; sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Seram Bagian Timur mencapai 1,61 persen. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 13,31 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,48 persen, dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju pertumbuhan 8,34 persen.

Pada tahun 2022 tercatat sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kontraksi paling dalam terjadi di lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Pembatasan Sosial berskala besar dan Penutupan Bandara serta Pelabuhan menyebabkan transportasi di Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya transportasi udara tidak beroperasi selama satu triwulan, dan penerbangan juga belum kembali pulih hingga akhir tahun 2020. Sejalan dengan angkutan udara, angkutan Darat maupun angkutan laut pun mengalami penurunan produksi di masa Pandemi Covid – 19.

Tabel II.12. Laju Pertumbuhan Rill PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,68	4,61	3,72	2,73	7,13
2	Pertambangan dan Penggalian	-10,79	-7,16	-2,44	-4,97	-3,30
3	Industri Pengolahan	4,63	1,28	-2,52	1,28	13,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,16	3,76	4,18	5,71	4,64
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,62	2,44	3,83	4,01	3,59
6	Konstruksi	7,04	3,78	-0,77	6,50	4,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8,40	3,20	-3,79	7,03	8,34
8	Transportasi dan Pergudangan	6,42	4,26	-8,08	2,74	5,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	4,39	-1,64	4,29	8,48
10	Informasi dan Komunikasi	5,47	1,30	1,01	4,60	7,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	8,71	9,74	4,61	0,48
12	Real Estate	1,70	1,15	-0,18	1,87	4,02
13	Jasa Perusahaan	1,79	3,63	-1,32	4,04	6,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,18	5,91	-0,04	4,72	5,96
15	Jasa Pendidikan	6,50	4,18	-0,30	3,95	6,31
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5,30	5,00	4,69	6,08	8,17
17	Jasa Lainnya	4,32	3,72	-2,14	1,14	6,75
Produk Domestik Regional Bruto		**0,38**	**1,00**	**-0,06**	**1,61**	**4,10**

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 persen di tahun 2022, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,61. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang membaik di tahun 2022 mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan sektor mulai giat yang menghasilkan kegiatan produksi dan konsumsi. Kondisi giatnya kegiatan sektor ditahun 2022 terlihat dari sebagian besar atau 16 (Enam belas) sektor pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi pada sektor Industri Pengolahan 13,31 persen, diikuti oleh Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,48 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 8,34 persen. Sedangkan sektor pertanian sebagai sektor

primadona masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,13 persen, walaupun sempat turun di tahun 2021 sebesar 2,73 persen, karena sektor yang masih mampu beradaptsi tinggi terhadap keadaan covid-19 adalah sektor primer ini, pertanian, kehutanan dan perikanan.

3) PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Seram Bagian Timur (ADHB) mencapai 25,93 juta Rupiah. PDRB Perkapita di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022) mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 besarnya PDRB perkapita Seram Bagian Timur adalah 25,55 juta rupiah selanjutnya meningkat menjadi 22,66 juta rupiah di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 25,96 juta rupiah. Tahun 2021 PDRB per kapita Seram Bagian Timur mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 25,93 juta rupiah. Secara rata-rata besarnya PDRB perkapita Seram Bagian Timur dalam periode lima tahun terakhir tercatat sebesar 24,07 juta rupiah.

Tabel II.13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	2.850,26	2.904,40	2.914,08	3.177,71	3.638,14
ADHK	1.917,69	1.936,88	1.935,79	1.966,86	2.047,51
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	25.546,13	25,661,76	25,964,55	23,172,48	25.936,53
ADHK	17.187,79	17.113,30	17.247,95	14.342,75	14.596,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-1,04	1.85	-18,20	-0,67	1,80

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

2. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2018-2022.

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 988,50 milyar rupiah atau sebesar 27,17 persen. Subkategori Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 53,46 persen.

Bila dilihat lebih rinci pada sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, tanaman perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah kategori lapangan usaha tersebut yaitu tanaman perkebunan sebesar 34,34 persen, disusul tanaman pangan sebesar 14,83 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Subkategori terbesar kedua adalah perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 43,47 persen dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 27,99 milyar rupiah atau 2,80 persen terhadap total nilai tambah pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dikarenakan semakin besarnya kontribusi kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur, terutama bila dilihat dari sub kategori tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Untuk subkategori hortikultura, terlihat kontribusinya berada pada kisaran 1,61 hingga 1,72 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan kehutanan dan penebangan kayu, memberikan kontribusi 2,79 hingga 3,12 persen sejak 5 tahun terakhir terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel II.14. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian,Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2022	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services*	52.92	53.38	53.48	53.74	53.46
	a. Tanaman Pangan /*Food Crops*	16.77	16.63	16.19	15.78	14.83
	b. Tanaman Hortikultura Semusim/*Horticultural Crops*	1.72	1.70	1.66	1.61	1.67
	c. Perkebunan Semusim/*Plantation Crops*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya/*Horticultural Annual and Other*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	e. Perkebunan Tahunan/*Plantation Crops*	31.79	32.43	33.05	33.78	34.34
	f. Peternakan/*Livestock*	1.71	1.67	1.64	1.65	1.70
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan/ *Agriculture Services and Hunting*	0.89	0.90	0.89	0.87	0.88
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ *Forestry and Logging*	3.04	3.12	2.95	2.79	2.80
3	Perikanan/*Fishery*	44.03	43.50	43.57	43.47	43.74
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

2) Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub kategori Pertambangan Biji Logam, dan subkategori Pertambangan dan

Penggalian lainnya. Seram Bagian Timur merupakan satu-satunya Kabupaten yang memiliki produksi minyak di Provinsi Maluku.

Tabel II.15. Nilai PDRB ADHB Kategori Pertambangan dan Penggalian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Milyar) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/*Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal*	788,23	722,90	669,78	807,11	1.009,71
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/*Coal and Lignite Mining*	-	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam/*Iron Ore Mining*	-	-	-	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/*Other Mining and Quarrying*	31,63	33,93	34,26	36,35	39,04
Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*		**819,85**	**756,84**	**704,04**	**843,46**	**1.048,75**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur. Meskipun demikian, nilainya terlihat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi pada produksi minyak di Kab. Seram Bagian Timur. Terlihat nilai tambah dari sub kategori pertambangan mencapai 1.048,75 milyar rupiah pada tahun 2022. Kontribusi subkategori pertambangan minyak, gas dan panas bumi di tahun 2022 sebesar 1.009,71 milyar rupiah atau sebesar 96,28 persen terhadap total nilai tambah pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk subkategori pertambangan dan penggalian lainnya hanya berkontribusi sebesar 3,72 persen di tahun 2022. Laju pertumbuhan kategori ini di tahun 2022 masih mengalami kontraksi seperti tahun 2021. Laju pertumbuhan Kategori ini pada tahun 2022 sebesar 3,30 persen dan laju pertumbuhan pada tahun 2021 adalah sebesar -4,97 persen.

Grafik II.2 Kotribusi Subkategori Terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen) Tahun 2021-2022

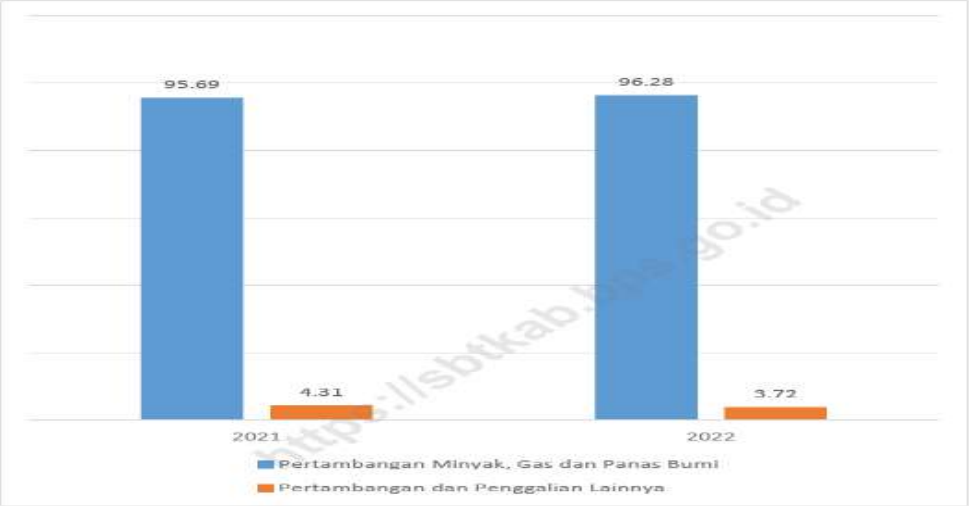

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

3) Industri Pengolahan

Pada kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar pada tahun 2022 adalah Industri makanan dan minuman, dengan nilai tambah mencapai 28,35 milyar rupiah atau sebesar 48,06 persen dari keseluruhan nilai tambah industri. Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus juga memiliki nilai tambah terbesar kedua dalam memajukan industri di Seram Bagian Timur pada tahun 2022 dengan nilai tambah mencapai 25,34 milyar rupiah atau sebesar 46,40 persen dari keseluruhan nilai tambah industri.

Tabel 2.16. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ *Manufacture of Coal and Refned Petroleum Products*	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman/ *Manufacture of Food Products and Beverages*	47.26	47.62	47.65	47.81	48.06
3	Industri Pengolahan Tembakau/ *Manufacture of Tobacco Products*	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ *Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel*	1.04	1.02	1.03	1.06	1.08
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ *Manufacture of Leather and Related Products and Footwear*	-	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ *Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles* of Straw and Plaiting Materials	47.31	47.02	46.96	46.68	46.40
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ *Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded* Media	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/*Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ *Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products*	-	-	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam/ *Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products*	0.95	0.92	0.93	0.94	0.96
11	Industri Logam Dasar/*Manufacture of Basic Metals*	-	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/*Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, ande* Electrical Equipment	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
13	Industri Mesin dan Perlengkapan / *Manufacture of Machinery and Equipment*	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan/*Manufacture of Transport Equipment*	2.40	2.35	2.36	2.44	2.43
15	Industri Furnitur/*Manufacture of Furniture*	0.43	0.46	0.47	0.46	0.47
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ *Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment*	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32
C	**Industri Pengolahan/*Manufacturing***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 48,30 milyar rupiah di tahun 2021 menjadi 56,61 milyar rupiah pada tahun 2022. Namun pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun

2022. Industri Pengolahan mengalami perlambatan sebesar 1,28 persen di tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan 13,31 persen di tahun 2022. Hal ini menandakan telah pulihnya perekonomian sektor Industri Pengolahan dari Pandemi Covid-19.

4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 524,90 juta rupiah rupiah atau sekitar 0,01 persen terhadap perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2022. Secara nilai, angka ini meningkat dari tahun 2021 dimaa nilainya masih sebesar 488,74 juta rupiah. Dari kontribusi sub kategori tersebut, hampir seluruhnya (sebanyak 98,64 persen) merupakan kontribusi dari subkategori Ketenagalistrikan dan 1,42 persen oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu sebesar 4,64 persen.

Tabel II.17. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022*
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Ketenagalistrikan/*Electricity*	98.52	98.56	98.55	98.58	98.64
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es/ *Manufacture of Gas and Production of Ice*	1.48	1.44	1.45	1.42	1.36
D	**Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi

untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Seram Bagian Timur selama tahun 2022 relatif kecil, hanya 2,13 miliar rupiah atau sebesar 0,06 persen dengan pertumbuhan yang relatif fluktuatif selama periode 2018 –2022.

Grafik II.3 Peranan dan Laju Pertumbuhan Riil Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (persen) Tahun 2018 – 2022

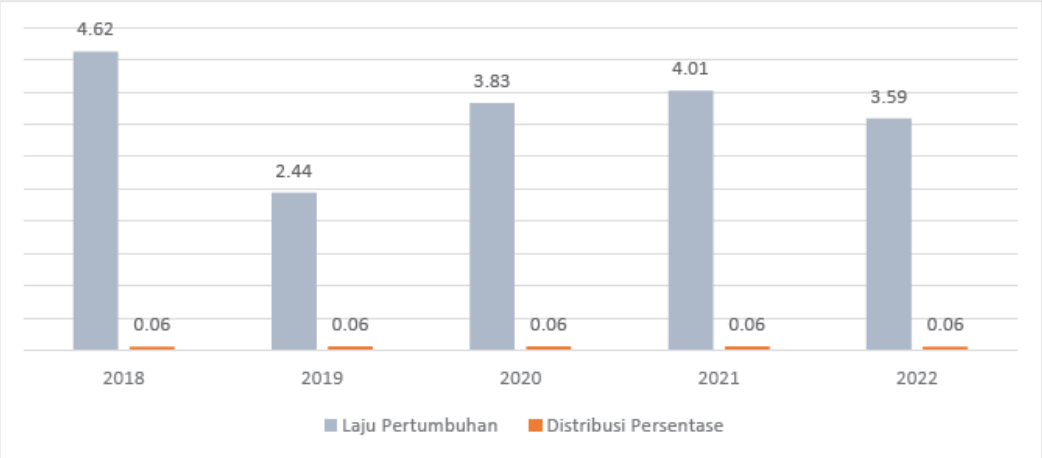

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

6) Kontruksi

Pada tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 251,15 milyar rupiah atau sebesar 6,90 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 232,20 milyar. Pertumbuhan kategori ini selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022, kategori konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar -4,94 persen.

7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sebanyak 7 persen terhadap perekonomian Kab. Seram Bagian Timur. Pada tahun 2022, kontribusi kategori ini mencapai 265,39 milyar rupiah atau sekitar 7,29

persen. Dari nilai tersebut, sekitar 91,76 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 8,24 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung Fluktuatif selama periode 2018-2022. Kedua sub kategori di Ketegori ini mengalami pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 4,70 dan 8,71 persen.

Tabel II.18. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/*Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	9.37	9.32	9.18	8.77	8.24
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles*	90.63	90.68	90.82	91.23	91.76
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

8) Transportasi dan Pergudangan

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 5 (lima) yang ada di Kab. Seram Bagian Timur yaitu Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Angkutan Sungai dan Penyebrangan serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir.

Kontribusi kategori ini mencapai 99,93 milyar rupiah atau sekitar -2,75 persen terhadap total PDRB tahun 2022. Semua sub kategori pada Kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan, hal

ini karena Pandemi Covid-19 yang berangsur pulih sehingga seluruh transportasi berjalan lancar seperti saat sebelum pandemi.

Laju Pertumbuhan sub Kategori Angkatan Darat tumbuh hingga 4,97 persen, angkutan laut sebesar 5,90 persen, angkutan sungai danau dan penyeberangan sebesar 3,46 persen, angkutan udara sebesar 7,74 persen dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan sebesar 6,06 persen.

Tabel. II.19. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Angkutan Rel/*Railways Transport*	-	-	-	-	-
2	Angkutan Darat/*Land Transport*	36.74	36.07	38.88	38.41	38.40
3	Angkutan Laut/*Sea Transport*	57.07	57.87	55.83	55.73	55.75
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/*River, Lake, and Ferry Transport*	2.73	2.66	2.31	2.50	2.44
5	Angkutan Udara/*Air Transport*	3.20	3.14	2.70	3.09	3.14
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/*Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier*	0.26	0.26	0.28	0.26	0.26
H	**Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2022, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Seram Bagian Timur sebesar 16,90 milyar rupiah atau 0,46 persen. Sekitar 0,10 persen dari PDRB total (atau 20,78 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi dan sebesar 0,37 persen (79,22 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan dan Minum.

Laju pertumbuhan kategori ini berfluktuasi, dan mengalami pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 8,48 persen. Meningkatnya kategori ini merupakan dampak perbaikan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur pasca Pandemi Covid – 19. Laju pertumbuhan sub kategori penyediaan akomodasi ini mencapai 7,41 persen. Senada dengan Penyedian Akomodasi, Usaha Penyediaan Makan Minum pun mengalami peningkatan daya beli. Pertumbuhan Penyedian Makan Minum yaitu 8,81.

Selama Periode Tahun 2018 – 2022 laju pertumbuhan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami fluktuasi pertumbuhan dengan tren yang melambat hingga kontraksi, hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 pertumbuhan kategori ini mencapai 3,10 persen selanjutnya mengalami pertumbuhan di tahun 2019 menjadi 4,39 persen, tahun 2020 kategori ini mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen kemudian meningkat menjadi 4,29 persen di tahun 2021 dan 8,48 persen di tahun 2022.

Tabel. II.20. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Akomodasi/*Accommodation*	22.28	22.38	21.11	21.16	20.78
2	Penyediaan Makan Minum/ *Food and Beverage Service Activities*	77.72	77.62	78.89	78.84	79.22
I	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Beverage Activities***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

10) Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Seram Bagian Timur selama tahun 2018 - 2022 berada pada kisaran 0,5 - 0,6 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 4,60 persen di tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan 7,50 persen di tahun 2022.

Percepatan pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi di beberapa kabupaten/kota, di Kab. Seram Bagian Timur, misalnya pengembangan jaringan *fiber optic*. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi online juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi. Kedepannya, Lapangan Usaha Informasi dan komunikasi diharapkan terus memberikan dampak positif terhadap perekonomian Seram Bagian Timur. Seiring dengan semakin membaiknya koneksi internet,

kategori ini akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

11) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2018 – 2022, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 98 persen terhadap PDRB kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi. Berikutnya adalah lapangan usaha jasa keuangan lainnya dengan kontribusi 0,5 – 0,6 persen.

Tabel. II.21. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Jasa Perantara Keuangan/*Financial Intermediary Services*	98.79	98.82	98.87	98.93	98.98
2	Asuransi dan Dana Pensiun/*Insurance and Pension Fund*	0.61	0.58	0.56	0.52	0.49
3	Jasa Keuangan Lainnya/*Other Financial Services*	0.60	0.60	0.58	0.55	0.54
4	Jasa Penunjang Keuangan/*Financial Supporting Service*	-	-	-	-	-
K	**Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities***	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

12) Real Estate

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Seram Bagian Timur dengan peranan sekitar 0,3 persen periode tahun 2018 – 2022. Sumbangan kategori ini di tahun 2022 sebesar 11,22 milyar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami pertumbuhan 4,02 persen.

Salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan laju pertumbuhan kategori Real Estate adalah situasi penjualan *property* baik itu perumahan yang dikembangkan oleh swasta ataupun oleh pemerintah. Ke depannya, hunian rumah bersubsidi bisa menjadi alternatif pengembangan kategori ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

13) Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 0,12 - 0,14 persen untuk tahun 2018 – 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain.

Laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan di tahun 2022. Tahun 2021, tercatat laju pertumbuhan kategori ini mencapai 4,04 persen dan meningkat menjadi 6,75 persen pada tahun 2022.

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang – undangan dan pen terjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2018 - 2022 kontribusinya untuk PDRB fluktuatif, yaitu dengan nilai 16,02 persen hingga 17,38 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selama lima tahun terakhir hanya mengalami kontraksi di tahun 2020 yaitu –0,04 persen dan kembali tumbuh positif pada tahun 2021 yaitu 4,72 persen dan 5,96 persen di tahun 2022.

15) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2022 jasa pendidikan menyumbang 2,24 persen terhadap total perekonomian Seram Bagian Timur. Kontribusinya meningkat dari 63,22 milyar rupiah di tahun 2018 menjadi 81,44 milyar rupiah pada tahun 2022.

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2022, kontribusinya terhadap perekonomian Seram Bagian Timur sebesar 2,50 persen dan laju pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Selama tahun 2018 – 2022 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit perlambatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2,53 persen; 2,38 persen; 2,48 persen; 2,61 persen; 2,56 persen dan 2,50 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu fluktuatif dari tahun ke tahun.

17) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Seram Bagian Timur tahun 2022 relatif kecil yaitu 49,69 milyar rupiah. Kontribusinya sejak 2018 – 2022 relatif stabil di kisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhan nya tumbuh sebesar 6,75 persen di tahun 2022.

3. Kemiskinan

Secara konseptual penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku, maka jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada urutan keempat dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 136.903 jiwa. Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontraksi ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur secara regional masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara keseluruhan. Keadaan ini salah satunya dipengaruhi tergoncangnya ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Jika dilihat lebih lanjut, Penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.22. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Tanimbar	21,53	30,76	30,74	30,70	26,94
Maluku Tenggara	23,16	22,69	22,59	22,89	21,38
Maluku Tengah	74,85	74,80	74,18	74,59	65,73
Buru	23,62	23,89	24,42	25,23	23,60
Kepulauan Aru	25,68	25,62	25,45	25,11	22,36
Seram Bagian Barat	43,77	43,14	43,15	43,72	38,57
Seram Bagian Timur	26,64	26,44	26,69	26,41	23,71
Maluku Barat Daya	21,98	21,49	21,37	21,74	20,36
Buru Selatan	10,12	10,17	10,07	9,99	9,35
Ambon	21,61	21,66	22,15	23,67	22,58
Tual	17,13	17,03	17,36	17,76	16,01
Maluku	**320,08**	**317,69**	**318,19**	**321,81**	**290,57**

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, terlihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022 adalah sebanyak 23,71 (ribu) dari total penduduk sebanyak 136.903 jiwa atau turun sebesar 2,7 dari 26,41 di tahun 2021. Data Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. II.23. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2018	341.261	26.640	23,62
2019	375.040	26.440	23,13
2020	398.430	26.690	23,04
2021	403.573	26.410	23,25
2022	-	-	-

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Sementara itu mengenai Indek Kedalam Kemiskinan (IKK) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018 – 2022 yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. II.24. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2018 – 2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2018	3,92	0,98
2019	4,35	1,18
2020	4,44	1,22
2021	3,79	0,98
2022	-	-

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

4. Indeks Pembangunan Manusia

4.1. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik berikut ini.

Grafik II.4. Capaian IPM
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 –2022

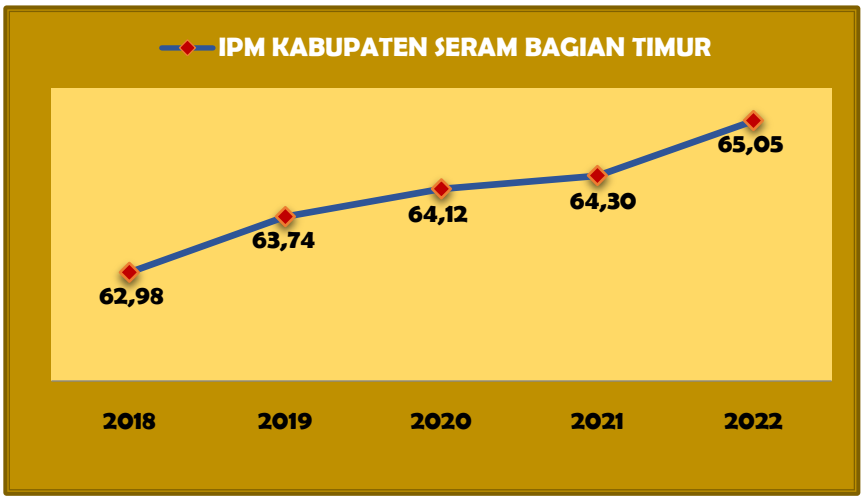

Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

4.2. Disparitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 2.21 dibawah ini.

Tabel II.25. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Kepulauan Tanimbar	62,39	62,86	62,86	62,97	63,45
Maluku Tenggara	65,53	65,85	66,20	66,33	66,88
Maluku Tengah	70,60	71,25	71,25	71,32	71,81
Buru	68,25	68,91	68,95	69,33	69,94
Kepulauan Aru	63,12	63,64	63,71	63,83	64,21
Seram Bagian Barat	65,14	65,49	65,62	65,83	66,67
Seram Bagian Timur	62,98	63,74	64,12	64,30	65,05
Maluku Barat Daya	60,64	61,55	61,90	62,37	63,07
Buru Selatan	63,62	64,42	64,69	64,80	65,37
Ambon	80,24	80,81	80,84	81,23	81,63
Tual	67,21	67,74	67,96	68,16	68,60
Maluku	**68,87**	**69,45**	**69,49**	**69,71**	**70,02**

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan,

kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM kearah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabiltas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

5. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi di konsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat),awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Table II.26. Perkembangan Ekspor Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Nilai Ekspor					
ADHB (Miliar Rp)	1.014,05	403,03	199,83	242,23	366,29
ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	747,43	448,60	296,96	262,26	323,74
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	35,58	13,88	6,86	7,62	10,07
Pertumbuhan (%)	(23,80)	(39,98)	(33,80)	(11,67)	23,43

Sumber data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut PengeluaranTahun 2018-2022
Ket : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2018-2022 nilai ekspor barang dan jasa fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.014,05 menjadi 403,03 miliar rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya pada

tahun 2020 2022 nilai ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar 199,83 miliar rupiah; 242,23 miliar rupiah dan 366,29 miliar rupiah.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 yang mencapai 23,43 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya pertumbuhan ekspor melambat pada masing-masing tahun adalah sebesar -23,80 persen (2018); -39,98 persen (2019); -33,80 persen (2020); dan -11,67 persen di tahun 2021.

6. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB(termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*directpurchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Seram Bagian Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota laindalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seram

Bagian Timur mengalami trend penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2018 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 2.008,02 miliar rupiah; 1.885,75 miliar rupiah pada tahun 2019; 1.524,53 miliar rupiah pada tahun 2020; 1.563,51 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 1.511,80 di tahun 2022. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2018 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 70,45 persen kemudian terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 41,55 persen saja.

Table II.27. Perkembangan Impor Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Nilai Impor					
ADHB (Miliar Rp)	2.008,02	1.885,75	1.524,53	1.563,51	1.511,80
ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	1.249,49	1.172,85	872,92	876,65	919,77
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,45	64,93	52,32	49,20	41,55
Pertumbuhan (%)	(10,73)	(6,13)	(25,57)	0,43	4,92

Sumber data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada focus kesejahteraan sosial pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan daerah, terutama karena pengaruhnya yang sangat berarti bagi peningkatan daya dukung penduduk selaku subyek pembangunan, dan bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Menyadari akan hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat,

terutama melalui peningkatan sarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator angka rata-rata lama sekolah (*mean years school*/MYS) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Table II.28. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun %				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Lama Sekolah	35	35	36	37	37

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2. Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Table II.29. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun %				
	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	51	55	55	55	56

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2.1.2.2.2 Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel II.30. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun %				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	58,84	59,16	59,41	59,62	60,06

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode lima

tahun (2018-2022), yaitu dari 58,84 pada tahun 2018 menjadi 60,06 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. *Persentase Balita Gizi Buruk*

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu *stunting*. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel II.31. Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun (Balita)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi Buruk	28	25	15	12	8

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur terus mengalami penurunan dari 28 balita di tahun 2018 menurun menjadi 8 balita di tahun 2022. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemajuan pemenuhan gizi balita. Kebutuhan gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kondisi fisik melainkan tingkat pengetahuan balita. Percepatan gizi menjadi salah satu isu prioritas kesehatan dan erat kaitannya dengan kejadian stunting.

Kesehatan seperti halnya pendidikan, merupakan salah satu aspek penting yang sangat diperhitungkan dalam pembangunan manusia. Sasaran utama dari pembangunan kesehatan tidak lain adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang secara umum diukur dengan tingkat usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah dan atau daerah tertentu.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi penyediaan sarana kesehatan dan ketersediaan Tenaga Medis yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel II.32. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tenaga Medis	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	1	2	2	2	2
Puskesmas	19	22	24	22	22
Puskesmas Pembantu	71	70	60	70	70
Posyandu	241	229	230	248	241
Puskesdes	4	5	3	6	12
Klinik	3	1	1	2	3

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

Tabel II.33. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tenaga Medis	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Umum	25	11	20	34	52
Dokter Gigi	4	3	15	6	7
Dokter Spesialis	9	12	10	9	11
Bidan	133	84	254	294	386
Perawat Umum	372	204	631	661	737
Perawat Gigi	1	2	2	2	1
Farmasi	-	-	-	-	60
Apoteker	-	-	-	-	17
Kesmas	-	-	-	-	124
Kesling	-	-	-	-	60
Gizi	-	-	-	-	66
Keterapian Fisik	-	-	-	-	1
Keteknisan Medis	-	-	-	-	5
Teknis Biomedika	-	-	-	-	21

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

2.1.2.2.3 Pemuda dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator antara lain :

a. Jumlah organisasi pemuda;
b. Jumlah organisasi olahraga;
c. Jumlah kegiatan kepemudaan;
d. Jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda; dan
e. Jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga diKabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.34. Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Pemuda	16	16	20	20	22
Jumlah Organisasi Olahraga	10	10	10	14	14
Jumlah Kegiatan Olahraga	2	1	-	-	-
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja/Pemuda	-	-	-	-	-
Jumlah Lapangan Olahraga	198	201	223	257	386

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum, pada berbagai bidang yakni : (i) Bidang Pendidikan, (ii) Kesehatan, (iii) Lingkungan hidup, (iv) sarana dan prasarana umum, (v) Penataan ruang dan perhubungan dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni: (i) pertanian, (ii) pariwisata, (iii) jasa dan perdagangan, (iv) energi dan sumberdaya mineral dan sebagainya, yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan saluran perubahan masyarakat, yang menjadi salah satuprioritas pembangunan. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-Undang Dasar. Peran pemerintah dalam melaksanakan layanan wajib bidang pendidikan, dicerminkan melalui beberapa indikator, antara lain: pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah,baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya.

Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur dari semua jenjang pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari100%, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Table II.35. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
7 – 12	94,20	95,34	99.60	99,77	99,69
13 – 15	93,55	95,65	97,11	97,37	97,10
16 – 18	89,30	91,12	82,94	82,88	82,79

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk APS usia 7-12 tahun, 13-15 dan 16-18, angkanya makin mendekati 100%, yang berarti bahwa anak usia 7-18 tahun hampir semuanya bersekolah.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah muridpada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia sekolah menurut jenjang pendidikan. Secara rinci dapatdilihat pada tabel berikut :

Table II.36. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan		Tahun			
	2018	2019	2020	2021	2022
7 – 12	115,85	107,70	109,64	110,33	113,13
13 – 15	88,41	90,87	90,91	90,01	90,01
16 – 18	83,29	87,45	87,21	87,19	91,93

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Table II.37. Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
7 – 12	71,98	87,85	98,42	98,65	98,55
13 – 15	87,60	88,76	75,51	72,72	79,00
16 – 18	62,87	86,62	64,50	64,41	64,87

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan.

d. Jumlah Ketersedian Sarana Pendidikan

Dari segi ketersediaan sarana pendidikan, jumlah sekolah untuk setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Table II.38. Jumlah Ketersediaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018		2019		2020		2021		2022	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
TK/RA	5	94	5	92	5	63	5	55	5	109
SD/MI	122	25	129	18	128	20	128	21	129	22
SMP/MTs	45	7	47	7	47	7	47	6	47	8
SMA/SMK/MA	22	8	22	8	22	8	25	13	27	13
PERGURUAN TINGGI	-	5	-	5	-	4	-	3	-	3

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

e. Jumlah Guru dan Murid

Table II.39. Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	N	S
TK/RA	104	97	167	135	245	210	950	1.043	37	649
SD/MI	10.042	8.876	9.703	8.606	8.345	6.241	8.649	9.481	15.441	3.016
SMP/MTs	2.984	2.867	2.881	2.832	2.541	3.143	2.358	3.407	6.704	1.293
SMA/SMK/MA	2.671	2.551	2.783	2.743	2.653	2.548	3.514	2.635	4.137	2.467

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Table II.40. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	N	S
TK/RA	9	6	8	9	23	15	59	218	7	9
SD/MI	379	694	363	696	537	378	605	484	1.242	225
SMP/MTs	197	298	195	321	318	186	332	170	710	204
SMA/SMK/MA	144	236	156	231	178	243	185	103	279	96

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

f. Rasio Guru Permurid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satuguru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah murid, guru dan rasio murid terhadap guru di setiap jenjang pendidikan.

Tabel II.41. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
	2018			2019			2020			2021			2022		
TK/RA	201	15	13	302	17	18	455	38	12	1.993	277	7	686	16	43
SD/MI	18.918	1.073	18	18.309	1.059	17	14.586	915	16	18.130	1.089	17	18.457	1.467	13
SMP/MTs	5.881	495	12	5.713	516	11	5.684	504	11	5.765	502	11	7.997	914	9
SMA/SMK/MA	5.222	360	15	5.526	387	14	5.201	421	12	6.149	288	21	6.604	375	18

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.42. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang PAUD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga PAUD	104	97	68	60	114
Jumlah Tenaga Pendidikan PAUD	15	17	38	277	16
Jumlah Murid PAUD	201	17	38	1.993	686
Rasio Tenaga Pendidik	13	18	12	7	43

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

h. Pendidikan Dasar

Tabel II.43. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SD/MI Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga SD/MI	147	147	148	149	151
Jumlah Tenaga Pendidikan SD/MI	1.073	1.059	915	1.039	1.467
Jumlah Murid SD/MI	18.923	18.309	14.586	18.130	18.457
Rasio Tenaga Pendidik	18	17	16	17	13

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

i. Pendidikan Menengah Pertama

Tabel II.44. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga SMP/MTs	52	54	51	53	55
Jumlah Tenaga Pendidikan SMP/MTs	495	516	504	502	914
Jumlah Murid SMP/MTs	6.314	5.713	5.684	5.407	7.997
Rasio Tenaga Pendidik	13	11	11	11	18

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

j. Pendidikan Menengah Atas

Tabel II.45. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga SMA/SMK/MA	30	30	30	38	40
Jumlah Tenaga Pendidikan SMA/SMK/MA	360	387	421	288	375
Jumlah Murid SMA/SMK/MA	5.222	5.526	5.201	6.149	6.604
Rasio Tenaga Pendidik	15	14	12	21	18

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.

Tabel II.46. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi (AKB)	8	26	21	7	-

Sumber Data : Dinas Kesehatan

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90 persen kematian ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada TPB Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

Dalam rangka upaya penurunan AKI yang ditujukan untuk negara yang sedang berkembang, disusun suatu gerakan yang

dinamakan *Safe Motherhood. Safe motherhood* merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat melalui penolong persalinan dengan tenaga kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II.47. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu (AKI)	6	8	8	8	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan

c. *Prevalensi Stunting*

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Tabel II.48. Jumlah *Stunting* di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Stunting	96	234	516	257	421

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Data terkait stunting di Indonesia dihasilkan melalui kegiatan Riskesdas, yaitu melalui pengukuran antropometri. Hal yang patut menjadi perhatian adalah Riskesdas tidak dilakukan setiap tahun, melainkan sekali dalam lima tahun. Hal ini menyebabkan evaluasi berbagai program dan kebijakan terkait penanganan stunting di Indonesia tidak dapat dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) tidak dilakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2020 di karenakan adanya Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021. Melalui integrasi, akan dihasilkan indikator penting yaitu prevalensi stunting pada anak bawah lima tahun (balita). Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran (antropometri) berat badan dan panjang/tinggi badan balita serta melakukan wawancara untuk konfirmasi umur, jenis kelamin, kondisi sakit/sehat, oedema dan diare dari balita yang diukur. Pengumpulan data dilakukan setelah pelaksanaan Susenas 2019 yaitu April 2019.

Stunting dipengaruhi oleh faktor multidimensi dan tidak hanya faktor gizi balita, namun juga kondisi ketika masih dalam kandungan.

Oleh karena itu, intervensi penanganan *stunting* harus dimulai semenjak janin dalam kandungan hingga anak berumur dua tahun atau biasa dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan. Konvergensi program dan upaya sinergis dari seluruh pemangku kebijakan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan *stunting*.

Permasalahan Stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting

memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak gagal tumbuh dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Keadaan itu kemudian akan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fsik dan kerentanan anak terhadap penyakit, stunting juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (World Bank, 2014). Menurut Data World Bank, PDB Indonsia pada tahun 2020 sebesar Rp.15.434 Triliun, mąką kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar Rp.308-463 Triliun (Kemenkeu.go.id).

d. Jumlah Penderita HIV/AIDS

HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak seperti

normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman.

Tabel II.49. Jumlah Kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus HIV/AIDS	9	11	13	10	22

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

e. *Tubercolosis (TB)*

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosa, yang menyerang paru-paru. Bakteri TBC membunuh jaringan dari organ yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas.

Tabel II.50. Jumlah Kasus *Tubercolosis (TB)* di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Tubercolosis (TB)	153	146	149	123	172

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

f. *Malaria*

Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API) malaria merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah. Angka *Annual Parasite Incidence* (API) malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida,

pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.

Tabel II.51. Jumlah Kasus *Malaria* di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Malaria	53	45	63	60	118

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

g. Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang sering dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu). Rasio Sarana Kesehatan tahun 2018-2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.52. Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk	113.180	114.667	137.972	136.609	136.903
Puskesmas	19	22	24	22	22
Rasio Puskesmas	1 : 5.957	1 : 6.035	1 : 5.749	1 : 6.210	1 : 6.223
Puskesmas Pembantu	71	70	60	70	70
Rasio Pustu	1 : 1.594	1 : 1.638	1 : 2.300	1 : 1952	1 : 1.956
Posyandu	241	229	230	248	241
Rasio Posyandu	1 : 470	1 : 501	1 : 600	1 : 551	1 : 568
Puskesdes	4	5	3	6	12
Rasio Puskesdes	1 : 28.295	1 : 22.933	1 : 45.991	1 : 22.768	1 : 11.409
Klinik	3	2	2	2	3
Rasio Klinik	1 : 37.727	1 : 57.334	1 : 68.986	1 : 68.305	1 : 45.634

Sumber Data : Dinas Kesehatan

h. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter dan tenaga melayani 2.500 penduduk. Data tentang Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel II.53. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk	113.180	114.667	137.972	136.609	136.903
Dokter Umum	25	11	20	34	52
Rasio Dokter Umum	22	10	14	25	18
Dokter Gigi	4	3	15	6	7
Rasio Dokter Gigi	4	3	11	4	5
Dokter Spesial	9	12	10	9	11
Rasio Dokter Spesial	8	10	7	7	8
Bidan	133	84	254	294	386
Rasio Bidan	118	173	184	215	282
Perawat Umum	372	204	631	661	737
Rasio Perawat Umum	329	178	457	484	538
Perawat Gigi	1	2	2	2	1
Rasio Perawat Gigi	1	2	1	1	1

Sumber Data : Dinas Kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan, merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaat Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan, merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/ kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis ("engineering criteria") yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif. Kinerja

jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

a. Mantap sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baikdari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas;
b. Mantap marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya; dan
c. Tidak mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Berikut ini data jalan tahun 2018-2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel II.54. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Negara	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Provinsi	153,40	153,40	153,40	153,40	153,40
Kabupaten/Kota	404,14	404,14	404,14	404,14	404,14
Jumlah	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**647,54**

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Tabel II.55. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aspal	275,86	338,96	342,045	341,477	368,08
Tidak Diaspal	196,94	162,05	167,591	281,895	255,83
Lainnya	174,74	146,53	137,904	24,168	22,05
Jumlah	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**645,97**

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Tabel II.56. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	372,05	312,453	293,147	269,023	323,41
Sedang	4,16	33,612	121,771	194,144	174,63
Rusak	200,57	94,052	86,777	143,936	21,91
Rusak Berat	70,76	207,423	145,845	40,437	126,02
Jumlah	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**645,97**

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Dinas Pekerjaan Umum juga melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dalam hal Penataan Ruang yaitu melakukan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dengan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk serta faktor lainnya, seperti kebijakan kota, perkembangan ekonomi wilayah dan kota, baik internal maupun eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan factor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati rumah tersebut, Data jumlah rumah perlu digunakan untuk menganalisis ketersediaan rumah saat ini terhadap kebutuhan rumah oleh penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Data jumlah rumah yang digunakan diperoleh dari

data digitasi dari peta citra Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022. Adapun jumlah rumah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.57. Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Eksisting (unit)	backlog	RTLH
Pulau Gorom	21.820	5.873	4.478	1.395	246
Kesui Watubela	9.002	2.172	1.691	481	456
Teor	3.023	846	608	238	131
Gorom Timur	9.490	2.335	1.522	813	302
Pulau Panjang	2.584	685	543	142	102
Seram Timur	12.180	3.508	2.743	765	142
Tutuk Tolu	6.938	1.713	1.277	436	69
Kilmuri	6.319	1.635	1.234	401	166
Werinama	5.823	1.726	1.290	436	282
Siwalalat	6.288	2.053	1.632	321	300
Bula	26.259	7.305	5.518	1.787	129
Bula Barat	8.542	2.390	2.013	377	553
Kian Darat	6.288	1.603	1.017	648	144
Siritaun Wida Timur	6.830	1.736	1.223	513	53
Teluk Waru	5.517	1.290	975	315	210
Seram Bagian Timur	**136.903**	**36.870**	**27.764**	**9.068**	

Sumber Data : Dinas PKP Kab. Seram Bagian Timur

Sedangkan pada eksisting *backlog* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah. Data *backlog* ini dilakukan dengan membandingkan antara kebutuhan rumah dan rumah yang tersedia. Sesuai ketentuan dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, untuk mengetahui kebutuhan rumah yakni digunakan asumsi jumlah penghuni 1 rumah yakni sebanyak 5 orang, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa 1 Rumah Tangga beranggotakan 5 orang. Asumsi ini digunakan dalam penentuan Jumlah rumah tangga Kabupaten seram Bagian Timur Tahun 2022.

a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah (tempat tinggal) adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang

dan pangan dimana tempat manusia dapat berlindung, mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tempat berlindung tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Dalam merespon kondisi masyarakat tersebut yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bersama untuk lebih fokus dan lebih meningkatkan koordinasi, singkronisasi dalam percepatan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni termasuk sanitasi keluarga. Untuk itu kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang anggarannya bersumber dari Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD I) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) di Kabupaten Seram Bagian Timur pada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.58. Data dan Penanganan RTLH di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH RTLH	TAHU 2022				RTLH Yang Belum Terealisasi
					BSPS	DAK	APBD I	APBD II	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN PULAU GOROM	1	Desa Amarsekaru	113	60	35			18
		2	Desa Kataloka	22		15			7
		3	Desa Mida	11		18			-7
2	KECAMATAN PULAU PANJANG	1	Desa Wisalean	39		15			24
		2	Desa lalasa	43	13				30
3	KECAMATAN SERAM TIMUR	1	Desa Kiltai	11		20			-9
		2	Desa Kwamor Mata Ata	13		18			-5
		3	Desa Guli - Guli	39				3	36
		4	Desa Urung	12				2	10
		5	Desa Ainena	8				1	7
4	KECAMATAN SIRITAU WIDA TIMUR	1	Desa Suru	63				34	29
		2	Desa Salagor Kota	13				2	11
5	KECAMATAN KIAN DARAT	1	Desa Artafela						
		2	Desa Angar						
6	KECAMATAN TUTUK TOLU	1	Desa Danama	10				2	8
		2	Desa Bati Kilwouw	20	19				1
7	KECAMATAN BULA	1	Desa Bula	22			4		18
		2	Desa Sesar	30			4		26
		3	Desa Fattolo	35			5		30
8	KECAMATAN BULA BARAT	1	Desa Banggoi Pancorang	20	11				9
		2	Desa Jakarta Baru	65	17				48
		3	Desa Waimatakabo	45	15				30
9	KECAMATAN KILMURI	1	Desa Sumbawa	23				1	22
		2	Desa Kumelang	31		17			14
		3	Desa Kilmury	7				1	6
		4	Desa Mising	20	20				0
10	KECAMATAN WERINAMA	1	Desa Tum	15		15			-
		2	Desa Gusalaut	17		15			2
		3	Desa Werinama	22	1		5		16
		4	Desa Bemo	22	3				19
		5	Desa Bemo Perak	59	5				54
11	KECAMATAN SIWALALAT	1	Desa Lapela	28			11		17
12	KECAMATAN KESUI WATUBELA	1	Desa Lahema	40		17			23
JUMLAH RTLH				**928**	**164**	**220**	**29**	**47**	**488**
Realisasi RTLH				**440**					

Sumber Data : Dinas PKP Kab. Seram Bagian Timur

b. Prasarana dan Sarana Umum

1) Air Bersih

Penyediaan air bersih layak minum merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang terhadap ketersediaan air bersih harus segera diwujudkan sehingga dibutuhkan lembaga (PDAM) yang akan dalam mengelola air bersih yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur, masyarakat memperoleh air bersih dari sumur galian dan sumur bor. Pada mulanya, sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya yakni berasal dari sumur galian yangterletak di tengah-tengah lingkungan permukiman masyarakat. Setelah itu sebagian masyarakat kemudian beralih menggunakan sumur bor yang dilengkapi dengan bak penampungan air. Air bersih yang berasal dari sumur galian dan sumur bor tersebut kemudian didistribusikan kesetiap rumah-rumah yang membutuhkan dengan menggunakan system perpipaan.

Tabel II.59. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Daya Utama yang digunakan Rumah Tangga Tahun 2022

Karateristik	Sumber Air Utama Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll					
	Air Kemasan/ Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur/Mata Air Terlindung	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya
Jenis Kelamin KRT						
Laki-Laki	-	-	5,95	58,96	33,42	1,67
Perempuan	-	-	NA	59,54	34,54	NA
Kuintil Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	-	-	NA	52,05	44,79	NA
40 Persen Tengah	-	-	3,22	59,22	35,99	NA
20 Persen Teratas	-	-	13,04	66,22	17,62	NA
Pendidikan Tertinggi KRT						
SD ke bawah	-	-	NA	57,91	38,76	NA
SMP ke atas	-	-	9,19	60,21	27,73	2,86
Seram Bagian Timur			**5,70**	**59,01**	**33,51**	**1,78**

2) Prasarana dan Sarana Umum (PSU) lainnya

Dalam pemenuhan kawasan rumah yang layak huni maka dibutuhkan utilitas pendukung lainnya seperti Pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan, Pembangunan/Peningkatan Drainase, Pembangunan Talud, Pengelolaan air limbah dan Persampahan

3) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Keberadaan beberapa kawasan permukiman kumuh (terutama kumuh berat) merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Penangaan masalah ini tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya, dalam hal ini pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil. Masa depan suatu wilayah sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan masyarakat yang berimbang, kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan suatu wilayah yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan perintisan pembentukan jaringan kemitraan yang saling mendukung.

Tabel II.60. Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Topografi Kawasan	Kategori	Pola Penanganan	Prioritas Penanganan
1	Kecamatan Teor	19,24	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
2	Kecamatan Kilmury	94,63	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
3	Kecamatan Bula	22,90	Permukiman Kumuh di atas Air dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
4	Kecamatan Teluk Waru	66,91	Permukiman Kumuh di dataran rendah dan kawasan perbukitan	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
5	Kecamatan Bula Barat	27,20	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
6	Kecamatan Pulau Gorom	37,54	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
7	Kecamatan Gorom Timur	23,81	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
8	Kecamatan Siritaun Wida Timur	91,75	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
9	Kecamatan Siwalalat	32,94	pemukiman kumuh tepi pantai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
10	Kecamatan Werinama	17,06	Permukiman kumuh di tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
11	Kecamatan Kian Darat	36,41	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah serta perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
12	Kecamatan Tutuk Tolu	35,05	Permukiman Kumuh di atas air, dataran rendah, dan perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
13	Kecamatan Seram Timur	24,50	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
14	Kecamata Pulau Panjang	14,89	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Berat
15	Kecamatan Kesui Watubela	20,14	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur dengan indikator antara lain meliputi :

a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa dan jumlah linmas per 10.000 penduduk.
b. Sedangkan pencapaian target indikator cakupan patrol petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, system informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat.

Tabel II.61. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penegak PERDA	0	0	23	1	1
Jumlah Petugas Satpol PP : ASN Honorer	 19 280	 19 280	 26 280	 30 150	 31 150
Penyelesaian Sengketa K3	0	0	0	0	0
Jumlah Petugas Linmas	0	0	0	0	0
System Informasi Manajemen Pemda	0	0	0	0	0
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagian besar didominasi oleh bencana banjir. Tabel II.62. merincikan jumlah kasus bencana yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022.

Tabel II.62. Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Kecamatan	Banjir					Gempa Bumi					Tanah Longsor				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pulau Gorom	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Kesui Watubela	2	0	0	2	1	7	1	0	0	0	4	1	0	0	0
Teor	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gorom Timur	4	0	0	3	2	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0
Pulau Panjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seram Timur	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tutuk Tolu	1	2	0	1	3	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Kilmury	2	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Siritaun Wida Timur	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Kian Darat	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Werinama	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Siwalalat	0	2	0	4	1	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Bula	7	7	0	3	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Bula Barat	7	7	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Teluk Waru	2	0	0	2	2	4	10	0	0	0	0	0	0	2	0
Seram Bagian Timur	**32**	**24**	**0**	**26**	**20**	**16**	**14**	**0**	**7**	**1**	**14**	**7**	**0**	**3**	**1**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

6. Urusan Sosial

a. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Keberhasilan pencapaian target indikator panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada urusan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.63. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial (Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Tabel II.64 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Berdasarkan Jumlah PMKS Yang mendapat Bantuan

Tahun	Jumlah PMKS (Org)	Mendapat Bantuan	
		Jumlah Orang	Rasio (%)
2018	74.154	10.000	13,50
2019	74.154	10.000	13,50
2020	74.154	10.000	13,50
2021	74.154	10.000	13,50
2022	74.154	10.000	13,50

Sumber Data : Dinas Sosial

2.1.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Keberhasilan target capaian indikator penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.65. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0	0	0
Tamat Sekolah Dasar	19.240	21.147	19.564	20.011	20.948
Sekolah Menengah Pertama	11.650	10.620	10.355	15.793	7.715
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	13.710	11.308	15.450	15.359	12.841
D-I/II/III, S1/S2/S3	5.143	7.913	7.820	8.349	10.673

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Sedangkan pencapaian target indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur sepajang tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.66. Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Pengangguran Terbuka	2.310	1.715	1.919	2.120	1.766
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	43.998	49.273	51.270	52.489	50.411
Jumlah	**46.308**	**50.988**	**53.189**	**54.609**	**52.177**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Tabel II.67. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Penduduk Yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja %
2018	43.998	46.308	95,01
2019	49.273	50.988	96,64
2020	51.270	53.189	96,39
2021	52.489	54.609	96,12
2022	50.411	52.177	96,62

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Seram Bagian Timur

Tabel II.68. Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tahun	Pendaftaran		Jumlah	Penerimaan		Jumlah
	L	P		L	P	
2018	28	47	75	1	30	31
2019	28	47	75	1	30	31
2020	18	4	22	0	0	0
2021	181	32	213	96	8	104
2022	93	16	109	49	4	53

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Seram Bagian Timur

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan

direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyak hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Tabel II.69. indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian		Tahun			
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel II.70. Persentase penanganan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	0	0	0	0	0

Sumber Data : Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel II.71. Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Perlindungan Anak	0	0	0	0	0

Sumber Data : Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur antara lain, yakni prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seram Bagian

Timur sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.72. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0	98,31	99,00	25,31	64,05
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0	18.516	19.788	21.857	18.911
Jumlah	**0**	**18.614,31**	**19.887,00**	**21.882,31**	**18.975,05**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

3. Urusan Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

❖ **Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan :**

I. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

II. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Pangan dan Gizi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

III. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Asean plus Three Emergency Rice Recerize Agreement* (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga).
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

IV. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

V. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tujuan dan fungsi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.73. Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018*	2019*	2020*	2021**	2022**
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)					
1. Beras	12.598,2	7.335,6	11.084	16.589	17.205
2. Jagung	39.736	18.535	2.994	467,61	453,34
3. Bawang Merah				775,57	553,90
4. Bawang Putih				554,31	443,50
5. Cabai Merah Keriting	440	390	702	186,07	88.91
6. Cabai Rawit	780	735	723	134,97	79,01
7. Daging Sapi	-	-	2.656	132,65	134,55
8. Daging Ayam	-	-	-	1.365,44	1.389,54
9. Telur	-	-	-	3.908,05	2.099,00
10. Gula Pasir	-	-	-	1.125,72	1.290,95
11. Minyak Goreng	-	-	-	724,8	274,98

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Timur
*Keterangan : * Data Produksi Tidak Terolah.*
*** Data terolah Prognosa Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok.*

b. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel II.74. Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pola Pangan Harapan (PPH)	90	85,2	72	74,33	77,48

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Timur

4. Urusan Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan HidupTerkait dengan uraian diatas, maka dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan berbagai langkah kebijakan sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan, maka indikator capaian target pengelolaan bidang lingkungan hidup yang dapat dijadikan tolok ukur, diantaranya persentase penduduk berakses air minum. Pertumbuhan persentase penduduk berakses air minum sepanjang tahun 2018-2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.75. Ketersediaan Jenis Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Air Minum	Tahun/Presentasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Air Dalam Kemasan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air PDAM	-	-	-	-	-
Air Sumur Terlindungi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air Sumur Tidak Terlindungi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mata Air Lindung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mata Air Tak Terlindung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air Sungai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bias disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan pendudukmeningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Perkembangan penyelenggaraan urusan kependudukan dan cacatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.76. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Surat	Tahun %				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kartu Keluarga	65,68	78,96	81,12	100	100
KTP-el	56,52	80,48	82,70	86,65	90,09
Akte Kelahiran 0-18 Tahun	67,25	77,07	77,64	88,04	95,30
Akte Perkawinan	1,62	11,88	13,22	79,56	82,48
Akte Kematian	96,33	84,69	84,89	87,25	100

Sumber Data : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan inisiatif dari masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa hanya bisa terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.77. Jumlah Kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Jumlah Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15	20	20	0	0
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	10	15	15	0	0
Jumlah PKK Aktif	75	105	250	0	0
Jumlah Posyandu Aktif	241	239	230	248	249
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pencapaian target indicator penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, diantaranya cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan penyelenggaraan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Seram

Bagian Timur sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.78. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB di Kabupaten Seram Bagian Timur 2018-2022

Tahun	Peserta KB							
	PUS	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntik	Pil
2018	15.448	198	40	24	396	93	4.004	1.015
2019	0	0	0	0	0	146	6.443	1.529
2020	0	38	44	6	1.147	270	8.634	1.232
2021	24.073	45	53	6	1.147	601	12.537	2.396
2022	25.320	59	75	6	1.147	853	13.037	2.600

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

8. Urusan Perhubungan

Salah satu indikator pengukuran capaian target urusan perhubungan adalah banyak Bandara, Pelabuhan laut dan Terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bias diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Moda transportasi yang saat ini sedangkan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah transportasi jenis pelayaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Saat ini pelayaran yang sedang dikelola oleh swasta adalah pelayaran untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gorom – Kesui Watubela - Teor sebanyak 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Sedangkan pelayaran yang dikelola olehpemerintah untuk rute Geser – Bula untuk sementara 1 kali pelayaran dalam seminggu. Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalanuntuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Pertumbuhan pelabuhan laut dan bandara di

Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel II.79. Nama Pelabuhan dan Kedalamannya di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Nama Pelabuhan	Bahan Konstruksi Dermaga	Ukuran
Bula	Pelabuhan Sesar	Beton	50 M
Seram Timur	Pelabuhan Geser	Beton	50 M
Tutuk Tolu	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Beton	50 M
Kesui Watubela	Pelabuhan Air Kasar	Beton	250 M
Pulau Gorom	Pelabuhan Kesui	Beton	50 M
Gorom Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kota Siri	Beton	100 M
Werinama	Pelabuhan Bemo	Beton	60 M
Siritaun Wida Timur	Pelabuhan Air Nanang	Beton	100 M

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Tabel II.80. Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan/Bandara Lapangan Terbang	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
Desa GAh, Kecamatan Tutuk Tolu/Bandara Kufar (BUAK URITI)	Kelas III Lapter Pemerintah/Goverment Airport	46	32 x 1.400 M	Hotmix

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Tabel II.81. frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Rute Penerbangan	Frekuensi Penerbangan (Per Minggu	Jenis Pesawat	Maskapai Penerbangan
Direncanakan akan melintasi rute Perbangan Bula – Ambon PP	4 x / Minggu	ATR – 42	Trigana Air

Sumber Data : Dinas Perhubungan

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki 1 (satu) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya 1 (satu) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

b. Jumlah Wartel/Warnet

Jumlah wartel/warnet, adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel (warung telekomunikasi), yaitu tempatusaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet (warung internet), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Terkait dengan hal tersebut, maka jaringan stasiun telepon seluler yang telah beroperasi telah ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Pulau Gorom. Sementara itu, untuk pelayanan kantor pos dan giro telah ada sebanyak 3 unit. Namun yang dapat beroperasi secara penuh baru 2 kantor, yaitu Kantor Pos di Kecamatan Bula dan Kantor Pos di Kecamatan Seram Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indicator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah warnet/wartel; (iii)jumlah website milik pemda; dan (iv) pameran/expo pertahun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji padatabel dibawah ini.

Tabel II.82. Jumlah Sistem Informasi dan Expo Informasi Data di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jaringan Komunikasi	1	1	1	1	1
Warnet/Wartel	1	5	5	5	5
Website	1	1	1	1	1
Pameran/Expo Per Tahun	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi, maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sementara itu, Semakin besar jumlah wartel/ warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Perkembangan jenis jenis berdasarkan jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang Tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.83. Jumlah Koperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenis Koperasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
KUD	20	18	18	20	20
KSU	94	58	58	91	82
KPN	7	4	4	6	6
KOPPAS	2	1	1	2	2
Lainnya	38	59	59	1	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

11. Urusan Penanaman Modal

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.84. Jumlah PMDN/PMA di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	0	0	38,3 Milyar	34,6 Milyar	21,1 Milyar
Jumlah Izin Yang Diterbitkan	0	0	484 Izin	547 Izin	652 Izin
Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	77,38%	80,67%	84%

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator antara lain :

a. Jumlah organisasi pemuda;
b. Jumlah organisasi olahraga;
c. Jumlah kegiatan kepemudaan;
d. Jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda; dan
e. Jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga diKabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.85. Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Pemuda	12	12	12	12	12
Jumlah Organisasi Olahraga	11	11	11	11	11
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	2	5
Jumlah Kegiatan Olahraga	1	1	1	1	7

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja/Pemuda	1	1	2	2	2
Jumlah Lapangan Olahraga	26	26	26	26	26

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

13. Urusan Statistik

Urusan statistik daerah, mempunyai tugas dan fungsi pengolahan datadan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengelohan data daninformasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik, dapat diukur melalui indikator : tersedianya buku "Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka"; dan tersedianya buku "PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur", sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.86. Ketersediaan Informasi Manual Book di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kabupaten Menurut Pengeluaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kabupaten Menurut Lapangan Usaha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kabupaten Dalam Angka Untuk Kepentingan Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Konstruksi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Statistik Kesejahteraan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur

14. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu:

a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan
b. mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data tentang perkembangan pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.87. Perkembangan Pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Nama Situs/Bangunan Bersejarah	Lokasi Situs		Pengelola
	Desa	Kecamatan	
Monument Tulabeal Goran Riun	Kataloka	P. Gorom	Pemerintah
Makam Pahlawan Mayor Abdullah	Geser	Seram Timur	Pemerintah
Masjid Tua Giro Gaja	Kataloka	P. Gorom	
Kapal Tua Bakoka	Bati Kilwouw	Seram Timur	
Masjid Tua Kilbaren	Waru	Teluk Waru	
Benteng Kosongat	Keffing	Seram Timur	
Sumur Tua	Ondor	P. Gorom	
Sumur Tua	Kataloka	P. Gorom	
Nakara	Kataloka	P. Gorom	

Sumber Data : Dinas Pariwisata

15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan

mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dapat diukur antara lain dengan pencapaian target indikator :

a. jumlah perpustakaan;
b. jumlah koleksi buku perpustakaan; dan
c. jumlah pengunjung perpustakaan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.88. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perpustakaan	197	231	246	269	304
Jumlah Koleksi Buku	12.000 Eks	13.700 Eks	16.300 Eks	18.300 Eks	21.901 Eks
Jumlah Pengunjung	735	150	790	962	962

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

16. Urusan Kearsipan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (a) pengelolaan arsip secara terpadu; dan (b) peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.89. Jumlah SDM dan Pengelola Arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengelola Arsip Secara Terpadu	20 OPD	34 OPD, 2 Kecamatan	34 OPD	34 OPD, 2 Desa, 2 Parpol dan 1 Ormas	34 OPD, 2 Desa, 2 Parpol dan 1 Ormas
Peningkatan Sumber Daya Pengelola Arsip	40 Orang	26 Orang	16 Orang	50 Orang	50 Orang

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan :

1. Urusan Perikanan

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan kabupaten bahari dengan 72% wilayahnya adalah lautan. Kabupaten Seram Bagian Timur wilayah ini berada pada lintang tropis serta berbatasan dengan Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafura. Hal ini menyebabkan Kabupaten Seram Bagian Timur kaya akan potensi sumber daya alam.

Penghasil produk perikanan terbesar di Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari Kecamatan Seram Timur dengan jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dengan rincian sebagai berikut :

a. Budidaya laut sebesar 84,4. dimana kecamatan Pulau Gorom sebesar 83,6 dan Bula Barat sebesar 0,8
b. Tambak sebesar 2,64, dimana kecamatan Bula sebesar 1,42 dan Bula Barat sebesar 1,26.
c. Kolam sebesar 13,26, dimana Kecamatan Werinama 0,53, Bula 0,66 dan Bula Barat 12,07.
d. Jaring Apung sebesar 26,23, dimana kecamatan Pulau Gorom sebesar 3,4, Teor sebesar 4,72, Pulau Panjang 4,2, Seram Timur 7,27, dan Teluk Waru sebesar 7,44.

Hasil perkembangan produksi perikanan serta jumlah nelayan pada Tahun 2018-2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel II.90. Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenisnya Tahun 2018-2022

Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pelagis Kecil	312	6.214	6.956,12	7.677,23	6.336
Pelagis Besar	32	6.837	7.894,36	9.917,95	4.528
Demersal	39	7.329	6.481.42	6.914,82	7.518
Non Ikan	5	655	965	1.347,61	1.650
Jenis Ikan Budidaya (Laut, Kolam, Tambak ,RL)	-	124,31	-	0	0

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.91. Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenis Budidaya Perikanan Tahun 2018-2022

Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Keramba Jaring Apung	24,31	24.98	25,74	26,92	28,85
Rumput Laut	73,21	75,96	83,70	86,95	107,89
Kolam Air Tenang	10,15	11,35	12,30	13,58	12,54
Tambak Sederhana	1,20	1,54	1,98	2,67	2,85

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.92. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ton)
2018	-	-	388	9.682.325.000
2019	21.035	131.552.815.000	124,31	4.354.396.000
2020	19.549	104.682.720.000	126,5	4.096.979.000
2021	19.857,60	248.885.309.000	130,22	4.103.040.000
2022	20.032	246.918.540.500	152,13	4.415.510.000

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.93. Perkembangan Jumlah Nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenis Perikanan	Jumlah Nelayan (Orang)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Perikanan Tangkap	8.829	8.939	9.256	9.449	9.969
Perikanan Budidaya	573	635	513	546	512

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.94. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenis Budidaya	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Budidaya Laut	168	370	306	306	326
Tambak	10	25	24	24	37
Kolam	85	105	107	108	115
Keramba	0	0	0	0	0
Jaring Apung	205	107	109	110	110
Sawah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel II.95. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ton)

Jenis Budidaya	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Budidaya Laut	90,283	89,9	84,4	86,95	107,88
Tambak	3,362	2,66	2,68	2,77	2,85
Kolam	8,495	12,26	13,26	13,57	12,54
Keramba	0	0	0	0	0
Jaring Apung	21,740	25,35	26,23	26,93	28,85
Sawah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Potensi sumberdaya perikanan yang kaya terdiri atas sumberdaya ikan pelagis, ikan demersal, ekhinodermata (Teripang, Bulu Babi) moluska ekonomis penting seperti lola dan batu laga, polikeit terutama laor, rumput laut dan biodata laut lain-lainnya.

Kekayaan laut pada perairan sekitar Kecamatan Seram Timur, didukung oleh adanya ekosistem pesisir yang masih tergolong baik sehingga mampu mendukung kehidupan biota laut pada perairan tersebut. Terdapat 3 ekosistem pesisir utama pada Kecamatan Seram Timur, yakni Mangrove dengan luas 3600 Ha, padang Lamun 876.51 Ha Karang.

a. Ketersediaan Unsur Hara di sekitar Perairan Pulau Keffing

Secara geografis ekosistem perairan Pulau Keffing Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur dipengaruhi oleh arus Laut Banda dibagian Barat dan SelatLaut Seram di sebelah Utara serta Laut Aru disebelah selatan. Pemanfaatan sumberdaya yang

optimal dari perairan ini sangat membutuhkan kondisi lingkungan perairan yang baik, diantaranya mengenai fungsi ekosistem di perairan tersebut. Interaksi antar komponen penyusun ekosistem akan berpengaruh terhadap keberadaan zat hara perairan.

Zat hara yang merupakan bahan makanan bagi fitoplankton umumnya diperoleh dari daratan sekitarnya dan berasal dari berbagai limbah rumah tangga dan industri. Fitoplankton merupakan komponen utama rantai makanan bagi biota laut sehingga keberadaan zat hara dan fitoplankton merupakan salah satu indikator kesuburan perairan.

Beberapa lokasi disepanjang perairan Pulau Geser merupakan tempat bertelur (Spowning), mencari makan (Grazing) dan lokasi tangkapan perikanan. Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia di daerah itu, berbagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi kondisi perairan ini, perubahan musim dan berbagai limbah masyarakat. Fungsi perairan sering berubah akibat perubahan struktur dan kuantitas plankton yang meliputi fungsi dan tingkat kemampuan perairan sebagai pendukung kehidupan organism.

b. Plankton di Pulau Keffing

Fitoplankton yang lebih dikenal sebagai produsen dan zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama mempunyai peranan penting dalam mendukung biota laut pada tingkat tropic yang lebih tinggi. Bagi ikan–ikan herbivore (pemakan plankton), keberadaan plankton disuatu perairan merupakan potensialitas pakan alami.

c. Mangrove

Pulau Keffing 10,68 hektare (vegetasi mangrove 3,78 ha dan vegetasi campuran 6,92 ha), kemudian di Pulau Kwamor 3975,5 ha dan di Pulau Geser 11,8 ha (vegetasi mangrove 9,2 ha dan vegetasi campuran 2,6 ha). Masyarakat Seram Timur mengenal mangrove

dengan nama "Akat". Menurut masyarakat, akat biasanya disebutkan untuk mangrove jenis Rhizophora. Dari hasil Penelitian LIPPI dan koleksi bebas pada ke tiga pulau tersebut, ditemukan 26 mangrove yang terdiri dari 14 mangrove sejati dan 12 mangrove asosiasi. Di Pulau Keffing ditemukan 6 jenis mangrove, di Pulau Kwamor 15 jenis, dan Pulau Geser 20 jenis. Untuk luas dan kondisi mangrove yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.96. Luas dan Kondisi Mangrove di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)

Kondisi Hutan Mangrove (ha)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas	9.834	9.849	9.849	9.849	9.849
Baik	9.081	9.039	9.039	9.039	9.039
Rusak	753	810	810	810	810
Reboisasi	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

d. Ekosistem Lamun

Lamun (seagrass) atau dalam bahasa Pulau Keffing disebut "keor"merupakan tumbuhan laut yang sangat produktif, dan mempunyai peran yang penting bagi organisme laut di ekosistem wilayah pesisir. Peran dan fungsi lamun tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1. Pada saat masih hidup fungsinya sebagai tempat memijah, merawat, tempat mencari makan dan tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan/udang. Sebagai makanan bagi beberapa jenis hewan laut seperti dugong (ikan duyung) penyu serta beberapa jenis ikan seperti ikan Siganus sp (samandar). Menjadi tempat melekat epifit yang juga merupakan makanan bagi beberapa jenis ikan. Akarnya mengikat sedimen sehingga berfungsi sebagaipenahan erosi atau stabilisator sedimen. 2. Apabila yang sudah mati maka ditritusnya merupakan nutrient bagi organisme benthik yang hidup disekitarnya. Lamun di Pulau Keffing Kecamatan Geser Kabupaten Seram Bagian Timur ini, kondisi

lamun berada pada kategori tutupan padat dengan nilai rata- rata 67.27%.

Padang lamun di kedua area tersebut dibentuk oleh lima jenis lamun yaitu *Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis* dan *Halodule pinifolia*. Jenis lamun yang dominan adalah *Thalassia hemprichii* dengan nilai rata-rata tutupan 22.59%. Untuk luas dan kondisi padang lamun yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.97. Luas dan Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)

Kondisi Padang Lamun (ha)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas	1.841	2.882	2.882	2.882	2.882
Baik	2.882	2.532	2.531	2.531	2.531
Rusak	1.041	350	351	351	351
Reboisasi	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

e. Terumbu Karang

Terumbu karang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia, karena ±30 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hayati laut. Di samping itu juga terumbu karang mempunyai arti yang penting sebagai asset nasional untuk menarik wisatawan karena memiliki nilai estetikanya serta mempunyai nilai ilmiah bagi dunia pendidikan dan penelitian.

Persentase tutupan komponen karang hidup tertinggi ditemukan pada St.1 (Utara P. Keffing) sebesar 83,62 %, dan yang terendah adalah pada St.4 (Timur Pulau Keffing) dengan tutupan 10,76 %. Sedangkan untuk St.2 (Keffing Utara) diperoleh persentase tutupan karang hidup adalah sebesar 79.12 %, dan pada St.3, tidak dilakukan transek, hanya dilakukan pengamatan visual dan pengambilan gambar dan video. Kondisi karang batu berdasarkan

hasil analisa dari data transek yang dilakukan di kedalaman 5 m, diperoleh hasil persen penutupan untuk komponen karang hidup adalah 83,62%, yang terdiri dari karang hidup kelompok *Acropora* 9,02 % dan kelompok Non-*Acropora* 4,60 %.

Kelompok karang hidup Acropora yang memberikan kontribusi nilai tertinggi adalah dari bentuk pertumbuhan ACB (Acropora Bercabang/bercabang) dengan nila i76,04%, yaitu dari jenis karang hidup *Acropora nobilis, Acropora microphthalma, Acropora parilis* dan *Acroporagomezi*, keempat jenis karang hidup inilah yang tumbuh mendominasi perairan Stasiun 1.

Selain karang hidup yang juga dijumpai komponen dasar perairan yang menonjol yaitu dari komponen DCA (Karang mati yang ditumbuhi algae) dengan nilai tutupan 12,84 %, halini menunjukan bahwa walau kondisi karang hidup dalam kondisi baik, namun pada wilayah ini ada terjadi kerusakan karang.Dari persentase penutupan komponen karang hidup yang diperoleh pada stasiun ini (83,62%), maka berdasarkan kriteria penilain karang hidup suatu wilayah yang dikemukakan oleh Wilkinson *et al*, 1994, dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu lokasi ini berada pada ketegori "Sangat Baik".

Berdasarkan persentase penutupan komponen karang hidup yang diperoleh pada stasiun ini (79,12 %), maka dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu stasiun 2 (dua) berada pada ketegori "**Sangat Baik**". Pada stasiun 3 (tiga) tidak dilakukan transek, hanya dilakukan pengamatan secara visual serta pemotretan dan pembuatan video. Pengambilan data pada stasiun ini tepat pada posisi 130.86174° BT dan - 3.86487° LS.,yang letaknya ± 400 dari pesisir pantai. Stasiun ini memiliki daerah lereng terumbu yang terjal dengan keimiringan ± 90°. Pada lereng terumbu yang terjal dijumpai goa-goa dengan ukuran kecil dan besar. Lereng terumbu dan goa-goa tersebut ditumbuhi bermacam biota yang sangat menarik

seperti *Gorgonian, Sponge, Crynoid, Tunicate* dan karang hidup dari jenis *Tubastrea foulknari* dengan berbagai macam bentuk dan warna, bergelantungan pada dinding-dinding goa dan lereng terumbu sehingga memberikan suatu kesan artistic serta sangat potensial untuk dijadikan spot selam.Lebih lanjut pada stasiun 4 (empat) tepat pada posisi 130.87126° BT dan -3.88779° LS.

Wilayah ini memiliki profil pesisir pantai dengan hamparan pasir putih dan pada bagian daratan ditumbuhi vegetasi pohon kelapa dan pepohonan pantai. Rataan terumbu (reef flat) dari pesisir pantai ke arah laut sangat landai dan sangat luas yaitu ± 800 m. Komponen abiotik penyusun substrat dasar yangmendominasi areal tempat tumbuhnya pasir dan karang mati. Dari hasil pengamatan secara visual terlihat jelas bahwa pada daerah rataan terumbu pertumbuhan karang batu sangat jarang, dan didominsi oleh SC (soft coral/karang lunak). Kondisi karang batu berdasarkan hasil analisa dari data transek yang dilakukan di kedalaman 5 m, diperoleh persen penutupan untuk komponen karang hidup ahanya 13,60 % saja, yang terdiri dari karang hidup kelompok *Acropora* 4,72 % dan kelompok Non-*Acropora* 8,88 %. Hasil ini menunjukan jelas bahwa karang batu dari kelompok NonAcropora yang mendominasi pertumbuhan karang hidup pada stasiun ini.

Kelompok karang hidup Non-Acropora yang memberikan kontribusi nilai tertinggi adalah dari bentuk pertumbuhan CM (Coral massive/karang otak) dengan nilai 4,08 %, yaitu dari jenis karang hidup *Porites lutea*, jenis karang hidup inilah yang tumbuh mendominasi perairan Stasiun 3 (tiga) . Pada stasiun ini yang memiliki nilai persentase tutupan dari komponen SC (soft coral/karang lunak) dengan tutupan 46,52 %, ini berarti secara keseluruhan komponen karang lunak lah yang tumbuh mendominasi perairan stasiun 3.

Dari persentase penutupan komponen karang hidupyang diperoleh pada stasiun ini (13,60 %), maka berdasarkan kriteria

penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu lokasi ini berada pada ketegori "Sangat rusak". Berdasarkan hasil penelitian dengan metode LIT dan koleksi jenis secara bebas disekitar areal penelitian pada 3 (tiga) stasiun transek, ditemukan jumlah total arang hidup adalah sebanyak 102 jenis (species),yang termasuk dalam 40 marga (genera) dari 15 suku (family) yang menempati wilayah terumbu karang tepi Pulau Keffing. Jumlah distribusi karang hidup untuk masing-masing stasiun adalah sebagai berikut, Stasiun 1 dengan 15 suku, 36 marga, dan 83 jenis, dan untuk Stasiun 2 dengan 15 suku, 38 marga dan 81 jenis, dan Stasiun 3 dengan 9 suku, 19 marga, dan 39 jenis. Untuk luas dan kondisi Terumbu Karang yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.98. Luas dan Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)

Kondisi Terumbu Karang (ha)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas	3.722,775	3.722,775	3.722,775	3.722,775	3.722,775
Baik	3.168,65	3.124,24	3.124,24	3.124,24	3.124,24
Rusak	554.125	598,505	598,505	598,505	598,505
Reboisasi	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

2. Urusan Pertanian

Jumlah luas lahan potensial pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur 131.364 ha, terdiri dari (i) lahan tanaman pangan holtikultura seluas 27.096 ha atau 20,62%. Namun hingga saat ini yang baru dapat dikerlola seluas9.500 ha atau 35,06%, dengan jenis komoditas tanaman berupa : padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur mayur dan buah-buahan; (ii) lahan untuk perkebunan seluas 99.212 ha 75,51%. Namun hingga saat ini yang baru dikelola seluas 34,013 ha, dengan jenis tanaman berupa : kelapa, cengkeh, coklat, kopi dan jambu mete. Namun demikian, pada tahun 2021, hampir semua tanaman memiliki luas tanam dan produksi yang

mulai meningkat akibat pandemic Covid-19 yang mempengaruhi pasar.

Sedangkan untuk usaha peternakan, menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah untuk jenis sapi potong sebanyak 8.653 ekor sedangkan kambing sebanyak 13.436 ekor dan kuda sebanyak 10 ekor. Sementara itu, untuk populasi unggas jenis ayam kampong sebanyak 31.154 ekor dan itik/itik manila sebanyak 3.146 ekor.

Untuk lebih jelasnya data mengenai luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta data mengenai peternakan di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel II.99. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2022

Jenis Tanaman Pangan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Padi Sawah	4.439	4.016	20.080	2.407	2.923	11.692	2.933	3.383	13.474	3.042	2.565	10.260	2.890	2.310	9.240
Padi Kering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	224	224	982	749,5	1.042
Jagung	13.017	9.934	39.736	2.438	3.717	18.585	2.102	1.297	5.188	1.245	998	2.994	305	421	1.263
Ketela Pohon	329	280	3.640	126	151	6.795	108	55	2.475	110	34	1.530	106	103	4.635
Ketela Rambat	250	231	254,1	152	166	4.980	138	112	3.360	150	101	3.030	143	104	3.120
Kacang Tanah	198	178	249,2	153	172	258	133	126	189	138	116	174	135	121	181,5
Kacang Hijau	17	15	70,5	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kacang Kedelai	19	6	9,6	2	2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talas	284	231	2.541	45	73	949	38	29	377	40	21	273	34	28	364

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Tabel II.100. Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bayam	74	52	36	19	14	148	1.040	960	510	265
Cabai Besar	88	79	73	68	44	440	3.950	7.020	7.340	3.230
Cabai Rawit	163	147	88	72	51	815	7.350	7.260	6.580	2.450
Mentimum	33	30	28	16	16	264	2.400	2.190	1.100	1.110
Sawi	113	65	25	16	12	339	1.950	420	510	270
Terong	88	68	36	31	27	528	5.440	4.320	3.670	2.730
Tomat	107	81	58	76	47	428	4.050	8.340	9.440	4.800

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Tabel II.101. Luas Areal Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 - 2022

Jenis Tanaman	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022			
	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	TBM	TM	TM/TR	Produksi (ton)	TBM	TM	TM/TR	Produksi (ton)
Kelapa Sawit	853,00	86,06	853,00	93,00	0	0	26	485	332	455.672	11	349	492	0
Kelapa	18.372,6	16.440,81	18.373,39	16.440,81	0	0	3.120	13.238	854	15.480	2.972	13.081	988	15.033
Cengkeh	9.860,50	4.329,38	9.982,50	5.296,90	0	0	1.769	6.949	1.239	4.889	1.722	6.919	1.241	2.023
Kopi	379,35	36,28	379,35	55,09	0	0	91	211	96	43.707	106	216	93	48
Kakao	1.007,52	361,80	1.005,70	382,35	0	0	178	1.138	105	342.334	179	1.140	112	358
Pala	9.113,00	1.242,75	9.488,43	1.273,79	0	0	4.719	4.058	470	1.505.890	4.691	4.059	458	1.271
Sagu	0	0	0	0	0	0	13.103	21.198	1.145	123.258.617	13.103	21.212	1.043	122.628
Jambu Mete	79,02	18,40			0	0	9	37	26	5.866	10	43	27	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Tabel II.102. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ekor)

Tahun	Jenis Populasi Ternak				
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
2018	0	8.316	19	5	12.744
2019	0	0	0	0	0
2020	0	7.839	0	10	12.847
2021	0	8.653	0	0	13.436
2022	0	8.433	9	4	12.769

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Tabel II.103. Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ekor)

Tahun	Jenis Populasi Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	itikItik Manila
2018	29.369	0	3.236
2019	0	0	0
2020	29.389	380	3.236
2021	31.154	0	3.146
2022	29.669	1.014	3.236

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

3. Urusan Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multi fungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Hal initelah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan. Berdasarkan data statistik tahun 2021, 45,19% wilayah hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur difungsikan menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sebesar 20,6% sebagai Hutan Produksi yang di Konversi (HPK). Sementara itu, 18,67% sebagai Hutan Lindung (HL) serta sisanya adalah area danau, HP, KPA/KSA dan APL. Selanjutnya keberhasilan pencapaian target indikator urusan kehutananyang meliputi (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Untuk lebih jelasnya data mengenai kehutanan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel II.104. Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (ha)

Tahun	Fungsi Penggunaan						
	APL	Danau	HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	64.479	15	107.880	27.163	115.869	261.068	1.216
2021	64.471,38	15,14	107.879,81	27.163,03	115.869,23	261.068,79	1.126,46
2022	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

4. Urusan Energi Sumberdaya Mineral

Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi : batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, besi, magnesium, mangan dan zirconium. Sedangkan jenis pertambangan migas terdiri dari : minyak bumi dan nafta.

Untuk Tahun 2022, daya terpasang adalah sebesar 11.259.000 KW lebih lebih besar dibanding tahun 2021 sebesar 10.308.000 KW. data mengenai daya terpasang, produksi, distribusi dan Pelanggan Listrik pada PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.105. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2018	9.834.000	21.012.378	17.880.772	272.996	13,87
2019	9.839.400	20.444.461	18.491.893	319.766	9,76
2020	9.380.000	22.554.361	20.912.001	0	7,08
2021	10.308.000	20.640.000	15.266.924	0	13,58
2022	11.259.000	24.684.560	21.600.000	960.359	8,88

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel II.106. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan/Desa pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Werinama	860	N.A	931	1.033	1.033
Geser	707	857	885	898	906
Ondor	3.584	3.698	3.844	4.208	4.324
Kesui	785	915	1.074	1.115	1.128
Kian Darat	2.519	2.961	2.956	3.445	3.706
Amarsekaru	869	1.131	1.135	1.181	1.207
Bula	8.632	8.860	10.049	10.378	10.858
Pulau Panjang	147	147	147	147	442
Teor	40	40	40	40	404
Keffing-Kellu	0	0	0	224	228
Effa	0	0	0	0	371
Guli-Guli	0	0	0	0	194
Kwamor	0	0	0	0	331
Namalomin	0	0	0	0	444
Seram Bagian Timur	**18.179**	**N.A**	**20.914**	**22.669**	**25.212**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

5. Urusan Perdagangan

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) Jumlah Perusahaan; dan (ii) Perkembangan Penerbitan SIUP, (iii). Perkembangan Penerbitan TDP , (iv) Jumlah Sarana Perdagangan , (v) Jumlah Pedagang Menurut Skala , (vi) Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada urusan perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.107. Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan	1.856	1.926	1.926	1.926	0
Perkembangan Penerbitan SIUP	130	212	0	0	0
Perkembangan Penerbitan TDP	0	0	0	0	0
Jumlah Sarana Perdagangan	1.306	1.388	1.388	1.388	0
Jumlah Pedagang Menurut Skala	116	159	43	210	0

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	203,13	214,49	213,28	232,31	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

6. Urusan Transmigrasi

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi, Kab. Seram Bagian Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi penempatan transmigran di Indonesia. Lokasi pengembangan permukiman transmigran tersebut semua nya terletak di Kecamatan Bula, namun terbagi menjadi menjadi 6 titik kawasan yang disebut dengan istilah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Adapun uraian rincian gambaran umum tiap lokasi permukiman transmigrasi berada pada lokasi sebagai berikut :

1. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) R
2. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) T
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) U
4. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) X
5. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Y
6. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Z

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Dalam Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJP, llll/.mD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusunan RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Data tentang ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan

Keputusan Bupati dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel II.108. Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Sumber Data : Bappeda Litbang

2. Urusan Keuangan

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Dalam upaya pencapaian sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan baik internal dan eksternal. Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah, Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan berbasis Teknologi Informasi Pembinaan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait

peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan unsur yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pendanaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah. Pengelolaan keuangan diarahkan pada pengendalian proporsi belanja pegawai, dengan belanja untuk pembangunan (baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal). Tabel II.106. menunjukkan proprosi belanja pegawai di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel II.109. Proporsi Belanja Pegawai APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	271.789.729.801	293.026.379.953	258.750.490.737	266.859134.689	271.358.979.498
Total Belanja	1.083.857.966.523	1.111.955.066.273	686.293.682.100,10	876.408.331.108,53	920.494.393.305,65
Persentase Belanja Pegawai	25,08	26,35	37,70	30,45	29,48

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

3. Urusan Pengawasan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar, yang masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa maupun langsung kepada unit pelayanan. Keluhan ini bisa menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang

informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten, sehingga kurang menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktik pungutan tidak resmi. Tabel 2.95 merincikan kinerja pengawasan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel II.110. Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	**Cakupan Tindak Lanjut Temuan BPK**			
	Temuan	-	-	-
	Jumlah Temuan	31	25	22
	Nilai Temuan	Rp.5.136.760.110,34	Rp.6.260.081.556,60	Rp.7.208.953.764,12
	Rekomendasi			
	Jumlah Rekomendasi	131	89	60
	Nilai Rekomendasi	Rp.4.896.878.510,34	Rp.6.260.081.556,60	Rp.7.117.717.967,52
	Status Penyelesaian Tindaklanjut			
	Jumlah Telah selesai ditindaklanjuti	80	54	24
	Nilai telah selesai ditindaklanjuti	Rp.1.071.184.946,27	Rp.1.134.112.703,00	Rp.297.536.000,00
	Jumlah Dalam Prosen Tindaklanjut	50	34	36
	Nilai Dalam Proses Tindaklanjut	Rp.3.825.693.564,07	Rp.5.125.968.853,60	Rp.6.820.181.967,52
	Jumlah Belum ditindaklanjuti	1	1	-
	Nilai Belum ditindaklanjuti	0	0	0
	Jumlah Tidak dapat ditindaklanjuti	-	-	-
	Nilai Tidak dapat ditindaklanjuti	0	0	0
2	**Temuan Inspektorat**			
	Temuan			
	Temuan yang sudah ditindaklanjuti			
	Temuan yang belum ditindaklanjuti			
3	**Pelanggaran Disiplin PNS**			
	Ringan			
	Sedang			
	Berat			
4	**Pelanggaran Pidana**			
	Kriminal			
	Penyalahgunaan jabatan/wewenang			
	Korupsi			
	Narkoba			

Sumber Data : Inspektorat Kab. Seram Bagian

4. Urusan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, disiplin atau taat pada ketentuan yang berlaku, serta berdedikasi tinggi, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Seram Bagian Timur mampu melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan tahun 2022 sebanyak 3.438, yang terdiri dari 1.481 (43%) pegawai laki-laki dan 1.957 (57%) perempuan. Berikut ini tabel-tabel mengenai jumlah ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022.

Tabel II.111. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sampai dengan SD	4	2	1	1	1
SLTP/Sederajat	30	22	28	24	27
SMA/Sederajat	933	938	911	887	848
Diploma I, II	803	816	762	760	714
Diploma III	465	415	435	429	477
Diploma IV, Sarjana	1.107	1.367	1.301	1.289	1.290
Magister/Doktor/Ph.D	39				81
Jumlah	**3.381**	**3.560**	**3.438**	**3.390**	**3.438**

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tabel II.112. Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	
Fungsional Tertentu	0	0	0	1.807	0
Fungsional Umum	0	0	0	1.125	0
Struktural	0	0	0	458	0
Non Esselon	3.016	3.189	2.951	2.932	2.997
Esselon IV	214	214	319	303	181
Esselon III	139	142	150	143	112
Esselon II	12	15	18	12	138
Esselon I	-	-	0	-	10
Jumlah	**3.381**	**3.560**	**3.438**	**3.390**	**3.438**

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tabel II.113. Jumlah ASN Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
I/a (Juru Muda)	0	0	0	0	0
I/b (Juru Muda Tk.I)	4	3	1	0	0
I/c (Juru)	15	18	12	6	6
I/d (Juru Tk.I)	10	28	10	13	13
Golongan I	**29**	**49**	**23**	**19**	**19**
II/a (Pengatur Muda)	316	160	104	42	44
II/b (Pengatur Tk.I)	260	401	354	285	203
II/c (Pengatur)	610	638	575	267	334
II/d (Pengatur Tk.I)	393	410	396	408	436
Golongan II	**1.579**	**1.609**	**1.429**	**1.002**	**1.017**
III/a (Penata Muda)	495	616	665	705	658
III/b (Penata Muda TK. I)	350	340	408	524	554
III/c (Penata)	441	438	427	327	336
III/d (Penata Muda TK. I)	309	344	337	564	572
Golongan III	**1.595**	**1.738**	**1.837**	**2.120**	**2.120**
IV/a (Pembina)	125	114	107	186	209
IV/b (Pembina TK.I)	39	38	31	47	60
IV/c (Pembina Utama Muda)	13	11	10	16	13
IV/c (Pembina Utama Madya)	1	1	1	0	0
IV/e (Pembina Utama)	0	0	0	0	0
Golongan IV	**178**	**164**	**149**	**249**	**282**
Jumlah	**3.381**	**3.560**	**3.438**	**3.390**	**3.438**

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur dengan indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diKabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2021, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.114. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	-	-
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Kesbangpol

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomidaerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas untuk menarik pelaku ekonomi baik di Kabupaten Seram Bagian Timur maupun di luar untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing daerah, yaitu iklim yang kondusif, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Di samping itu, untuk meningkatkan daya saing, beberapa indicator yang perlu diperhatikan antara lain kondisi makro ekonomi, dimana indicator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor serta tersedianya fasilitas dan kualitas infrastruktur yang mencukupi.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran. Distribusi pengeluaran daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel.

Tabel II.115. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
Konsumsi Rumah Tangga	1.612,12	56,56	1.714,51	59,03	1.752,02	60,57	1.825,24	57,97	2.024,91	55,66
Konsumsi LNPRT	40,58	1,42	44,78	1,54	47,95	1,65	51,36	1,62	57,61	1,58
Konsumsi Pemerintah	1.138,94	39,96	1.486,98	51,20	1.266,19	43,45	1.385,46	43,60	1.362,72	37,46
PMTB	1.035,50	36,33	1.122,51	38,65	1.140,32	39,13	1,200,80	37,79	1.318,53	36,24
Perubahan Inventori	17,07	0,60	18,33	0,63	19,31	0,66	19,13	0,60	19,88	0,55
Ekspor	1.014,05	35,58	403,03	13,88	199,83	6,86	242,23	7,62	366,29	10,07
Impor	2.008,26	70,45	1.885,75	64,93	1.524,53	53,32	1.563,51	49,20	1.511,80	41,55

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerahdalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluarankonsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel

Tabel II.116. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.612,12	1.714,51	1.765,02	1.842,24	2.024,91
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	992,97	1.031	1.044,40	1.050,71	1.097,68
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	56,56	59,03	60,57	57,97	55,66
Rata-rata konsumsi per Kapita per tahun (Juta Rp)					
a. ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	14,24	14,95	12,87	13,13	14,12
b. ADHK 2010 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)	8,77	8,99	7,62	7,49	7,65
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,04	3,82	1,31	0,60	4,47
b. Perkapita	2,57	2,47	(15,28)	(1,65)	2,16
Jumlah Penduduk (ribu orang)	113,18	114,68	137,13	140,27	143,44

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022

Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian karena selain berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah juga merupakan konsumen akhir yang perilaku permintaannya akan mempengaruhi struktur penyediaan domestik. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara simultan. Cakupan pengeluaran konsumsi pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya dari pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi pengeluaran pemerintah pusat dan sebagian pengeluaran

pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel II.117. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.138,94	1.486,98	1.266,19	1.385,46	1.362,72
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	757,94	927,53	767,89	812,85	794,85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	39,96	51,20	43,45	43,60	37,46
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	10,06	12,97	9,23	9,88	9,50
b. ADHK 2010	6,70	8,09	5,60	5,79	5,54
Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	336,87	417,69	368,29	408,69	396,37
b. ADHK 2010	224,18	260,54	241,48	249,22	231,20
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Pemerintah	0,29	22,38	(17,21)	5,86	(2,22)
b. Konsumsi Perkapita	(1,13)	20,78	(30,77)	3,49	)4,37)
Jumlah Pegawai Pemerintah	3.381	3.560	3.438	3.390	3.438
Jumlah Penduduk (ribu orang)	113,18	114,68	137,13	140,27	143,44

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022

2.1.4.1.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat.

Tabel II.118. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita				Total	
	Makanan	Persen	Non Makanan	Persen		
2018	432.457	57,72	316.830	42,28	749.287	100
2019	461.745	59,71	311.557	40,29	773.303	100
2020	545.659	57,86	397.432	42,14	943.091	100
2021	446.056	53,52	387.440	46,48	833.496	100
2022	513.247	54,60	410.240	45,40	923.48	100

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang dayasaing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Keberhasilan terhadap penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Jalan

Ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari ruas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

Tabel II.119. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Negara	90,00	90,00	90,00	90,00	206,43
Provinsi	153,40	153,40	153,40	153,40	153,40
Kabupaten/Kota	404,14	404,14	404,14	404,14	286,14
Jumlah	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**647,54**	**645,97**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

2. *Pelabuhan*

Terdapat beberapa jenis pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Timur seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel II.120. Nama Pelabuhan dan Kedalamannyadi Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Nama Pelabuhan	Bahan Konstruksi Dermaga	Ukuran
Bula	Pelabuhan Sesar	Beton	50 M
Seram Timur	Pelabuhan Geser	Beton	100x8
	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Beton	50 M
Tutuk Tolu	Pelabuhan Air Kasar	Beton	250 M
Kesui Watubela	Pelabuhan Kesui	Beton	46x8
	Pelabuhan Penyeberangan Kurwar	Beton	100x100
Pulau Gorom	Pelabuhan Namalua	Beton	73x8
Gorom Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kota Siri	Beton	60 M
Werinama	Pelabuhan Bemo	Beton	100 M
Siritaun Wida Timur	Pelabuhan Air Nanang	Beton	
Teor	Pelabuhan Teor	Beton	

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

3. *Bandara*

Tabel II.121. Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan/Bandara Lapangan Terbang	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu/Bandara Kufar (BUAK URITI)	Kelas III Lapter Pemerintah/Goverment Airport	46	32 x 1.400 M	Hotmix

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Tabel II.122. frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Rute Penerbangan	Frekuensi Penerbangan (Per Minggu	Jenis Pesawat	Maskapai Penerbangan
Direncanakan akan melintasi rute Perbangan Bula – Ambon PP	4 x / Minggu	ATR – 42	Trigana Air

Sumber Data : Dinas Perhubungan

4. *Listrik*

Tabel II.123. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi ListrikPT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2018	9.834.000	21.012.378	17.880.772	272.996	13,87
2019	9.839.400	20.444.461	18.491.893	319.766	9,76
2020	9.380.000	22.554.361	20.912.001	-	7,08
2021	10.308.000	20.640.000	15.266.924	-	13,58
2022	11.259.000	24.684.560	21.600.000	960.359	8,88

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel II.124. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Werinama	860	N.A	931	1.033	-
Geser	907	857	885	898	-
Ondor	3.584	3.698	3.844	4.208	-
Kesui	785	915	1.074	1.115	-
Kian Darat	2.519	2.961	2.956	3.445	-
Amarsekaru	869	1.131	1.135	1.181	-
Bula	8.632	8.860	10.049	10.378	-
Pulau Panjang	147	147	147	147	-
Teor	40	40	40	40	-
Keffing-Kellu	-	-	-	224	228
Effa	-	-	-	-	371
Guli-Guli	-	-	-	-	194
Kwamor	-	-	-	-	331
namalomin	-	-	-	-	444
Seram Bagian Timur	**18.179**	**N.A**	**20.914**	**22.669**	**25.212**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

5. Fasilitas Bank dan Non Bank

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator fasilitas bank dan non bank, antara lain (i) jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya; dan (ii) jenis dan jumlah perusahaan asuransi. Pencapaian target indikator jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.125. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Bank			
	Bank Pemerintah	Bank Daerah	Bank Swasta	Bank Syariah
2018	1	0	3	2
2019	1	0	3	2
2020	1	0	3	2
2021	1	0	3	2
2022	1	0	4	1

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

6. Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan

Ketersediaan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orangdan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/penginapan. Dalam konteks uraian jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan, maka hotel/penginapan dapat dikelompokan pada 2 kelas, yaitu :

Tabel II.126. Nama Akomodasi, Alamat, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022

Nama Akomodasi	Desa	Kamar	Tempat Tidur
Penginapan Restu	Bula	8	12
Penginapan Damai	Bula	12	14
Penginapan Arema	Bula	29	33
Hotel Mutiara	Bula	30	47
Hotel Surya	Bula	37	65
Penginapan SS	Bula	18	27
Penginapan Rifa I	Bula	6	8
Penginapan Rifa II	Bula	7	8
Hotel Akham	Bula	14	21
Penginapan Delta	Bula	12	18
Penginapan Aurifan	Bula	18	18
Penginapan Rizki	Bula	6	8
Penginapan Aries	Bula	8	12
Penginapan Jati	Bula	8	8

Nama Akomodasi	Desa	Kamar	Tempat Tidur
Penginapan An-Nisa	Bula	4	4
Penginapan Solo Terapung	Geser	12	18
Penginapan Cahaya Kasih	Geser	10	12
Penginapan Nusantara	Geser	8	10
Penginapan Dua Saudara	Geser	6	8
Penginapan Putri Sembilan	Werinama	4	4
Pondok Wisata Alhidayah	Werinama	3	3
Penginapan Damai	Pulau Gorom	10	10
Penginapan Penti	Kesui	8	8

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel II.127. Nama Akomodasi Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Nama Akomodasi	Klasifikasi			
	Penginapan	Non Bintang	Bintang I	Bintang II
Penginapan Restu	V	-	-	-
Penginapan Damai	V	-	-	-
Penginapan Arema	V	-	-	-
Hotel Mutiara	V	-	-	-
Hotel Surya	V	-	-	-
Penginapan SS	V	-	-	-
Penginapan Rifa I	V	-	-	-
Penginapan Rifa II	V	-	-	-
Hotel Akham	V	-	-	-
Penginapan Delta	V	-	-	-
Penginapan Aurifan	V	-	-	-
Penginapan Rizki	V	-	-	-
Penginapan Aries	V	-	-	-
Penginapan Jati	V	-	-	-
Penginapan An-Nisa	V	-	-	-
Penginapan Solo Terapung	V	-	-	-
Penginapan Cahaya Kasih	V	-	-	-
Penginapan Nusantara	V	-	-	-
Penginapan Dua Saudara	V	-	-	-
Penginapan Putri Sembilan	V	-	-	-
Pondok Wisata Alhidayah	V	-	-	-
Penginapan Damai	V	-	-	-
Penginapan Penti	V	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

7. Rumah Tangga Pengguna Air

Salah satu indikator penyelenggaraan lingkungan hidup adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (clean water), yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water), adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Berdasarkan sumbernya, air bersih dapat dibedakan, yaitu Air Hujan, Air Sungai dan Danau, Mata Air, Air Sumur Dangkal, Air Sumur. Dalam Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyediakan air bersih untuk rumah tangga selama kurun waktu tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.128. Data Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Jenis Air Minum	Tahun/Presentasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ledeng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumur Terlindungi	35,20	29,29	0,00	0,00	0,00
Sumur Tidak Terlindungi	17,98	11,36	0,00	0,00	0,00
Mata Air Terlindung	23,73	31,87	0,00	0,00	0,00
Mata Air Tidak Terlindung	5,93	1,55	0,00	0,00	0,00
Sungai	1,89	8,85	0,00	0,00	0,00
Air Kemasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

Tabel II.129. Ketersediaan Jenis Air Bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Air Minum	Tahun/Presentasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Air Dalam Kemasan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air PDAM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Air Sumur Terlindungi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air Sumur Tidak Terlindungi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mata Air Lindung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mata Air Tak Terlindung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air Sungai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjad iberapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delikaduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1(satu) tahun.

Gambaran terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.130. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembunuhan	0	0	2	0	1
Penganiayaan	20	30	27	20	43
Pemerkosaan	2	0	0	0	1
Pencurian	7	16	0	5	6
Penggelapan	0	1	0	2	1
Perzinaan	1	4	2	2	2
Melarikan Anak Gadis	32	0	0	0	0
Pembakaran	0	1	0	0	0
Pengrusakan	1	2	3	2	1
Perjudian	1	-	-	0	0
Penipuan	4	4	3	0	3
Pemerasan	0	0	0	0	0
Percobaan Pelaksanaan Kejahatan	0	0	2	0	0
Pengeroyokan	1	12	15	10	39

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

Tabel II.131. Jumlah Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Pidana		Perdata		Jumlah	
	Diterima	Diselesaikan	Diterima	Diselesaikan	Diterima	Diselesaikan
2018	69	45	0	0	69	45
2019	102	80	0	0	102	80
2020	112	84	0	0	112	84
2021	67	65	0	0	67	65
2022	147	94	0	0	148	94

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

2. Regulasi Penanaman Modal

Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Bupati Nomor 258 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Keputusan Bupati Nomor 259 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dandaerah. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber

Daya Manusia diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1,S2 dan S3.

Tabel II.132. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
SD	20.608	340	20.948	98,38	11.757	32.705	64,05
SMP	7.599	116	7.715	98,50	8.296	16.011	48,19
SMA	12.119	722	12.841	94,38	5.597	18.438	69,64
SMK	2.129	59	2.188	97,30	697	2.885	75,84
Diploma I/II/III	1.412	144	1.556	90,75	226	1.782	87,32
Perguruan Tinggi	6.544	385	6.929	94,44	1.058	7.987	86,75
Jumlah	**50.411**	**1.766**	**52.177**	**96,62**	**27.631**	**79.808**	**65,38**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2023

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial

1. Pendidikan

Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang

dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; pencapaian SPM Pendidikan; dan pelaporan dan evaluasi. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan.

Tabel II.133. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Anak Usia 6 Tahun Belajar di Sekolah PAUD						
Persentase partisipasi warga negara usia 6 thn Pada Sekolah PAUD	62,65	63,92	68,01	71,04	73,47	74,06
2. Anak Usia 6-12 Tahun Belajar di Sekolah Dasar						
Persentase Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 12 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	60,65	65,92	69,35	72,04	73,47	74,42
3. Anak usia 12 - 15 tahun belajar di sekolah menengah Pertama						
Persentase partisipasi warga negara usia 12 - 15 tahun dalam pendidikan menengah Pertama	63,65	69,92	70,01	71,04	72,47	73,25

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d. Pelayanan kesehatan balita;

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel II.134. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

indikator		Tahun			
	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56	64	42	97	56
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	49	56	72	76	39
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (usia 0 - 28 hr)	47	51	62	96	49
Pelayanan Kesehatan Balita	79	85	100	99	43
Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	53	59	59	4	93
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	97	100	87	89	92
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (usia 15-59 Thn)	40	43	36	45	25
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (Usi > 15 Thn)	12	10	6	3	2
Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus	89	100	49	10	32
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	69	76	20	0	54
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	45	51	20	31	53
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	87	100	16	21	77

Sumber Data : Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh OPD yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 01/PRT/M/2014

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

a) Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indicator :
   1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b) Jalan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indicator :
   1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.

c) Cipta Karya
   1. Penataan bangunan dan lingkungan dengan indicator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.

d) Jasa Konstruksi
   1. Pengembangan System Informasi Jasa Konstruksi dengan indicator tersedianya 7 (Tujuh) jenis informasi tingkat kabupaten/kota pada System Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
   2. Perizinan jasa konstruksi dengan indicator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

e) Penataan Ruang
   1. Informasi penataan ruang dengan indicator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencanarincinya melalui peta analog dan peta digital.

2. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) Publik dengan indicator persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kabupaten perkotaan.

Tabel II.135. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan pendukung ekonomi daerah	69,42%	52,40%	71,56%	78,70%	92,29%
Persentase meningkatkan kualitas dan kuantitas jembatan pendukung ekonomi daerah	50,69%	0	0	0	88,58%
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana drainase	0	0	0	0	0
Panjang Turap/ talud/bronjong	4.229	5.750	6.318	7.261	8.588
Persentase meningkatnya kualitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	76,84%	83,23%	92,05%	92,05%	92,05%
Persentase meningkatnya kualitas pengendalian banjir	0	0	0	0	0
Presentase meningkatnya infrastruktur air minum	58,93%	63,58%	63,91%	63,91%	71,11%
Persentase meningkatnya infrastruktur Sanitasi	42,67%	43,99%	49,99%	51,72%	55,51%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel II.136. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten					
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah	0	0	0	0	0,01
Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten					
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah/Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu indikator SPM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/ Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah:

Tabel II.137. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	80%	80%
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0	95%	100%
Cakupan Pengamanan pada Pos Penjagaan di Fasilitas Pemerintah	0	0	0	100%	100%
Cakupan Pelaksanaan PAM Unjuk rasa dan Hari/Pejabat Penting	0	0	0	90%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab III pasal 26 (dua puluh enam) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial.
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sosial.
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial.
d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel II.138. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Penyandang Disabilitas Terlantar					
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya nya	0	0	0	0	58%
2. Anak Terlantar					
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	0	0	83%
3. Lansia Terlantar					
PersentaseLansia Terlantaryang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	0	0	64%
4. Gepeng					
Persentase Gelandangan, pengemis yang tertangani	0	0	0	0	0%
5. Bencana alam dan sosial					
Persesentase Korban Bencana alam dan sosial yang tertangani	5%	5%	0	45%	77%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebihnyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada

perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka focus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telahditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunantahun berikutnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkandalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akanberdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 turut mempertimbangkan hasil capaian program dan indicator kinerja RKPD Tahun 2023. Berikut adalah hasil evaluasi capaian program dan indicator kinerja RKPD Tahun 2023 menurut Misi dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

Tabel II.139. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan di Kabupaten Seram Bagian Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**119.911.894.826**		**74.304.185.876**		**62%**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**31.413.095.726**		**27.035.736.034**		**86%**	
01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**29.374.568.126**		**25.027.668.334**		**85%**	
01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok	29.374.568.126	1 Dok	25.027.668.334	100%	85%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			286.089.000		286.089.000			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	250.000.000	1	Lap	250.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	36.089.000	1	Lap	36.089.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**249.999.700**			**249.999.700**			
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Lap	249.999.700	1	Lap	249.999.700	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah				934.485.900			933.701.600			
1.01.01.2.06.04	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Lap	133.472.000	1	Lap	133.300.000	100%	99,9%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Lap	200.424.000	1	Lap	200.121.600	100%	99,8%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Lap	200.539.900	1	Lap	200.330.000	100%	99,9%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	400.050.000	1	Lap	399.950.000	100%	99,9%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**47.783.000**			**47.783.000**			
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	47.783.000	1	Paket	47.783.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**374.060.000**			**373.860.900**			
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	5.010.000	1	Lap	5.010.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
											Olahraga
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	69.052.800	1	Lap	69.052.800	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	249.998.100	1	Lap	249.998.100	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	49.999.100	1	Lap	49.800.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**146.110.000**			**116.633.500**			
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Ruang	146.110.000	1	Ruang	116.633.500	100%	79%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**88.498.799.100**			**47.268.449.842**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**32.990.483.485**			**13.313.215.452**			
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang	484.286.820	3	Ruang	456.525.785	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.03	Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10	Ruang	1.250.360.000	10	Ruang	1.173.481.179	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	Ruang	458.738.000	3	Ruang	432.468.500	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun	10	Ruang	1.866.333.760	10	Ruang	1.766.380.710	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	15	Ruang	2.544.255.795	15	Ruang	2.472.466.145	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang	723.650.310	4	Ruang	670.600.245	100%	92%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	Paket	150.000.000	1	Paket	149.850.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4	Paket	399.000.000	4	Paket	398.594.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50	siswa	550.000.000	50	siswa	550.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20	Paket	4.363.112.000	20	Paket	4.260.318.000	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	Lap	200.000.300	1	Lap	200.000.300	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.25	Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	Lap	50.000.500	1	Lap	50.000.500	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1	Lap	19.200.530.000	1	Lap	-	100%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	Ruang	750.216.000	3	Ruang	732.530.088	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah**				**48.662.403.715**			**31.743.493.390**			
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4	Ruang	1.149.683.300	4	Ruang	1.044.987.550	100%	90%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15	Ruang	6.572.093.000	15	Ruang	6.344.373.800	100%	96%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	17	Ruang	8.446.659.000	17	Ruang	8.211.952.200	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	18	Ruang	5.201.049.000	18	Ruang	4.894.150.415	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	Paket	3.168.135.000	10	Paket	3.030.226.555	100%	95%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1	Paket	94.917.600	1	Paket	94.800.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didk Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30	siswa	350.000.000	30	siswa	350.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15	paket	3.011.480.000	15	paket	2.816.435.770	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	Lap	249.999.900	1	Lap	249.699.900	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Lap	5.998.174.715	1	Lap	3.947.485.000	100%	65%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	Lap	254.682.500	1	Lap	254.682.500	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1	Lap	255.000.000	1	Lap	255.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1	thn	13.660.530.000	1	thn	-	100%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	Lap	249.999.700	1	Lap	249.699.700	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**				**6.809.341.900**			**2.175.171.000**		**31%**	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	Ruang	410.861.900	2	Ruang	246.304.500	100%	59%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.02	Pembanguna Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	Paket	1.290.966.000	5	Paket	1.260.482.500	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.7	Pengadaan Meubel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	Paket	75.000.000	1	Paket	74.370.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50	siswa	544.800.000	50	siswa	-	100%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.12	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1	Paket	194.000.000	1	Paket	194.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	Lap	150.014.600	1	lap	150.014.600	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.17	Pembeninaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	Lap	249.999.400	1	Lap	249.999.400	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1	thn	3.893.700.000	1	thn	-	100%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**				**36.570.000**			**36.570.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1	thn	36.570.000	1	thn	36.570.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**93.544.705.880**			**82.159.584.527**		**88%**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**				**24.026.202.458**			**22.722.190.705**		**95%**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**288.516.000**			**288.516.000**		**100%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	288.516.000	1	Dok	288.516.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13.780.568.758**			**12.769.233.362**		**93%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang	12.330.568.758	76	Orang	11.319.233.362	100%	92%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	300.000.000	1	Dok	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	300.000.000	1	Lap	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Lap	300.000.000	1	Lap	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	300.000.000	1	Lap	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	250.000.000	1	Dok	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**500.000.000**			**500.000.000**		**100%**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	250.000.000	1	Dok	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	250.000.000	1	Lap	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**1.769.482.000**			**1.769.482.000**		**100%**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	300.000.000	1	Dok	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1	Dok	600.000.000	1	Dok	600.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi dan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Pegawai	521.520.000	15	Pegawai	521.520.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16	Pegawai	347.962.000	16	Pegawai	347.962.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	**Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.095.628.400**			**1.087.548.400**		**99%**	
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	250.000.000	1	Paket	249.800.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	303.708.800	1	Paket	303.431.100	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	90.709.600	1	Paket	90.709.300	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	451.210.000	1	Tahun	443.608.000	100%	98%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**5.646.023.000**			**5.365.894.643**		**95%**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	367.100.000	1	Unit	327.200.000	100%	89%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	1.850.000.000	4	Unit	1.850.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Mebeler yang Disediakan	20	Unit	150.000.000	20	Unit	149.880.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	3.278.923.000	6	Unit	3.038.814.643	100%	93%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**427.096.800**			**427.096.800**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenihinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Tahun	20.160.000	1	Tahun	20.160.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Tahun	226.936.800	1	Tahun	226.936.800	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	1	Tahun	180.000.000	1	Tahun	180.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**518.887.500**			**514.419.500**		**99%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	5	Unit	150.000.000	5	Unit	149.985.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Gedung	368.887.500	2	Gedung	364.434.500	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**68.716.941.422**			**58.635.831.822**		**85%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**19.465.831.272**			**16.330.953.005**		**84%**	
	Pembangunan Puskesmas	jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5	Unit	2.140.018.400	5	Unit	2.069.124.400	100%	97%	Dinas Kesehatan
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5	Unit	1.681.150.122	5	Unit	1.499.744.878	100%	89%	Dinas Kesehatan
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	Unit	185.757.750	1	Unit	178.067.750	100%	96%	Dinas Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	6	Unit	973.000.000	6	Unit	895.910.890	100%	92%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8	Paket	7.251.200.000	8	Paket	7.171.494.754	100%	99%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	8	Paket	3.913.354.443	8	Paket	2.796.088.983	100%	71%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4	Paket	3.206.600.557	4	Paket	1.605.771.350	100%	50%	Dinas Kesehatan
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	22	Puskes mas	114.750.000	22	Puskes mas	114.750.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				48.075.678.400			41.129.481.067		86%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22	Puskes mas	1.137.417.000	22	Puskes mas	422.251.067	100%	37%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22	Puskes mas	250.000.000	22	Puskes mas	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Puskesmas	246.063.000	22 Puskesmas	246.063.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Puskesmas	200.000.000	22 Puskesmas	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Puskesmas	207.600.000	22 Puskesmas	207.600.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Puskesmas	200.000.000	22 Puskesmas	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan kapasitas tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Puskesmas	346.563.000	22 Puskesmas	346.563.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22	Puskesmas	106.225.000	22	Puskesmas	106.225.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22	Puskesmas	400.400.000	22	Puskesmas	400.400.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22	Puskesmas	136.250.000	22	Puskesmas	136.250.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	22	Puskesmas	524.701.000	22	Puskesmas	524.701.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22	Puskesmas	917.200.000	22	Puskesmas	917.200.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22	Dok	13.435.378.400	22	Dok	8.326.865.000	100%	62%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22	Dok	27.819.487.000	22	Dok	27.693.217.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	22	Dok	551.949.000	22	Dok	551.949.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	Puskes mas	996.248.000	0	-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Lap	300.000.000	1	Lap	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Dok	300.197.000	1	Dok	300.197.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**1.175.431.750**			**1.175.397.750**		**100%**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi	22	Dok	500.197.000	22	Dok	500.197.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Kesehatan									
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	Puskesmas	441.200.750	22	Puskesmas	441.200.750	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5	Unit	234.034.000	5	Unit	234.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**298.812.000**			**298.812.000**		**100%**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah**				**298.812.000**			**298.812.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota								
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tepenuhinya pendistribusian serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas	22 Puskesmas	298.812.000	22 Puskesmas	298.812.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**502.750.000**		**502.750.000**		**100%**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**502.750.000**		**502.750.000**		**100%**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dok	502.750.000	1 Dok	502.750.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**14.010.490.079**			**13.958.363.796**		**100%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KABUPATEN/KOTA				**1.492.997.027**			**1.488.243.423**		**100%**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**470.070.047**			**465.697.811**		**99%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	22.349.947	1	Paket	22.346.412	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	147.334.900	1	Paket	147.259.170	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.970.000	1	Paket	24.969.709	100%	100%	RSUD Bula
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Paket	220.848.200	1	Paket	220.739.520	100%	100%	RSUD Bula
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	54.567.000	1	Paket	50.383.000	100%	92%	RSUD Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			62.716.600		62.640.000		100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	62.716.600	1 Paket	62.640.000	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**789.420.380**		**789.141.872**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket	347.690.380	1 Paket	347.530.300	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.170.000	1 Paket	27.054.072	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	414.560.000	1 Paket	414.557.500	100%	100%	RSUD Bula
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**170.790.000**		**170.763.740**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Paket	170.790.000	1	Paket	170.763.740	100%	100%	RSUD Bula
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**12.517.493.052**			**12.470.120.373**		**100%**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**350.000.000**			**349.898.000**		**100%**	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	Paket	250.000.000	1	Paket	249.998.000	100%	100%	RSUD Bula
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	Paket	100.000.000	1	Paket	99.900.000	100%	100%	RSUD Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**12.167.493.052**			**12.120.222.373**		**100%**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dok	220.000.000	1	Dok	219.000.000	100%	100%	RSUD Bula
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dok	10.680.641.152	1	Dok	10.636.998.812	100%	100%	RSUD Bula
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	1.266.851.900	1	Unit	1.264.223.561	100%	100%	RSUD Bula
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**6.754.729.736**	-	-	**6.153.275.449**		**91%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KABUPATEN/KOTA				**6.197.554.898**			**5.596.587.016**		**90%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.417.845.428**			**3.818.419.246**		**86%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.417.845.428		3.818.419.246		86%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			146.120.000		146.120.000		100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		146.120.000		146.120.000		100%	RSUD Goran Riun
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.226.494.400**		**1.225.092.500**		**100%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.591.200	1 Paket	73.500.000	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	176.468.500	1 Paket	176.321.000	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	402.037.700	1 Paket	401.647.500	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.415.000	1 Paket	27.415.000	100%	100%	RSUD Goran Riun

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Paket	162.900.000	1	Paket	162.859.000	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	384.082.000	1	Paket	383.350.000	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**275.665.070**			**275.525.270**		**100%**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	179.074.200	1	Unit	179.074.200	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	96.590.870	1	Paket	96.451.070	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**86.250.000**			**86.250.000**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.250.000			14.250.000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1	Paket	72.000.000	1	Paket	72.000.000	100%	100%	RSUD Goran Riun

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**45.180.000**		**45.180.000**		**100%**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	45.180.000	1 Paket	45.180.000	100%	100%	RSUD Goran Riun
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**557.174.838**		**556.688.433**		**100%**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**557.174.838**		**556.688.433**		**100%**	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Paket	187.744.278	1 Paket	187.744.278	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	100%	100%	RSUD Goran Riun

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000							
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	159.225.000	1 Paket	159.220.300	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	104.003.100	1 Paket	103.631.354	100%	100%	RSUD Goran Riun
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	86.202.460	1 Paket	86.092.501	100%	100%	RSUD Goran Riun
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**106.715.961.369**		**91.206.317.141**		**85%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**10.035.889.983**			**8.600.268.753**		**86%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**250.100.000**			**250.100.000**		**100%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	19.500.000	1	Dok	19.500.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	20.500.000	1	Dok	20.500.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dok	210.100.000	2	Dok	210.100.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.002.633.659**			**3.534.288.884**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang	3.950.733.659	59	Orang	3.482.388.884	100%	88%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	26.800.000	1	Dok	26.800.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Dok	25.100.000	1	Dok	25.100.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**358.609.000**			**358.609.000**		**100%**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	358.609.000	25	Orang	358.609.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**412.045.960**			**412.045.960**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Keg.	118.275.460	5	Keg.	118.275.460	100%	100%	Dinas PUPR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Keg.	18.067.700	1	Keg.	18.067.700	100%	100%	Dinas PUPR
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Keg.	15.047.800	1	Keg.	15.047.800	100%	100%	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Keg.	260.655.000	1	Keg.	260.655.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**3.961.066.850**			**3.210.308.400**		**81%**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Keg.	200.000.100	1	Keg.	200.000.100	100%	100%	Dinas PUPR
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	3.511.066.750	4	Unit	2.760.308.300	100%	79%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Keg.	250.000.000	1	Keg.	250.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**108.851.514**			**106.338.584**		**98%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Keg.	78.843.264	1	Keg.	76.830.334	100%	97%	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Keg.	30.008.250	1	Keg.	29.508.250	100%	98%	Dinas PUPR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**942.583.000**			**728.577.925**		**77%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Keg.	50.007.000	1	Keg.	50.007.000	100%	100%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Keg.	15.870.000	1	Keg.	15.870.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Keg.	876.706.000	1	Keg.	662.700.925	100%	76%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**11.344.600.000**			**10.741.829.584**		**95%**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten				**11.131.200.000**			**10.528.429.584**		**95%**	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	13	Paket	4.036.000.000	13	Paket	3.808.509.250	100%	94%	Dinas PUPR
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3	Paket	550.000.000	3	Paket	536.378.350	100%	98%	Dinas PUPR
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	27	Paket	6.545.200.000	27	Paket	6.183.541.984	100%	94%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**213.400.000**		**213.400.000**		**100%**	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Keg.	213.400.000	1 Keg.	213.400.000	100%	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			**7.895.351.300**		**6.053.127.805**		**77%**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			**7.895.351.300**		**6.053.127.805**		**77%**	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	11 Paket	7.895.351.300	11 Paket	6.053.127.805	100%	77%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**4.800.400.000**			**4.800.400.000**		**100%**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik				**4.800.400.000**			**4.800.400.000**		**100%**	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	13	Paket	4.800.400.000	13	Paket	4.800.400.000	100%	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**1.120.000.000**			**1.028.486.950**		**92%**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**1.120.000.000**			**1.028.486.950**		**92%**	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Paket	20.000.000	3	Paket	20.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5	Paket	1.100.000.000	5	Paket	1.008.486.950	100%	92%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			**2.148.266.950**		**2.011.665.975**		**94%**	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			**2.148.266.950**		**2.011.665.975**		**94%**	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Paket	2.148.266.950	13 Paket	2.011.665.975	100%	94%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			**69.044.227.636**		**57.644.440.290**		**83%**	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			**69.044.227.636**		**57.644.440.290**		**83%**	
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 Paket	321.500.209	2 Paket	300.977.709	100%	94%	Dinas PUPR
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	19 Paket	60.175.327.200	19 Paket	48.796.062.354	100%	81%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 Paket	7.240.869.227	3 Paket	7.240.869.227	100%	100%	Dinas PUPR
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	2 Paket	1.306.531.000	2 Paket	1.306.531.000	100%	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			**327.225.500**		**326.097.784**		**100%**	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			**327.225.500**		**326.097.784**		**100%**	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	3 Keg	327.225.500	3 Keg	326.097.784	100%	100%	Dinas PUPR
01.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**26.721.621.678**		**25.768.090.086**		**96%**	
01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.680.947.678**		**1.667.182.510**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**14.996.800**			**14.996.000**		**100%**	
01.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	1	Dok	14.996.800	1	Dok	14.996.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.202.669.139**			**1.189.250.983**			
01.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	1.202.669.139	20	Orang	1.189.250.983	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**4.999.000**			**4.999.000**			
01.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	4.999.000	1	Lap	4.999.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**397.886.365**			**397.590.710**			
01.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Pkt	49.534.465	1	Pkt	49.448.600	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Pkt	29.999.700	1	Pkt	29.835.174	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pkt	7.747.200	1	Pkt	7.707.936	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Lap	310.605.000	20	Lap	310.599.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**27.400.000**			**27.392.727**			
01.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	27.400.000	1	Unit	27.392.727	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**32.996.374**			**32.953.090**			
01.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	14.999.040	3	Lap	14.998.090	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	17.997.334	12	Lap	17.955.000	100%	100%	
01.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**269.750.600**			**269.750.600**			
01.04.02.2.02	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**269.750.600**			**269.750.600**			
01.04.02.2.02.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	15	Kec	269.750.600	15	Kec	269.750.600	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**8.539.273.400**			**8.537.740.600**			
01.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**				**200.050.000**			**200.050.000**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Haasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	11	Kec	200.050.000	11	Kec	200.050.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				**164.730.100**			**164.639.100**			
01.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6	Kec	99.998.100	6	Kec	99.998.100	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	Keg	64.732.000	3	Keg	64.641.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				**8.174.493.300**			**8.173.051.500**			
01.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200	Unit	8.067.494.200	200	Unit	8.066.052.400	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	6	Kec	106.999.100	6	Kec	106.999.100	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**300.000.000**			**299.714.290**			
01.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**300.000.000**			**299.714.290**			
01.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	2	Pkt	300.000.000	2	Pkt	299.714.290	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ha yang Diperbaiki							
01.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**15.931.650.000**		**14.993.702.086**			
01.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			**15.931.650.000**		**14.993.702.086**			
01.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	86 Lokasi	15.931.650.000	86 Lokasi	14.993.702.086	100%	94%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**3.549.999.250**		**3.499.217.300**		**99%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**343.009.450**		**327.341.500**		**95%**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**19.999.400**		**19.999.400**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	1 Dok	9.999.400	1 Dok	9.999.400	100%	100%	satpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi enyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	100%	100%	satpol
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**14.500.000**		**14.500.000**			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	14.500.000	12 Bulan	14.500.000	100%	100%	satpol
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**214.105.900**		**206.465.200**			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Unit	30.500.000	22 Unit	30.500.000	100%	100%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	9.991.700	1	paket	9.327.200	100%	93%	satpol
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	50.035.100	1	paket	50.035.100	100%	100%	satpol
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	22.011.100	1	paket	20.034.900	100%	91%	satpol
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	4.968.000	12	Bulan	4.968.000	100%	100%	satpol
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	Kali	96.600.000	19	Kali	91.600.000	100%	95%	satpol
	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				**29.583.350**			**24.508.900**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	paket	3.000.000	1	paket	3.000.000	100%	100%	satpol
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	21.584.300	12	Bulan	16.509.850	100%	76%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	4.999.050	12 Bulan	4.999.050	100%	100%	satpol
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.820.800		61.868.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	56.492.800	3 Unit	53.540.000	100%	95%	satpol
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket	8.328.000	1 paket	8.328.000	100%	100%	satpol
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**3.206.989.800**		**3.171.875.800**			
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**3.171.991.200**		**3.136.877.200**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Bulan	3.136.992.000	12 Bulan	3.114.628.000	100%	99%	satpol
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Keg	34.999.200	1 Keg	22.249.200	100%	64%	satpol
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			**34.998.600**		**34.998.600**			
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	4 Tahap	34.998.600	4 Tahap	34.998.600	100%	100%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**4.053.991.715**		**3.405.539.126**		**84%**	
01.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**2.556.991.715**		**2.332.237.026**		**91%**	
01.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**10.000.000**		**7.962.100**		**80%**	
01.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	10.000.000	1 Dok	7.962.100	100%	80%	BPBD
01.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.898.650.799**		**1.673.906.610**			
01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	1.898.650.799	28 Orang	1.673.906.610	100%	88%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**345.488.000**		**345.477.500**			
01.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.990.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	9.999.500	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.200.000	1 Paket	13.200.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap.	222.288.000	1 Lap.	222.288.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**185.645.000**		**185.645.000**			
01.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	185.645.000	2 Unit	185.645.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**55.917.916**		**55.917.916**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap.	10.075.900	1	Lap.	10.075.900	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap.	33.842.016	1	Lap.	33.842.016	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap.	12.000.000	1	Lap.	12.000.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**71.290.000**			**71.290.000**			
01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	71.290.000	8	Lap.	71.290.000	100%	100%	BPBD
01.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**1.497.000.000**			**1.073.302.100**			
01.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**150.000.000**			**95.920.000**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
01.05.03.2.01.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100	Org	150.000.000	60	Org	95.920.000	60%	64%	BPBD
01.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**850.000.000**			**548.614.100**			
01.05.03.2.01.02	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	JumlahPeralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1	paket	200.000.000	1	paket	43.230.000	100%	22%	BPBD
01.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1	Keg.	150.000.000	1	Keg.	91.972.700	100%	61%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Verifikasi Pasca Bencana Di kecamatan	1 Keg.	500.000.000	1 Keg.	413.411.400	100%	83%	BPBD
01.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**497.000.000**		**428.768.000**			
01.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Keg.	97.000.000	1 Keg.	96.600.000	100%	100%	BPBD
01.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Keg.	400.000.000	1 Keg.	332.168.000	100%	83%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**10.819.573.816**		**10.699.038.619**		**99%**	
106.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**			**3.180.023.316**		**2.396.957.190**		**75%**	
106.01.201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**254.093.850**		**254.092.950**		**100%**	
106.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	54.897.900	1 Dok	54.897.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Kec	199.195.950	15 Kec	199.195.950,00	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.282.897.162**		**1.499.999.978**		**66%**	
106.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.282.897.162	12 Bulan	1.499.999.978	100%	66%	Dinas Sosial
106.01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**381.149.900**		**380.999.200**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
106.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bln	28.568.600,00	12	Bln	28.534.600,00	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bln	50.689.300,00	12	Bln	50.572.600,00	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	301.892.000,00	1	Tahun	301.892.000,00	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**148.409.016**			**148.392.712**		**100%**	
106.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	148.409.016	8	Unit	148.392.712	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**56.395.388**			**56.395.307**		**100%**	
106.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	39.981.688	12	Bulan	39.981.607	100%	100%	Dinas Sosial

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
106.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	16.413.700	12	Bulan	16.413.700	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**57.078.000**			**57.077.043**		**100%**	
106.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	57.078.000	2	Unit	57.077.043	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	12.500.000	8	Unit	12.480.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60.820.000	1	Unit	60.814.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**3.495.447.900**			**3.494.829.093**		**100%**	
106.02.201	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**				**2.337.297.900**			**2.336.679.093**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
106.02.201.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KPM Kominitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif/BahanPermakanan	28	KPM	968.277.900	28	KPM	968.129.611	100%	100%	Dinas Sosial
106.02.209.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah KPM pendampingan Kominitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan KUBE dan sembako	59	Unit	1.369.020.000	59	KPM	1.368.549.482	100%	100%	Dinas Sosial
106.02.203	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**				**1.158.150.000**			**1.158.150.000**		**100%**	
106.02.203.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan potensi organisasi kepemudaan/masyarakat	12	KPM	1.158.150.000	12	KPM	1.158.150.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**999.045.800**			**998.605.100**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
106.04.201	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**999.045.800**			**998.605.100**		**100%**	
106.04.201.02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Sarana / Operasional Pendamping PKH	12	Bulan	14.525.800	12	Bulan	14.326.100	100%	99%	Dinas Sosial
106.04.201.05	Penyediaan Sandang	Penyedian bantuan sandang dan pangan kepada PMKS	140	KPM	984.520.000	140	KPM	984.279.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2.309.166.800**			**2.308.647.228**		100%	
106.05.202	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.309.166.800**			**2.308.647.228**		100%	
106.05.202.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	1	Dok	63.998.500	1	Dok	63.998.500	100%	100%	Dinas Sosial
106.05.202.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	182	KPM	1.038.768.300	182	KPM	1.038.298.562	100%	100%	Dinas Sosial

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106.05.202.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	75 KPM	1.206.400.000	75 KPM	1.206.350.166	100%	100%	Dinas Sosial
106.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**835.890.000**		**1.500.000.008**		**179%**	
106.06.202	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**835.890.000**		**1.500.000.008**		**179%**	
106.06.202.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Bantuan Sosial bagi kelompok rentan	274 KPM	835.890.000	274 KPM	1.500.000.008	100%	179%	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**6.699.392.540**		**5.014.574.804**		**75%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**6.145.034.840**		**4.457.313.104**		**73%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			**2.909.402.068**		**2.065.801.202**		**71%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	19.991.200	3 dok	19.991.200	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.909.402.068		2.065.801.202		100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 0rg	2.909.402.068	31 0rg	2.065.801.202	100%	89%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			220.612.200		220.092.196			
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.868.400	1 Paket	99.868.400	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyedian Bahan Logis Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.706.300	1 Paket	20.706.300	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500	1 Paket	5.500	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	100.032.000	1	Laporan	99.511.996	100%	99%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**40.762.700**			**40.762.700**		**99%**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	40.762.700	1	Unit	40.762.700	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**64.855.804**			**64.855.804**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	19.993.304	1	Laporan	19.993.304	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyedian Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	44.862.500	1	Laporan	44.862.500	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**49.980.000**			**49.980.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			**49.980.000**		**49.980.000**		**100%**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Berdasarkan Klester Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 orang	49.980.000	20 orang	49.980.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			**88.984.600**		**88.984.600**		**100%**	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			**73.985.300**		**73.985.300**		**100%**	
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1 keg	4.999.300	1 keg	4.999.300	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3 kelompok kerja	68.986.000	3 kelompok kerja	68.986.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			**14.999.300**		**14.999.300**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Passar kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 keg	14.999.300	1 keg	14.999.300	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			**415.393.100**		**418.297.100**		**100%**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan danPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**375.395.200**		**378.299.200**		**100%**	
	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	7279 or	375.395.200	7279 or	378.299.200	100%	99%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			**39.997.900**		**39.997.900**		**99%**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Keg	39.997.900	1 keg	39.997.900	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**3.011.458.392**		**3.011.458.392**		**100%**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.011.458.392**		**3.011.458.392**		**100%**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.225.652.092**		**2.225.652.092**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2.225.652.092	1	Tahun	2.225.652.092	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**707.949.300**			**707.949.300**		**100%**	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	121.168.000	1	Paket	121.168.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	37.625.500	1	Paket	37.625.500	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	13.463.800	1	Paket	13.463.800	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	23.478.000	1	Lap	23.478.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	512.214.000	1	Lap	512.214.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**56.332.000**			**56.332.000**		**100%**	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	30.192.000	1	Lap	30.192.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	26.140.000	1	Lap	26.140.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**21.525.000**			**21.525.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Di	1 Tahun	21.525.000	1 Tahun	21.525.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**2.746.174.944**		**2.744.012.800**		**100%**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**2.446.808.844**		**2.445.718.100**		**100%**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**			**290.944.000**		**290.900.100**		**100%**	
2.09.03.2.01.04	Pemantuaan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Pasar	290.944.000	15 Pasar	290.900.100	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**2.155.864.844**		**2.154.818.000**		**100%**	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok	370.337.200	1 Dok	370.160.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 Lap	1.785.527.644	16 Lap	1.784.658.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**222.716.000**		**221.661.700**		**100%**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**222.716.000**		**221.661.700**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	222.716.000	1	Dok	221.661.700	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**76.650.100**			**76.633.000**		**100%**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**				**76.650.100**			**76.633.000**		**100%**	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerahabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	76.650.100	1	Dok	76.633.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**3.171.632.600**			**3.068.110.000**		**97%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**452.990.600**			**441.864.000**		**98%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**21.248.600**			**21.248.600**		**100%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	21.248.600	1	Lap	21.248.600	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**140.167.700**			**139.244.500**		**99%**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	41.992.400	1	Paket	41.431.200	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.913.300	1	Paket	5.913.300	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	92.262.000	1	Lap	91.900.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**217.354.300**			**214.868.400**		**99%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	16.517.100	1	Lap	16.319.117	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	12.831.600	1	Lap	10.543.683	100%	82%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	188.005.600	1	Lap	188.005.600	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**74.220.000**			**66.502.500**		**90%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	74.220.000	4	Unit	66.502.500	100%	90%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lapangan								
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			**73.911.000**		**72.561.000**		**98%**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			**73.911.000**		**72.561.000**		**98%**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	21.600.000	1 Dok	21.600.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Keg	52.311.000	1 Keg	50.961.000	100%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			**474.860.000**		**474.860.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			**474.860.000**		**474.860.000**		**100%**	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg	229.860.000	1 Keg	229.860.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg	245.000.000	1 Keg	245.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			**85.000.000**		**83.700.000**		**98%**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**85.000.000**		**83.700.000**		**98%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec	85.000.000	7 Kec	83.700.000	100%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			**335.567.000**		**255.067.000**		**76%**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**135.567.000**		**135.567.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Keg	135.567.000	1 Keg	135.567.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**200.000.000**		**119.500.000**		**60%**	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Keg	200.000.000	1 Keg	119.500.000	100%	60%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			**1.749.304.000**		**1.740.058.000**		**99%**	
	Pengelolaan Sampah			**1.749.304.000**		**1.740.058.000**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1	Keg	1.460.704.000	1	Keg	1.460.704.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	Keg	98.600.000	1	Keg	98.600.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Keg	190.000.000	1	Keg	180.754.000	100%	95%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**1.261.958.300**			**1.261.958.300**		**100%**	
02.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**761.434.400**			**761.434.400**		**100%**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.188.800**			**17.188.800**		**100%**	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dok	17.188.800	2	dok	17.188.800	100	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.998.200**			**9.998.200**		**100%**	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	9.998.200	1	Dok	9.998.200	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.731.000			38.731.000		100%	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	stel	38.731.000	45	stel	38.731.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**406.292.400**			**406.292.400**		**100%**	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	jenis	22.913.700	10	jenis	22.913.700	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	item	45.490.800	50	item	45.490.800	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	jenis	44.160.900	2	jenis	44.160.900	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	orang	293.727.000	50	orang	293.727.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**61.391.520**			**61.391.520**		**100%**	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	23.127.800	1	unit	23.127.800	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	38.263.720	3	unit	38.263.720	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**171.280.480**			**171.280.480**		**100%**	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	73.058.480	12	bulan	73.058.480	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	orang	98.222.000	6	orang	98.222.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**56.552.000**			**56.552.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.560.000	1 unit	34.560.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	21.992.000	1 paket	21.992.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**199.952.600**		**199.952.600**		**100%**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			**199.952.600**		**199.952.600**		**100%**	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6000 keping	199.952.600	6000 keping	199.952.600	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**300.571.300**		**300.571.300**		**100%**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			**208.499.600**		**208.499.600**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6000	akta	208.499.600	6000	akta	208.499.600	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**92.071.700**			**92.071.700**		**100%**	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	500	akta	26.578.500	500	akta	26.578.500	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2000	akta	65.493.200	2000	akta	65.493.200	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**2.919.043.600**		**2.919.043.600**		**100%**	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**364.661.000**		**364.661.000**		**100%**	
2.13.02.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**364.661.000**		**364.661.000**		**100%**	
2.13.02.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	198 Desa	364.661.000	198 Desa	364.661.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**1.123.117.900**		**1.123.117.900**		**100%**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			**1.123.117.900**		**1.123.117.900**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dok	1.123.117.900	1 Dok	1.123.117.900	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			**1.431.264.700**		**1.431.264.700**		**100%**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah kabupaten/Kota			**1.431.264.700**		**1.431.264.700**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lap	185.770.000	1 Lap	185.770.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dok	1.245.494.700	1 Dok	1.245.494.700	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**2.668.177.078**		**2.650.175.787**		**99%**	
2.14.01	**Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**2.068.177.078**		**2.050.175.787**		**99%**	
2 14 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.668.176.979**		**1.650.973.187**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2 14 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1.668.176.979	1	Tahun	1.650.973.187	100%	99%	DPPKB
2 14 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**209.728.200**			**209.626.510**			
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (APBD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	37.518.300	3	Unit	37.518.300	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (APBD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	keg	6.409.900	1	keg	6.408.410	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (APBD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	keg	6.000.000	1	keg	5.999.800	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	keg	159.800.000	1	keg	159.700.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**128.515.699**			**128.186.000**		**100%**	
2 14 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (APBD)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	40.000.000	1	Paket	40.000.000	100%	100%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2 14 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	88.515.699	1	keg	88.186.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**12.196.200**			**11.830.090**			
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik (APBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Tahun	6.199.200	1	keg	6.021.090	100%	97%	DPPKB
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (APBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	keg	5.997.000	1	keg	5.809.000	100%	97%	DPPKB
2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**34.560.000**			**34.560.000**		**100%**	
2 14 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (APBD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	keg	34.560.000	1	keg	34.560.000	100%	100%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2 14 01 2.13	Penataan Organisasi				15.000.000			15.000.000		100%	
2 14 01 2.13.15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Lap	15.000.000	1	Lap	15.000.000	100%	100%	DPPKB
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**150.000.000**			**150.000.000**		**100%**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**1**	**keg**	**150.000.000**	**1**	**Dok**	**150.000.000**	**100%**	**100%**	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Keg	150.000.000	1	Dok	150.000.000	100%	100%	DPPKB
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**250.000.000**			**250.000.000**		**100%**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**100.000.000**			**100.000.000**		**100%**	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	keg	100.000.000	1	Lap	100.000.000	100%	100%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**150.000.000**		**150.000.000**		**100%**	
2.14.03.2.04.03	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	100%	100%	DPPKB
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**200.000.000**		**200.000.000**		**100%**	
2.14.04.2	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**200.000.000**		**200.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (APBD)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Keg	200.000.000	1 Keg	200.000.000	100%	100%	DPPKB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**10.613.252.573**		**9.033.019.565**		**85%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**3.574.805.673**		**3.129.221.460**		**88%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.824.311.229**		**2.402.723.304**		**85%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.824.311.229	12 Bulan	2.402.723.304	100%	85%	Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**521.550.700**		**498.691.274**		**96%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	169.400.200	12	Bulan	169.077.600	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan	48.929.200	12	Bulan	48.919.700	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	39.985.300	12	Bulan	21.984.500	100%	55%	Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	Perjalanan	263.236.000	66	Perjalanan	258.709.474	100%	98%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**121.843.744**			**120.806.882**		**99%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	exemplar	3.587.200	500	exemplar	3.550.000	100%	99%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	28.196.544	12	Bulan	27.196.882	100%	96%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2	Orang	90.060.000	2	Orang	90.060.000	100%	100%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Disediakan									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**107.100.000**			**107.000.000**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	107.100.000	4	Unit	107.000.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				**4.868.946.900**			**4.052.058.550**		**83%**	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				**1.150.000.000**			**937.657.650**		**82%**	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	Unit	1.000.000.000	1	Unit	916.759.550	100%	92%	Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	150.000.000	1	Unit	20.898.100	100%	14%	Dinas Perhubungan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000			100.000.000		100%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1	Keg	100.000.000	1	Keg	100.000.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				**99.621.500**			**88.021.500**		**88%**	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	Keg	99.621.500	1	Keg	88.021.500	100%	88%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**3.119.326.000**			**2.526.380.000**		**81%**	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	Subsidi	3.119.326.000	6	Subsidi	2.526.380.000	100%	81%	Dinas Perhubungan
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah				399.999.400			399.999.400		100%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota								
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Keg	399.999.400	2 Keg	399.999.400	100%	100%	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			**2.169.500.000**		**1.851.739.555**		**85%**	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			**2.169.500.000**		**1.851.739.555**		**85%**	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2 Unit	2.169.500.000	2 Unit	1.851.739.555	100%	85%	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**2.320.000.000**		**2.320.000.000**		**100%**	
2.16.02	**Program Pengelolaan Aplikasi Informasi**	**Meningkatkan Pengawasan Aplikasi Informasi**		**2.320.000.000**		**2.320.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.02.01	**pengelolaan nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain Dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaturan dan pengawasan nama subdomain pada OPD di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan**		**1.500.000.000**		**1.500.000.000**		**100%**	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Website OPD	9 subdomain	750.000.000	9 subdomain	750.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelengaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	SKPD yang Terkoneksi dalam Jaringan Server Pemerinah Daerah	1 Server Aktif	750.000.000	1 Server Aktif	750.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat Daerah dan Unit Kerja yang mengimplementasikan IT baik		820.000.000		820.000.000		100%	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan dan Pengawasan e-government	15 OPD	200.000.000	5 Website OPD	200.000.000	65%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggatan Pemerintah Berbasis Elektronik	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan pusat Data Pemerintah Daerah	Tersedianya Aplikasi One Data SBT	1 Aplikasi	500.000.000	1 Aplikasi	500.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi sistem Keamanan Informasi	Tersedianya Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**7.755.290.111**		**7.506.879.962**		**97%**	
2-17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan**		**3.721.159.111**		**3.532.420.287**		**95%**	
2-17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan**		**15.000.000**		**15.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2-17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	15.000.000	3	Dok	15.000.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercapainya Administrasi keuangan perangkat daerah**			**3.008.447.391**			**2.847.187.537**		**95%**	
2-17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang	3.008.447.391	49	Orang	2.847.187.537	100%	95%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi kepegawaian perangkat Daerah**			**22.050.000**					**0%**	
2-17.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	22.050.000	-		-	0%	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat daerah**			**393.024.520**			**389.925.000**		**99%**	
2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	103.598.970	1	Paket	103.597.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2-17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.230.200	1	Paket	19.733.000	100%	98%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	21.663.350	1	Paket	21.663.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	247.532.000	1	Paket	244.932.000	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**19.691.200**			**19.691.200**		**100%**	
2-17.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebbeleur Kantor	1	Paket	19.691.200	1	Paket	19.691.200	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**78.386.000**			**76.609.000**		**98%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Paket	20.196.000	1	Paket	18.419.000	100%	91%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Unit	10.190.000	12	Unit	10.190.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Orang	48.000.000	6	Orang	48.000.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**184.560.000**			**184.007.550**		**100%**	
2-17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	34.560.000	1	Unit	34.560.000	50%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2-17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	150.000.000	1 paket	149.447.550	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**		**9.600.000**		**8.100.000**		**84%**	
2-17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Pemeriksaan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota**		**9.600.000**		**8.100.000**		**84%**	
2-17.03.2.01.001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kop	9.600.000	1 Kop	8.100.000	20%	84%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN**	**Meningkatnya Koperasi yang**		**12.431.000**		**12.431.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERKOPERASIAN	**berkualitas**							
2-17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**		**12.431.000**		**12.431.000**		**100%**	
2-17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	5 Kop	12.431.000	30 Kop	12.431.000	600%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha**		**4.012.100.000**		**3.953.928.675**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2-17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**			**4.012.100.000**			**3.953.928.675**		**99%**	
2-17.07.2.01.001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Kec	49.050.000	5	Kec	49.050.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10	Unit	3.963.050.000	10	Unit	3.904.878.675	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				**1.819.592.000**	-	-	**1.783.541.100**		**98%**	
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.018.984.000**			**992.059.500**			
2.18.01.2.06.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**874.133.100**			**851.624.000**		**97%**	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	89.149.500	1	Paket	89.120.000	100%	100%	DPMPTSP
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	37.758.600	1	Paket	33.488.000	100%	89%	DPMPTSP
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.870.000	1	Paket	10.985.000	100%	69%	DPMPTSP
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Kec/Luar Daerah	731.355.000	14	Kec/Luar Daerah	718.031.000	100%	98%	DPMPTSP
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**105.710.900**			**101.295.500**		**96%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	15.286.400	12	Bulan	11.105.500	100%	73%	DPMPTSP
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	90.424.500	12	Bulan	90.190.000	100%	100%	DPMPTSP
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**39.140.000**			**39.140.000**		**100%**	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Bulan	39.140.000	12	Bulan	39.140.000	100%	100%	DPMPTSP
02.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**150.070.000**			**150.070.000**		**100%**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**150.070.000**			**150.070.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kec/Luar Daerah	150.070.000	6 Kec/Luar Daerah	150.070.000	100%	100%	DPMPTSP
02.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**154.986.500**		**154.986.500**		**100%**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**154.986.500**		**154.986.500**		**100%**	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Kec/Luar Daerah	154.986.500	7 Kec/Luar Daerah	154.986.500	100%	100%	DPMPTSP
02.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**495.551.500**		**486.425.100**		**98%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**495.551.500**			**486.425.100**		**98%**	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	Kec/Luar Daerah	125.856.500	10	Kec/Luar Daerah	123.456.500	100%	98%	DPMPTSP
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	7	Kec	243.756.400	7	Kec	237.030.000	100%	97%	DPMPTSP
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	7	Kec	125.938.600	7	Kec	125.938.600	100%	100%	DPMPTSP
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**2.854.004.600**			**2.829.999.120**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**854.004.600**		**853.997.200**		**100%**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembagan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota**			**249.004.600**		**248.997.200**		**100%**	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	1 laporan	209.004.600	1 laporan	208.997.200	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**605.000.000**		**605.000.000**		**100%**	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	15 kec	605.000.000	15 kec	605.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**1.500.000.000**		**1.476.001.920**		**98%**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota**			**425.000.000**		**401.001.920**		**94%**	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 laporan	425.000.000	1 laporan	401.001.920	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**			**300.000.000**		**300.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tingkat Daerah Kab/Kota								
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**775.000.000**		**775.000.000**		**100%**	
2.19.04.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 laporan	775.000.000	1 laporan	775.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**500.000.000**		**500.000.000**		**100%**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**500.000.000**		**500.000.000**		**100%**	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			401.731.250		364.981.250		90,9%	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			401.731.250		364.981.250		90,9%	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota			401.731.250		364.981.250		90,9%	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	1 Unit	401.731.250	1 Unit	364.981.250	100%	91%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**3.906.930.057**		**3.652.686.715**		**93%**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**			**3.551.596.657**		**3.318.921.875**		**93%**	
02.23.01.2.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.829.858.621**		**1.643.446.703**		**90%**	
02.23.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	1.829.858.621	25 Orang	1.643.446.703	100%	90%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**691.585.200**			**690.889.211**		**99,9%**	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	114.607.900	1	Paket	114.580.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	119.025.300	1	Paket	118.924.352	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	26.642.000	1	Paket	26.275.807	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1	Paket	2.511.000	1	Paket	2.511.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Lokus	428.799.000	17	Lokus	428.598.052	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**571.781.000**			**570.246.600**		**99,7%**	
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	47.790.000	2	Unit	46.255.600	100%	97%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	Unit	523.991.000	3	Unit	523.991.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**265.670.836**			**254.145.016**		**96%**	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	45.198.836	12	Laporan	33.673.016	100%	74%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	Laporan	220.472.000	4	Laporan	220.472.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**192.701.000**			**160.194.345**		**83%**	
2.17.2.17.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaa,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Paket	125.051.000	10	Paket	92.544.925	100%	74%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Paket	67.650.000	1	Paket	67.649.420	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
22.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**310.199.700**			**288.684.840**		**93%**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Pepustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**55.164.500**			**33.802.000**		**61%**	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	55.164.500	5	Perpustakaan	33.802.000	100%	61%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**255.035.200**			**254.882.840**		**100%**	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4	Lokus	229.185.000	4	Lokus	229.059.840	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2..23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10	Perpustakaan	25.850.200	10	Perpustakaan	25.823.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				**45.133.700**			**45.080.000**		**100%**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naska Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**				**45.133.700**			**45.080.000**		**100%**	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2	Eksemplar	45.133.700	2	Eksemplar	45.080.000	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**95.046.200**			**87.555.181**		**92%**	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				**95.046.200**			**87.555.181**		**92%**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di**				**32.350.800**			**24.960.636**		**77%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bawah 10 (sepuluh) Tahun								
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	32.350.800	10 Arsip	24.960.636	100%	77%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**			**62.695.400**		**62.594.545**		**100%**	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	5 Desa /Arsip	62.695.400	5 Desa /Arsip	62.594.545	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAH PILIHAN**								
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN**			**13.310.143.820**		**13.197.263.967**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	PERIKANAN										
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.286.560.520**			**1.280.369.942**		**100%**	
3 25 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**				**188.531.000**			**188.531.000**		**100%**	
3 25 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	11.781.000	1	Dok	11.781.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Lap	176.750.000	10	Lap	176.750.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**20.099.300**			**20.093.300**		**100%**	
3 25 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	20.099.300	2	Lap	20.093.300	100%	100%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3 25 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**425.548.700**			**425.343.000**		**100%**	
3 25 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.397.200	1	Paket	55.397.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	24.904.800	1	Paket	24.904.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	7.074.700	1	Paket	7.074.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordnasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Lap	338.172.000	15	Lap	337.968.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**150.000.000**			**149.944.350**		**100%**	
3 25 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	150.000.000	1	Unit	149.944.350	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**38.031.520**			**36.586.000**		**96%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3 25 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	20.711.520	1	Lap	19.266.000	100%	93%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	5.320.000	1	Lap	5.320.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	12.000.000	1	Lap	12.000.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**464.350.000**			**459.872.292**		**99%**	
3 25 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	105.850.000	3	Unit	105.560.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	358.500.000	3	Unit	354.312.292	100%	99%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**9.793.561.950**			**9.701.120.975**		**99%**	
3 25 03 2 01	**Pengelolaan Penangkap Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**9.643.561.950**			**9.551.608.975**		**99%**	**Dinas Perikanan**
3 25 03 2 01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dok	86.650.000	1	Dok	86.650.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 03 2 01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	200	Unit	3.858.645.000	200	Unit	3.777.119.250	100%	98%	Dinas Perikanan
3 25 03 2 01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	300	Unit	5.698.266.950	300	Unit	5.687.839.725	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 03 2 02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**150.000.000**			**149.512.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3 25 03 2 02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1	Kel	150.000.000	1	Kel	149.512.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**1.337.150.000**			**1.327.854.200**		**99%**	
3 25 04 2 04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**1.337.150.000**			**1.327.854.200**		**99%**	
3 25 04 2 04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	100.250.000	1	Dok	100.250.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 04 2 04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	Unit	1.038.900.000	9	Unit	1.030.121.200	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 04 2 04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13	Unit	198.000.000	13	Unit	197.483.000	100%	100%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**892.871.350**		**887.918.850**		**99%**	
3 25 06 2 03	**Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**892.871.350**		**887.918.850**		**99%**	
3 25 06 2 03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	101.321.350	1 Keg	101.321.350	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 06 2 03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	43 Pelaku Usaha	791.550.000	43 Pelaku Usaha	786.597.500	100%	99%	Dinas Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**3.626.762.414**		**3.280.305.569**		**90%**	
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**			**2.896.762.414**		**2.550.343.569**		**88%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22.001.900**			**21.939.100**		**100%**	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	dok	22.001.900	1	dok	21.939.100	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.346.183.114**			**2.055.858.417**		**88%**	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2.319.704.114	1	Tahun	2.055.858.416	100%	89%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	26.479.000	1	dok	1	100%	0%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**363.860.700**			**362.507.490**		**100%**	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	26.518.700	1	Paket	25.926.890	100%	98%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	35.000.000	1	Paket	34.238.600	100%	98%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	302.342.000	1	Lap	302.342.000	100%	100%	Dinas Pariwisata

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**54682500**			**52202151**		**95%**	
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	42.926.200	1	Unit	1	100%	0%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	54.682.500	1	Unit	52.202.150	100%	95%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**85.034.200**			**33.076.084**		**39%**	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	50.642.200	1	Lap	33.076.083	100%	65%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	34.392.000	1	Lap	1	100%	0%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**25.000.000**			**24.760.327**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	25.000.000	1	Unit	24.760.327	100%	99%	Dinas Pariwisata
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**320.000.000**			**320.000.000**		**100%**	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**20.000.000**			**20.000.000**		**100%**	
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3	lokasi	20.000.000	3	lokasi	20.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**300.000.000**			**300.000.000**		**100%**	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	dok	300.000.000	1	dok	300.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN**									**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PARIWISATA			**170.000.000**		**170.000.000**			
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**170.000.000**		**170.000.000**		**100%**	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dok	170.000.000	1 dok	170.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**240.000.000**		**239.962.000**		**100%**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**240.000.000**		**239.962.000**		**100%**	
3.26.05.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	10 orang	240.000.000	10 orang	239.962.000	100%	100%	Dinas Pariwisata

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**16.881.863.709**			**16.881.863.709**		**100%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**			**6.733.272.372**			**6.733.272.372**		**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**1.510.375.900**			**1.510.375.900**		**100%**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	1.510.375.900	1	Lap	1.510.375.900	100%	100%	Dinas pertanian
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.091.156.208**			**4.091.156.208**		**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	4.091.156.208	1	Tahun	4.091.156.208	100%	100%	Dinas pertanian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**441.033.900**			**441.033.900**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 paket	441.033.900	1 paket	441.033.900	100%	100%	Dinas pertanian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**285.202.900**		**285.202.900**		**100%**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	49.575.400	1 paket	49.575.400	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	27.776.400	1 paket	27.776.400	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.005.100	1 paket	15.005.100	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	192.846.000	1 paket	192.846.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**37.500.000**		**37.500.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 paket	37.500.000	1 paket	37.500.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tewujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**194.156.464**		**194.156.464**		**100%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	11.340.000	1 paket	11.340.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 paket	25.186.464	1 paket	25.186.464	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	157.630.000	1 paket	157.630.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**173.847.000**		**173.847.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	153.847.000	1 paket	153.847.000	100%	100%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Terwujudnya Penyediaan Pengembangangan Sarana Pertanian**		**3.676.455.000**		**3.676.455.000**		**100%**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Terwujudnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**2.600.155.000**		**2.600.155.000**		**100%**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terawasinya Pengadaan Colour Sorter (Kapasitas Pengumpanan min	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		500 kg/jam							
		Terawasinya Pembangunan Bangunan UV Drayer (min2 ton/proses ukr. 20mx8m	1 paket	225.000.000	1 paket	225.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 paket	1.732.555.000	1 paket	1.732.555.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 paket	92.600.000	1 paket	92.600.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Populasi Ternak**		**630.000.000**		**630.000.000**		**100%**	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1 paket	480.000.000	1 paket	480.000.000	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksanannya Perjalananan Dinas Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Ternak dan Monitoring Bantuan Peternakan	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Perkebunan yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**446.300.000**		**446.300.000**		**100%**	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 paket	370.000.000	1 paket	370.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terrlaksanannya Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendampingan, MONEV dan Koordinasi Bidang Perkebunan	1 paket	76.300.000	1 paket	76.300.000	100%	100%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Terwujudnya Penyediaan Pengembangangan Prasarana Pertanian**		**5.375.644.337**		**5.375.644.337**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terwujudnya Pengembangan Prasarana Pertanian**		**2.024.999.000**		**2.024.999.000**		**100%**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 paket	2.003.399.000	1 paket	2.003.399.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksananya Pengembangan pertanian pada lahan kering	1 paket	21.600.000	1 paket	21.600.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pertanian**		**3.350.645.337**		**3.350.645.337**		**100%**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terbangun, Irigasi Air Tanah Dangkal	1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	1.643.566.787	1 paket	1.643.566.787	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksanannya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan Bidang Prasarana dan Penyuluhan	1 paket	397.050.000	1 paket	397.050.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	2.883.200	1 paket	2.883.200	100%	100%	Dinas pertanian
		Terciptanya Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Usaha Tani	1 paket	21.000.000	1 paket	21.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksanannya Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Usaha Tani	1 paket	24.000.000	1 paket	24.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksananya Jasa Pendamping Vasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terpeliharanya Pengadaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terciptanya Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual (DAK Penugasan Bidang Pertanian)	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksanannya Pengawasan untuk kegiatan Kontraktual (DAK Penugasan Bidang Pertanian)	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
		Terlaksanannya Perjalalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK Penugasan Bidang	1 paket	97.145.350	1 paket	97.145.350	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pertanian							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Terwujudnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**100.000.000**		**100.000.000**		100%	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam DaerahKabupaten/ Kota	**Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner alam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100%**	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Terwujudnya SDM Penyuluh Pertanian**		**996.492.000**		**996.492.000**		**100%**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terlaksananyan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**		**996.492.000**		**996.492.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 paket	636.242.000	1 paket	636.242.000	100	100	Dinas pertanian
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 paket	360.250.000	1 paket	360.250.000	100	100	Dinas pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**911.507.000**		**911.150.600**		**100**	
3-30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan**		**30.532.000**		**30.531.000**		**100**	
3-30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**		**30.532.000**		**30.531.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		diwilayyah kerjanya							
3-30.03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket	17.091.000	1 paket	17.090.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.03.2.01.002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	13.441.000	2 Pasar	13.441.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pelakuk Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP/pusat pembelanjaan**		**718.800.000**		**718.644.600**		**100%**	
3-30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab. Kota**		**718.800.000**		**718.644.600**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-30.04.2.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Kec	418.800.000	3 Kec	418.800.000	60%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.04.2.02.003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Kec	300.000.000	3 Kec	299.844.600	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya UTTP bertanda tera sah yang berlaku**		**42.800.000**		**42.600.000**		**100%**	
3-30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukut takar timbang dan perlengkapannya UTTP yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan**		**42.800.000**		**42.600.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-30.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1 keg	42.800.000	2 Kec	42.600.000	200%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Tercapainya Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**		**119.375.000**		**119.375.000**		**100%**	
3-30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab. Kota**		**119.375.000**		**119.375.000**		**100%**	
3-30.07.2.01.001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	119.375.000	2 UMKM	119.375.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**2.020.650.000**		**2.013.018.693**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3-31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Ripim yang ditetapkan dalam RPIKI**			**2.011.050.000**			**2.003.418.693**		**100%**	
3-31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda**			**2.011.050.000**			**2.003.418.693**		**100%**	
3-31.02.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5	Dok	9.800.000	4	Dok	9.800.000	80%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-31.02.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	keg	11.000.000	1	keg	11.000.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-31.02.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 keg	1.990.250.000	1 keg	1.982.618.693	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri IUI kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**		**9.600.000**		**9.600.000**		**100%**	
3-31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri IUI kecil dan IUI menengah yang diterbitkan**		**9.600.000**		**9.600.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-31.03.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	9.600.000	10 Rekomendasi	9.600.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**382.371.400**		**382.371.400**		**100%**	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			**118.554.800**		**118.554.800**		**100%**	
2 2 01	**Pencanangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**			**118.554.800**		**118.554.800**		**100%**	
2 2 01 2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Keg	118.554.800	1 keg	118.554.800	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			**54.400.000**		**54.400.000**		**100%**	
	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Satu Daerah Kabupaten Kota			**54.400.000**		**54.400.000**		**100%**	
3 2 01	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	1 Keg	54.400.000	1 keg	54.400.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			**209.416.600**		**209.416.600**		**100%**	
	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian			**209.416.600**		**209.416.600**		**100%**	
3 2 02 01	Penguatan SDM dalam Rangka kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	12 or	65.050.000	12 or	65.050.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 2 02 02	Penguatan Insfrastruktur Sosial,Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam rangka Kemandirian Sastuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Keg	144.366.600	1 keg	144.366.600	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
4.01	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**21.964.251.714**		**21.587.112.927**		**98%**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.964.251.714**		**21.587.112.927**		**98%**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**508.680.000**		**508.680.000**		**100%**	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Orang	508.680.000	28 Orang	508.680.000	100%	100%	Sekretariat Daerah

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**977.130.000**			**976.130.000**			
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	977.130.000	50	Orang	976.130.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**12.238.195.000**			**12.195.010.000**			
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1.125.469.000	5	Paket	1.112.806.000	100%	99%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	291.500.000	8	Paket	290.132.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14268	Dos	513.648.000	13486	Dos	485.500.000	95%	95%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720	Perjalanan	10.307.578.000	720	Perjalanan	10.306.572.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**825.461.664**			**821.813.563**			
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8000	Buah	150.000.000	8000	Paket	150.000.000	100%	100%	Sekretariat Daerah

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Tahun	675.461.664	1	Tahun	671.813.563	100%	99%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.229.238.750**			**2.907.771.157**			
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	483.840.000	14	Unit	483.839.407	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	2.093.760.000	14	Unit	2.092.248.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	651.638.750	1	Unit	331.683.750	50%	51%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**483.840.000**			**483.839.407**			
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	Orang	483.840.000	2	Orang	483.839.407	100%	100%	Sekretariat Daerah

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**3.701.706.300**		**3.693.868.800**			
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Tahun	1.669.056.250	1 Tahun	1.665.296.250	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Tahun	1.321.199.700	1 Tahun	1.319.364.700	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Tahun	711.450.350	1 Tahun	709.207.850	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**6.379.408.900**		**5.654.947.960**		**89%**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.020.125.900**		**5.296.464.960**		**88%**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.604.863.900**		**1.602.632.840**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	372.286.900	3	Unit	371.681.550	100%	100%	Bagian Umum
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Set	1.232.577.000	9	Set	1.230.951.290	100%	100%	Bagian Umum
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.066.693.000**			**1.464.036.550**			
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	914.054.500	9	Unit	312.593.450	90%	34%	Bagian Umum
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Set	1.152.638.500	5	Set	1.151.443.100	100%	100%	Bagian Umum
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.348.569.000**			**2.229.795.570**			
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	Unit	2.348.569.000	4	Unit	2.229.795.570	100%	95%	Bagian Umum
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**359.283.000**			**358.483.000**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**			**359.283.000**		**358.483.000**			
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 dok	359.283.000	1 Tahun	358.483.000	100%	100%	Bagian Umum
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**749.985.200**		**749.899.200**		**100%**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**			**749.985.200**		**749.899.200**		**100%**	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dok	299.988.200	1 dok	299.968.200	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dok	449.997.000	1 dok	449.931.000	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**19.917.317.400**		**19.729.317.100**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**19.917.317.400**		**19.729.317.100**		**99%**	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dok	485.062.400	1 dok	485.062.400		100%	Bagian Kesra Setda
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dok	19.432.255.000	1 dok	19.244.254.700		99%	Bagian Kesra Setda
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**449.991.800,00**		**449.991.800,00**		**100%**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**449.991.800,00**		**449.991.800,00**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000	Orang	449.991.800,00	1000	Orang	449.991.800,00	100%	100%	Bagian Hukum Setda
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**1.745.218.900,00**			**1.742.977.900,00**		**100%**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**1.745.218.900,00**			**1.742.977.900,00**		**100%**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6	Dok	760.179.000,00	5	Dokumen	759.057.000,00	83%	100%	Bagian Hukum Setda
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Kasus	772.809.000,00	1	Kasus	772.809.000,00	100%	100%	Bagian Hukum Setda
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	21	Dok	212.230.900,00	20	Dokumen	211.111.900,00	95%	99%	Bagian Hukum Setda
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**1.733.810.800**			**1.709.289.900**		**99%**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**958.233.200**			**955.280.200**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dok	200.000.000	1	Dok	200.000.000	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Dok	758.233.200	1	Dok	755.280.200	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**775.577.600**			**754.009.700**		**97%**	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	Dok	99.998.300	1	Dok	99.998.300	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dok	675.579.300	1 Dok	654.011.400	100%	97%	Bagian Perekonomian dan SDA
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1.598.979.815**		**1.596.793.375**		**100%**	
	Kegiatan Penataan Organisasi			**1.598.979.815**		**1.596.793.375**		**100%**	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	Persentasi OPD yang menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (Maksimal 31 Maret)	100 %	1.473.551.815	99,98 %	1.473.289.375	100%	100%	Bagian Organisasi - Setda
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah	100 %	125.428.000	98,46 %	123.504.000	98%	98%	Bagian Organisasi - Setda

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Analisis Jabatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**62.880.000**		**62.880.000**		**100%**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	62.880.000	16 Paket	62.880.000	100%	100%	Bagian Protokol Dan KP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			197.160.000		197.160.000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disertakan	1 Paket	197.160.000	1 Paket	197.160.000	100%	100%	Bagian Protokol Dan KP
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			613.750.000		613.750.000			
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	15 Lap	613.750.000	15 Lap	613.750.000	100%	100%	Bagian Protokol Dan KP

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**799.999.100**		**799.356.798**		**100%**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**375.207.900**		**375.206.798**		**100%**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**			**120.207.900**		**120.207.900**		**100%**	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganPerangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kali	120.207.900	2 Kali	120.207.900	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**255.000.000**		**254.998.898**		**100%**	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	255.000.000	7 Unit	254.998.898	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**424.791.200**		**424150000**		**100%**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**424.791.200**		**424.150.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dok	123.761.000	1 dok	123.761.000	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dok	177.112.000	1 dok	176.471.000	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Keg	123.918.200	1 Keg	123.918.000	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**626.817.800**		**500.540.300**			
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**127.563.200**		**111.596.300**			
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			127.563.200		111.596.300			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	127.563.200	3 Paket	111.596.300	100%	87,48%	Bagian Adbang
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**499.254.600**		**388.944.000**			
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**499.254.600**		**388.944.000**			
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	202.700.000	1 Dok	202.700.00	100%	100%	Bagian Adbang
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	296.554.600	1 Lap	186.244.000	100%	62%	Bagian Adbang
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**41.211.785.860**		**39.188.927.203**			
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.686.062.960**		**22.521.076.303**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.364.340.510**			**2.955.505.201**			
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Org	3.330.775.810	34	Org	2.921.940.501	100%	88%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	Lap	33.564.700	16	Lap	33.564.700	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**156.849.000**			**137.287.000**			
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Org	156.849.000	29	Org	137.287.000	97%	88%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.315.623.900**			**3.258.527.300**			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	113.079.600	4	Paket	113.079.600	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	495.866.300	7	Paket	495.224.400	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	279.264.000	3	Paket	224.960.000	100%	81%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	572.333.000	2	Paket	572.324.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	246.943.000	2	Paket	246.682.300	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115 05	Org	414.180.000	114 99	Org	413.964.000	99,9%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Lap	1.193.958.000	85	Lap	1.192.293.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**101.163.600**			**98.830.000**			
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Paket	51.663.600	6	Paket	51.600.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	49.500.000	3	Unit	47.230.000	100%	95%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.530.433.332**			**1.370.679.774**			
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Lap	562.933.332	6	Lap	526.179.774	100%	93%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41	Org	967.500.000	41	Org	844.500.000	100%	87%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.022.953.600**			**921.870.450**			
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Bh	432.953.600	4	Bh	332.170.450	100%	77%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Paket	65.000.000	2	Paket	64.900.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Paket	525.000.000	4	Paket	524.800.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14.194.699.018**			**13.778.376.578**			
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25	Org	13.819.146.518	25	Org	13.516.577.928	100%	98%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	26	Org	250.552.500	26	Org	250.252.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	Org	125.000.000	25	Org	11.546.650	100%	9%	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**17.525.722.900**			**16.667.850.900**			
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**101.440.000**			**93.608.000**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	Dok	81.440.000	3	Dok	77.450.000	100%	95%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	Dok	20.000.000	2	Dok	16.158.000	100%	81%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**185.793.900**			**185.793.900**			
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dok	43.740.000	2	Dok	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dok	43.740.000	2	Dok	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dok	43.740.000	1	Dok	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dok	43.740.000	1	Dok	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	Dok	10.833.900	2	Dok	10.833.900	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**245.850.000**			**241.300.000**			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18	Lap	72.650.000	18	Lap	72.650.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24	Lap	93.125.000	24	Lap	90.750.000	100%	97%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20	Lap	80.075.000	20	Lap	77.900.000	100%	97%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**3.037.656.000**			**2.344.606.000**			
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25	Org	911.742.000	21	Org	794.603.000	84%	87%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	62	Lap	1.467.914.000	62	Lap	1.007.003.000	100%	69%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	10	Dok	100.000.000	10	Dok	90.000.000	100%	90%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	Org	180.000.000	3	Org	75.000.000	100%	42%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	14	Org	378.000.000	14	Org	378.000.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**4.871.121.000**			**4.722.925.000**			
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	175	Lap	1.173.675.000	175	Lap	1.173.300.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150	Lap	3.697.446.000	150	Lap	3.549.625.000	100%	96%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**9.083.862.000**			**9.079.618.000**			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	388	Lap	8.221.405.000	388	Lap	8.217.856.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	105	Lap	862.457.000	105	Lap	861.762.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.01	**PERENCANAAN**			**6.035.193.957**		**5.134.531.491**		**85%**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**4.052.386.332**		**3.558.029.631**		**88%**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.765.017.132**		**2.316.079.137**		**84%**	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	2.735.253.632	39 orang	2.286.315.637		84%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	19.800.000	1 Dok	19.800.000		100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	9.963.500	1 Lap	9.963.500		100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**4.760.000**		**4.760.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	4.760.000	1	Lap	4.760.000		100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**58.000.200**			**58.000.200**		**100%**	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	unit	10.000.200	1	unit	10.000.200		100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	48.000.000	1	Paket	48.000.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**570.420.300**			**569.186.970**		**100%**	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	90.525.600	1	Paket	90.522.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	31.102.300	2	Paket	31.102.300	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	48.921.400	1	Paket	47.793.550	100%	98%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	14.580.000	1 Lap	14.580.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	385.291.000	1 Lap	385.189.120	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**358.100.000**		**335.300.000**		**94%**	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			350.000.000		327.200.000	100%	93%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel			8.100.000		8.100.000	100%	100%	Bappeda Litbang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239.839.700		218.511.324		91%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	81.854.400	1 Lap	60.526.024	100%	74%	Bappeda Litbang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	7.100.000	1 Lap	7.100.000	100%	100%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	150.885.300	1 Lap	150.885.300	100%	100%	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.249.000		56.192.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	34.560.000	1 unit	34.560.000	100%	100%	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	21.689.000	1 unit	21.632.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.452.198.375**		**1.048.560.050**		**72%**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**557.233.500**		**556.383.550**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	25.146.800	1 BA	25.146.800	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	62.909.000	1 BA	62.909.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	153.864.600	1 BA	153.614.600	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan	99.587.700	15 Usulan	98.987.750	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	2 dok	215.725.400	2 dok	215.725.400	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**594.964.875**		**194.726.500**		**33%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 keg	399.999.900	1 Keg	396.299.900	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.02	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	65 Buku	194.964.975	65 Buku	194.726.500	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**300.000.000**		**297.450.000**		**99%**	
5.01.02.2.02.04	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Lap	300.000.000	15 Lap	297.450.000	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**530.609.250**		**527.941.810**		**99%**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan**			**100.004.750**		**99.134.750**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Manusia								
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 lap	100.004.750	1 lap	99.134.750	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**100.130.900**		**100.130.900**		**100%**	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	100.130.900	1 dok	100.130.900	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**330.473.600**		**328.676.160**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	158.764.000	1 dok	158.764.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	79.909.900	1 Lap	78.112.460	100%	98%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	91.799.700	1 dok	91.799.700	100%	100%	Bappeda Litbang
5.02	**KEUANGAN**			**249.807.923.169**		**82.327.806.223**		**33%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			**8.048.874.578**		**7.076.682.702**		**88%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	KABUPATEN / KOTA										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.443.035.578**			**3.992.147.534**		**90%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Keg	4.183.178.078	1	Keg	3.738.831.634	100%	89%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	174.235.500	1	Dok	167.943.900	100%	96%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	85.622.000	1	Lap	85.372.000	100%	100%	BPPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**241.400.000**			**67.250.000**		**28%**	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1	Dok	71.400.000	1	Dok	67.250.000	100%	94%	BPPKAD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi dan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Keg	170.000.000	1	Keg	-	100%	0%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah				**1.126.764.600**			**974.066.100**		**86%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.049.000	1	Paket	24.049.000	100%	83%	BPPKAD
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.812.000	1	Paket	75.042.000	100%	74%	BPPKAD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	148.058.100	1	Paket	148.029.500	100%	100%	BPPKAD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	206.774.500	1	Paket	206.646.600	100%	100%	BPPKAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	111.600.000	1	Lap	111.400.000	100%	100%	BPPKAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	530.471.000	1	Lap	408.899.000	100%	77%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.002.164.400**			**880.591.704**		**88%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	536.267.200	1	Lap	414.694.504	100%	77%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	465.897.200	1	Lap	465.897.200	100%	100%	BPPKAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.235.510.000**			**1.162.627.364**		**94%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	361.510.000	2	unit	317.940.000	100%	88%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Pelmeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	22	Unit	24.000.000	22	Unit	17.761.864	100%	74%	BPPKAD
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Gedung	850.000.000	1	Gedung	826.925.500	100%	97%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**238.986.365.141**			**72.544.562.521**		**30%**	**BPPKAD**
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah				**2.260.530.000**			**2.158.615.000**		**95%**	**BPPKAD**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	33	Dok	235.523.500	33	Dok	235.523.500	100%	100%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	33	Dok	195.313.500	33	Dok	192.713.500	100%	99%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Keg	9.900.000	1	Keg	9.900.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubhana RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Keg	9.900.000	1	Keg	8.800.000	100%	89%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	Keg	19.800.000	1	Keg	19.800.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	Keg	19.800.000	1	Keg	19.800.000	100%	100%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	90	Dok	594.711.000	90	Dok	587.861.000	100%	99%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	90	Dok	644.072.000	90	Dok	593.559.000	100%	92%	BPPKAD
	koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dok	472.110.000	1	Dok	432.458.000	100%	92%	BPPKAD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Keg	29.700.000	1	Keg	29.700.000	100%	100%	BPPKAD
	Koordiinasi Perencanaan Anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Keg	29.700.000	1	Keg	28.500.000	100%	96%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan				**664.839.500**			**652.554.500**		**98%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Daerah										
	Koordinasi dan Pengelolaan KAS Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	Dok	144.898.900	1	Dok	142.173.900	100%	98%	BPPKAD
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan efaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	Dok	98.666.600	1	Dok	96.386.600	100%	98%	BPPKAD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran KAS Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan [pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dok	421.274.000	1	Dok	413.994.000	100%	98%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				**864.273.100**			**857.252.350**		**99%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Lap	364.006.500	1	Lap	363.327.750	100%	100%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Keg	500.266.600	1	Keg	493.924.600	100%	99%	BPPKAD
	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah				**234.754.964.541**			**68.567.698.671**		**29%**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Keg	211.776.357.268	1	Keg	56.042.498.671	100%	26%	BPPKAD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Keg	22.978.607.273	1	Keg	12.525.200.000	100%	55%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				**441.758.000**			**308.442.000**		**70%**	**BPPKAD**
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	1	Keg	441.758.000	1	Keg	308.442.000	100%	70%	BPPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**1.792.799.300**			**1.755.583.100**		**98%**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				**1.792.799.300**			**1.755.583.100**		**98%**	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang di Susun	1	Dok	246.703.200	1	Dok	246.203.200	100%	100%	BPPKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Lap	216.911.900	1	Lap	180.272.900	100%	83%	BPPKAD
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Lap	1.329.184.200	1	Lap	1.329.107.000	100%	100%	BPPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**979.884.150**			**950.977.900**		**97%**	
	Pegelolaan Pendapatan Daerah				**979.884.150**			**950.977.900**		**97%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokuemen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dok	87.730.600	1	Dok	87.530.600	100%	100%	BPPKAD
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah, Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dok	47.631.750	1	Dok	41.425.500	100%	87%	BPPKAD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Paket	377.783.700	1	Paket	367.083.700	100%	97%	BPPKAD
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Lap	49.999.300	1	Lap	48.799.300	100%	98%	BPPKAD
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Lap	49.438.800	1	Lap	49.438.800	100%	100%	BPPKAD
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah di Lakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Lap	21.600.000	1	Lap	21.600.000	100%	100%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	Dok	345.700.000	1	Dok	335.100.000	100%	97%	BPPKAD
5,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN**				**2.528.578.200**			**1.868.267.200**		**74%**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**2.528.578.200**			**1.868.267.200**		**74%**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**441.756.700**			**351.874.700**		**80%**	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	699	formasi	220.854.200	280	formasi	131.027.200	40%	59,33%	BKPSDM
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	50	berkas	158.428.900	50	berkas	158.373.900	100%	99,97%	BKPSDM
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1	dok	62.473.600	1	dok	62.473.600	100%	100%	BKPSDM
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**				**1.402.531.500**			**854.912.500**		**61%**	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	800	berkas	352.531.500	800	berkas	352.531.500	100%	100%	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	9 orang	1.050.000.000	9 orang	502.381.000	100%	47,85%	BKPSDM
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**			**684.290.000**		**661.480.000**		**96,67%**	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	29 orang	684.290.000	29 orang	661.480.000	100%	96,67%	BKPSDM
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**1.966.764.200**		**1.966.544.200**		**99,99%**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**1.966.764.200**		**1.966.544.200**		**100%**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			**880.067.700**		**879.847.700**		**100%**	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	18 orang	880.067.700	18 orang	879.847.700	100%	99,98%	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang Disusun							
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pemgembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.086.696.500		1.086.696.500		100,00 %	
5.04.02.2.02.01	Penyusunan kebijakan teknis dan Rencana Sertifikasi Kompentesi Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga pengembang kopetensi, sumber belajar,kerjasama,pengembangan kompetensi pimpinan daerah,jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, sertajabatan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	113 orang	1.086.696.500	113 orang	1.086.696.500	100%	100%	BKPSDM
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**3.980.076.032**		**3.964.566.032**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
6.01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**972.193.532**			**972.163.132**		**100%**	
6.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**55.440.000**			**55.440.000**		**100%**	
6.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dok	55.440.000	14	Dok	55.440.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**42.600.000**			**42.600.000**			
6.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	42.600.000	4	orang	42.600.000	80%	100%	Inspektorat
6.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**700.439.100**			**700.438.700**			
6.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	85.253.300	3	paket	85.253.300	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06.06	Belanja cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	28.111.800	2	paket	28.111.800	100%	100%	Inspektorat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	64.460.000	12 bulan	64.460.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 LHP	522.614.000	12 LHP	522.613.600	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			**173.714.432**		**173.684.432**			
6.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	26.754.432	12 Bulan	26.754.432	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	129.680.000	12 Lap	129.650.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.332.729.500**		**2.317.429.900**			
6.01.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			**2.332.729.500**		**2.317.429.900**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan kinerja pemerintah daerah (Reguler SKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	LHP	687.208.700	40	LHP	687.208.700	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan pemerintah daerah (Penutupan Kas /uang lembur)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	BAP	373.448.000	40	BAP	373.448.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja (Reviu LPPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5	LHR	65.148.000	5	LHR	65.148.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan (Reviu LKPD, Reviu PBJ & Reviu DAK)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20	LHR	76.650.000	20	LHR	76.650.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	198	LHP	487.697.500	198	LHP	480.301.000	100%	98%	Inspektorat
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Dok	300.978.300	4	Dok	293.075.200	100%	97%	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	45	LHP	341.599.000	45	LHP	341.599.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**675.153.000**			**674.973.000**		**100%**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**				**675.153.000**			**674.973.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.03.2.02.03	koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 keg	201.900.000	4 keg	201.900.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 OPD	473.253.000	38 OPD	473.073.000	95%	100%	Inspektorat
8,01	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**4.634.304.743**		**4.625.648.043**		**100%**	
8,01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**578.846.000**		**570.351.000**		**99%**	
8,01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**15.000.000**		**15.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
8,01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	15.000.000	3	Dok	15.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8,01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.000.000**			**10.000.000**		**100%**	
8,01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dok	10.000.000	4	Dok	10.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**384.957.000**			**383.654.500**		**100%**	
8.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan	20.000.000	12	Bulan	19.962.100	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.06.06	Belanja cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	11.000.000	12	Bulan	10.112.400	100%	92%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	353.957.000	12	Bulan	353.580.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
8.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**32.265.000**			**31.220.000**		**97%**	
8.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	32.265.000	1	Unit	31.220.000	100%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**66.224.000**			**60.076.500**		**91%**	
8.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	6.750.000	12	Bulan	6.740.400	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	19.474.000	12	Bulan	13.345.900	100%	69%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	40.000.000	12	Bulan	39.990.200	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**38.500.000**			**38.500.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
8.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	34.560.000	1	Unit	34.560.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	3.940.000	8	Unit	3.940.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.2.13	**Penataan Organisasi**				**31.900.000**			**31.900.000**		**100%**	
8.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	orang	31.900.000	3	orang	31.900.000	100%		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**35.000.000**			**35.000.000**		**100%**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**35.000.000**			**5.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Kec	35.000.000	2 Kec	35.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**829.143.043**		**29.143.043**		**100%**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,**			**829.143.043**		**29.143.043**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	serta Pemantauan Situasi Politik								
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dok	579.143.043	1 Dok	579.143.043	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Lap	250.000.000	1 Lap	250.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**2.061.154.000**		**2.061.154.000**		**100%**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**2.061.154.000**		**2.061.154.000**		**100%**	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Kec	106.154.000	4 Kec	106.154.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32	OKP	1.955.000.000	32	OKP	1.955.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**400.161.700**			**400.000.000**		**100%**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**400.161.700**			**400.000.000**		**100%**	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	5	Kec	150.161.700	5	Kec	150.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah	Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Kec	250.000.000	10 Kec	250.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**730.000.000**		**730.000.000**		**100%**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**730.000.000**		**730.000.000**		**100%**	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	Kec	65.000.000	5	Kec	65.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	9	Kec	150.000.000	9	Kec	150.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022			Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		di Daerah									
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	Kec	250.000.000	10	Kec	250.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	15	Kec	205.000.000	15	Kec	205.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2022		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2022 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2022 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah	Penanganan Konflik di Daerah							
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan.

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2022, beberapa permasalahan pembangunan daerah yang masih harus dituntaskan adalah sebagai berikut :

1. **Belum Optimalnya Akselerasi Sumber Daya Ekonomi Unggulan Dan Potensial**, yang disebabkan oleh:
   a) Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian;
   b) Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan;
   c) Belum Optimalnya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan Strategis;
   d) Belum Optimalnya Tata Kelola Perdagangan;
   e) Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata;
   f) Belum Optimalnya Penanaman Modal;
   g) Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil;

2. **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia terkait dengan rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Seram Bagian Timur yang berada pada peringkat ke 8 (delapan) se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, serta tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka prevelensi stunting.

3. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Masih tingginya kesenjangan ekonomi dan perbedaan kemampuan ekonomi antar daerah. Rendahnya tingkat kesejahteraan, terlihat dari masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperkotaan dan kemiskinan diperdesaan.

4. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar publik serta konektivitas antardaerah (pusat-pusat pertumbuhan daerah) khususnya desa-desa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kabupaten. Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan urusan yang menyangkut dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Terhadap masalah Urusan Pendikan, (masih) terdapat sejumlah permasalahan diantaranya :

a. Ketersediaan tenaga pendidik belum merata, dimana rasio murid-guru yang belum ideal untuk semua jenjang pendidikan.
b. Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai, dapat dilihat masih ada kondisi ruang kelas yang rusak sedang/berat, selain itu

masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah.

c. Masih kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan termasuk proses pendaftaran akreditasi dan/atau reakreditasi kelembagaan;
d. Penyelesaian pendidikan kesetaraan yang masih perlu ditingkatkan;
e. Penguatan Digitalisasi Sekolah;
f. Penguatan Assesmen Kopentensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kopetensi siswa membaca, sains, dan matematika;
g. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan; dan
h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berkentrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pada Urusan Kesehatan, antara lain :

a. Masih terdapat Fasyankes milik pemerintah (Puskesmas/RSUD) yang belum terpenuhi jumlah tenaga kesehatan sesuai standard;
b. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah yang perlu terus ditingkatkan termasuk perumusan standar penyelenggaraan kesehatan daerah;
c. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap Pandemi Covid-19 untuk peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan; dan
d. Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

a. Masih belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya infrastruktur pengendalian banjir;
c. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog;
d. Belum optimalnya pelaksanaan konsilidasi tanah;
e. Belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh;
f. Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang; dan
g. Masih belum optimalnya pengaturan terhadap kawasan strategis cepat tumbuh.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain :

a. Masih adanya kondisi Rumah Tidak Layak Huni;
b. Masih terbatasnya sinergi dan integrasi penanganan kawasan kumuh;
c. Masih perlunya pembenahan dan/atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
d. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana seperti halnya penyediaan air bersih, sanitasi dan untuk beberapa wilayah yang rentan bencana (banjir, abrasi dan gempa) untuk bangunan yang sesuai dengan standar bencana;
e. Meningkatnya potensi bencana alam dan proses alih fungsi lahan serta pemenuhan standar lingkungan permukiman terutama dikawasan konservasi (manggrove dan sepan dan sungai/pantai); dan

f. Perlu adanya pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan kawasan sesuai dengan arahan dan pemanfatan ruang dan kawasan sesuai dengan RTRW.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat

Permasalahan pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

a. Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
b. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; dan
c. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku.

6. Urusan Sosial

Permasalahan di Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
b. Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejateraan sosial dan pelayanan sosial; dan
c. Ketersediaan data dan informasi terkait dengan PMKS.

B. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan di Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

a. Masih diperlukan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan menejemen usaha, permodalan dan pemasaran;
b. Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

2. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah; dan
b. Masih perlunya peningkatan sistim pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional.

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada UrusanKepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Kurang meratanya sarana dan prasarana olah raga yang tersedia (dan dalam kondisi baik), terutama pada kampung kampung; dan
b. Perlunya peningkatan olah raga pendidikan dan prestasi serta pencarian bakat olah raga.
c. Perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya kepemudaan untuk peningkatan pendidikan karakter dan budaya lokal daerah;
d. Perluya peningkatan program progam pembinaan kepemudaan sesuai dengan karakter kebangsaan dan budaya lokal atau kearifan masyarakat.
e. Perlunya meningkatkan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda dalam program pemberdayaan masyarakat.
f. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok pemuda; dan
g. Pelibatan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam pengawasan dana desa.

4. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

a. Perlunya indetifikasi dan pengembangan kawasan sejarah/ budaya yang ada di daerah;
b. Perlu adanya pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah;
c. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan;
d. Perlunya penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah
e. Perlunya pemenuhan standar pelayanan dalam pengelolaan dan/atau pengembangan kawasan sejarah/budaya sebagai media/sarana edukasi bagi masyarakat, memperkokoh jati diri bangsa dan budaya lokal masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
f. Revitalisasi bangun dan/atau kawasan budaya sejaran masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat; dan
b. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.

6. Urusan Kearsipan

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan; dan
b. Implementasi pengelolaan arsip digital.

7. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan pada Urusan koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

a. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendah minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi;
b. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk produk lokal;
c. Perlunya peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan potensi unggulan lokal daereah; dan
d. Kurangnya penguatan terhadap entrepreneurship maupun pengetahuan manejemen usaha yang dimiliki UKMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

8. Urusan Statistik

Permasalahan pada Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral dikarenakan belum optimalnya data terstruktur yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan terinput sesuai jadwal update pada portal satu data.
b. Masih minimnya kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan, sehingga data yang dimiliki tidak tersusun rapi dan tidak tercatat dengan baik;
c. Perlunya penguatan menuju implementasi Satu Data baik terhadap perencanaan maupun hasil pembangunan; dan
d. Perlunya validasi data dan akurasi data dan penggunaan digital data.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Masih kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan anak dan perempuan;
b. Pemberdayaan perempuan disektor ekonomi belum sepenuhnya optimal; dan

c. Perlunya peningkatan partisipasi perempuan.

10. Urusan Pangan

Permasalahan pada Urusan pangan adalah sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan ketahanan pangan masyarakat terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk pemanfaatan pangan lokal daerah;
b. Perlu peningkatan Pola Pangan Harapan(PPH); dan
c. Perlu inventasirasi ahli fungsi lahan untuk implementasi program Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

11. Urusan Pertanahan

Permasalahan pada UrusanPertanahan adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan proses pengumpulan dan verifikasi data;
b. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar papan, patok karena masih belum jelas batas dan kelengkapan administrasi lainnya; dan
c. Perlunya adanya koordinasi dan kerjsama dalam pengaturan terkait dengan Hak Ulayat dan Penegasan Batas Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

12. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Masih diperlukan upaya mengoptimalkan ketersediaan dan/atau fungsi Ruang Terbuka Hijau;
b. Masih terbatasnya fasiltias pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R (system pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompas yang lebih efektif dan efisien);

c. Masih memerlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kersihan dan lingkungan; dan
d. Perlu adanya Manejemen Pengelolaan Lingkungan (Upaya Terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup).

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada UrusanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan KK/KTP;
b. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
c. Perlunya pengawasan terhadap SOP dalam memproses dokumen administrasi kependudukan pada semua kecamatan; dan
d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk dukungan saran dan prasarana dibidang pelayanan yang masih belum optimal (kurang).

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a. Masalah penguatandan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa;
b. Penataan Desa dan Desa Adat;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desadan pengawasan terhadap dana desa;
d. Penguatan kerjasama dengan APH dan APIP dalam rangka pengawasan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa;
e. Mendorong percepatan dan penyelesaian Hak Hak Masyarakat Hukum Adat melalui konsolidasi pertanahan untuk hak hak ulayat dan petuanan;

f. Mendorong pemberdayaan masyarakat desa untuk penguatan ketahanan pangan dan produk unggulan desa;
g. Pembentukan Desa Wisata.
h. Penataan pemeritahan desa untuk penyiapan Desa Adat, Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Kreatif, Desa Sadar Hukum, Desa Keluarga Berencana (KB), Desa Literasi, dan Desa Tanggap Bencana
i. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan kepada desa dan perangkat perangkat desa;
j. Optimalisasi pengembangan potensi desa dan produk unggulan desa;
k. Peningkatan Indeks Pembangunan Desa; dan
l. Penguatan kapasitas aparatur (perangkat) desa dalam penyusunan dokumen perencanan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Perlu adanya antisipasi terhadap dampak bonus demografi khususnya bagi kelompok usia produktif dan kelompok usia lanjut;
b. Perlunya peningkatan jumlah Kader KB yang berkualtias;
c. Perlunya penguatan program KB dan Keluarga Sejahtera bagi remaja dan siswa sekolah; dan
d. Perlunya adanya sosialisasi bagi pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan yang tidak terpenuhi kebutuhan KB.

16. Urusan Perhubungan

Permasalahan pada UrusanPerhubungan adalah sebagai berikut:

a. Perlu adanya peningkatan layanan di bidang perhubungan khususnya Terminal;
b. Perlunya pembentukan UPTD Terminal untuk memaksimalkan fungsi dan pelayanan bagi masyarakat;

c. Perlu adanya peningkatan fasiltias kelengkapan jalan serta sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan;
d. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan angkutan moda transportasi perairan dan/atau pulau; dan
e. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan/atau antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan infromatika adalah sebagai berikut:

a. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta jaringan utilitas untuk menjaga sistim informasi perkotaan;
b. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Sistim Satu Data dan Satu Peta; dan
c. Perlunya mengalokasikan anggaran untuk membangun Aplikasi (Industri 4.0) yang dapat menampung data skala kabupaten yang hasil pengelolaanya biasa digunakan untuk berbagai kepetingan (informasi pembangunan daerah, investasi dan penanaman modal).

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada Urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan;
b. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
c. Belum optimalnya alokasi pemilihan jenia ikan, produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap;

d. Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
e. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan;
f. Perlu perhatian terhadap pengembangan dan pengelolaan wisat pantai dan bahari;
g. Perlunya pembatasan waktu daerah tangkap terutama ikan julung yang ada pada wilayah pesisir;
h. Perlu adanya manejemen terhadap sumber daya perairan;
i. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM para tenaga pendamping/penyuluh dan nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk budidaya dan pengelolaan;
j. Pendampingan dan penguatan terhadap budidaya rumput laut serta usaha pengelolaannya; Optimalisasi dan peningkatan invesatasi dalam pengelolaan potensi perikanan;
k. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan termasuk pengembangan wisata bahari;
l. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan serta belum optimalnya pengelolaan produk unggulan hasil perikanan;
m. Belum maksimalnya peranan kelembagaan perikanan; dan
n. Belum optimalnya pengembangan perencanaan pembangunan berbasis pulau/kepulauan dan/ atau gugus pulau termasuk dalam menghadap implementasi Lumbung Ikan Nasional;

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada UrusanPariwisata adalah sebagai berikut:

a. Perlunya inovasi untuk memaksimalkan potensi wisata lokal daerah dan mengantisipasi menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan Pandemi Covid-19;
b. Perlunya menguatkan dan/atau menggerakan kembali Desa Wisata dan Desa Budaya;

c. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
d. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif; dan
e. Kurangnya promosi pariwisata yang sinergi dan lemahnya manajemen tata kelola daya tarik wisata.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan pada UrusanPertanian adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian;
b. Belum optimalnya produksi dasn produktivitas pertanian;
c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian;
d. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat;
e. Masih rendahnya pola kemitraan kelembagaan petani dan/atau pengembangan usaha pertanian;
f. Masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
g. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
h. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura; dan
i. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan UrusanPerdagangan adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya;

b. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasisecara optimal;
c. Masih diperlukan penerapan protocol kesehatan sector perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal; dan
d. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran.

D. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

1. Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
b. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
c. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas wilayah terutama akibat kondisi pandemi covid-19 karena diperlukan koordinasi intensif dan pengecekan lapangan bersama dengan masyarakat;
d. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat;
e. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik sesuai standar; dan
f. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.

2. Urusan Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan prencanaan pembangunan adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
b. Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;
c. Perlu menerapkan e-government dan SIPD yant terintegrasi;
d. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan;
e. Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan
f. Belum optimalnya komponen pengukuran kinerja disebabkan kurang efektifnya koordinasi perencanaan dengan Bappeda Kabupaten/Kota, keselarasan antar Kementerian dan kebijakan Kementerian yang kurang konsisten serta kurangnya SDM terhadap urusan perencanaan; dan
g. Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data.

3. Urusan Keuangan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
b. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan.
c. Belum optimalnya manajemen aset daerah.

4. Urusan Pengawasan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
b. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
c. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.
d. Perlunya peningkatan pengawasan internal pemerintah daerah (APIP) dalam kerangka pengawasan dana desa dan penyelenggaran pemerintahan desa;
e. Perlunya pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibakan stakeholder pembangunan;
f. Peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum;
g. Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai;
h. Perlunya penguatan kapasitas APIP; dan
i. Perlunya penyusunan instrument pengawasan dan SOP pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Urusan Kepegawaian

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. Masih belum terbangunnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan instansi pusat.
b. Belum optimalnya penerapan sistem merit dan pengsian jabatan JPT yang masih diisi oleh Pjs;
c. Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai;

d. Perlu adanya pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyusunan road map reformasi birokrasi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur juga mengacu pada perencanaan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Seram Bagian Timur, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektorsektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran

yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 berikut karakteristiknya serta kondisi perekonomian tahun 2018-2022, dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagai acuan dalam penentuan prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan, agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuaidengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional

dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha

merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tercatat sebesar 3.638,14 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.047,51 miliar rupiah atau mengalami kontraksi 4,10 % dari tahun sebelumnya. Indeks Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Implisit Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2022 sebesar 177,69%. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar III.1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2018–2022

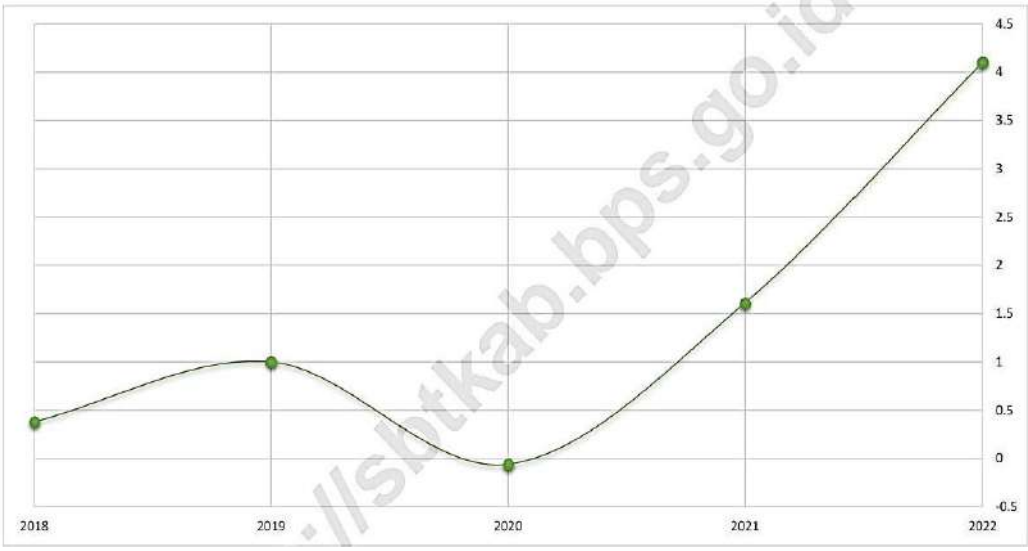

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 460,43 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 3,18 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa kategori lapangan usaha dan adanya kenaikan harga. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 1,97 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,05 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini dipicu oleh perbaikan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha dibandingkan tahun 2021. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,61 persen menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2018-2022

	Lapangan Usaha *Industry*	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *Agriculture, Forestry, and Fishing*	763,65	806,87	854,42	883,97	988,50
B	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	819,85	756,84	704,04	843,46	1 048,75
C	Industri Pengolahan *Manufacturing*	46,52	47,58	47,10	48,30	56,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity and Gas*	0,41	0,43	0,45	0,49	0,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	1,74	1,79	1,88	1,99	2,13
F	Konstruksi *Construction*	204,21	212,78	214,98	232,20	251,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	203,13	214,49	213,28	232,31	265,39
H	Transportasi dan Pergudangan *Transportation and Storage*	79,53	83,98	79,18	85,27	99,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum *Accommodation and Food Service Activities*	13,64	14,36	14,42	15,11	16,90
J	Informasi dan Komunikasi *Information and Communication*	16,70	17,64	18,29	19,59	21,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi *Financial and Insurance Activities*	44,64	49,39	53,87	59,66	65,87
L	Real Estat *Real Estate Activities*	10,13	10,32	10,36	10,63	11,22
M,N	Jasa Perusahaan *Business Activities*	3,72	3,90	3,91	4,13	4,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	464,32	496,52	506,60	539,25	583,01
P	Jasa Pendidikan *Education*	67,98	71,24	71,55	75,25	81,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Human Health and Social Work Activities*	67,89	71,90	75,93	81,29	90,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya *Other Services Activities*	42,20	44,35	43,81	44,81	49,69
Produk Domestik Regional Bruto *Gross Regional Domestic Product*		**2 850,26**	**2 904,40**	**2 914,08**	**3 177,71**	**3 638.14**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan untuk PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.047,51 miliar rupiah atau mengalami kontraksi 4,10 % dari tahun sebelumnya, hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2018-2022

	Lapangan Usaha *Industry*	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *Agriculture, Forestry, and Fishing*	503,42	526,64	546,25	561,14	601,14
B	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	589,99	547,77	534,43	507,84	491,11
C	Industri Pengolahan *Manufacturing*	28,08	28,44	27,72	28,08	31,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity and Gas*	0,31	0,32	0,34	0,36	0,37
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	1,52	1,55	1,61	1,68	1,74
F	Konstruksi *Construction*	121,08	125,66	124,69	132,79	139,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	141,16	145,67	140,16	150,01	162,52
H	Transportasi dan Pergudangan *Transportation and Storage*	55,13	57,49	52,84	54,29	57,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum *Accommodation and Food Service Activities*	8,62	9,00	8,85	9,23	10,01
J	Informasi dan Komunikasi *Information and Communication*	14,71	15,34	15,49	16,20	17,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi *Financial and Insurance Activities*	29,58	32,15	35,29	36,91	37,09
L	Real Estat *Real Estate Activities*	7,32	7,43	7,42	7,56	7,86
M,N	Jasa Perusahaan *Business Activities*	3,05	3,16	3,12	3,25	3,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	290,62	307,79	307,68	322,21	341,40
P	Jasa Pendidikan *Education*	50,12	52,22	52,07	54,13	57,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Human Health and Social Work Activities*	45,13	47,38	49,60	52,62	56,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya *Other Services Activities*	27,83	28,86	28,24	28,56	30,49
Produk Domestik Regional Bruto *Gross Regional Domestic Product*		**1 917,69**	**1 936,88**	**1 935,79**	**1 966,86**	**2 047,51**

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

https://sbtkab.bps.go.id

3.1.3 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Sturktur ekonomi itu sendiri pada dasarnya akan berubah seiring dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Perubahan yang direnacakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi akan tergambar jelas dalam sturuktur ekonomi yang dihasilkan. Struktur ekonomi itu sendiri terjadi akibat dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang sedang direncanakan pemerintah tentunya diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan dari pembangunan ekonomi adalah dapat berlangsung secara terus menerus dan bergerak dengan dinamis. Untuk menjadikan harapan itu dapat tercipta dan terealisasikan dengan baik membutuhkan terobosan dan perencanaan yang tepat dalam perputaran ekonomi.

Dewasa ini, identitas pembangunan yang dimunculkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan yang dilakasanakan secara tepat dan konsisten nantinya akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi inilah yang akan memunculkan transformasi struktural, yang mana merupakan prasasyarat penanggulangan kemiskinan.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018 - 2022) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022 berikut:

Tabel III.3. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	26.79	27.78	29.32	27.82	27.17
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	28.76	26.06	24.16	26.54	28.83
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1.63	1.64	1.62	1.52	1.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F	Konstruksi/*Construction*	7.16	7.33	7.38	7.31	6.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	7.13	7.39	7.32	7.31	7.29
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	2.79	2.89	2.72	2.68	2.75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	0.48	0.49	0.49	0.48	0.46
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0.59	0.61	0.63	0.62	0.59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1.57	1.70	1.85	1.88	1.81
L	Real Estat/Real Estate Activities	0.36	0.36	0.36	0.33	0.31
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	16.29	17.10	17.38	16.97	16.02
P	Jasa Pendidikan/Education	2.38	2.45	2.46	2.37	2.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2.38	2.48	2.61	2.56	2.50
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1.48	1.53	1.50	1.41	1.37
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Seram Bagian Timur pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 27,17 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 28,83 persen. Persentase terbesar ketiga dihasilkan oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,02 persen. Bila dilihat lagi secara kontribusi, penyumbang terbesar ke empat dalam perekonomian Seram Bagian Timur adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,29 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi, sebesar 6,90 persen. Jika dikelompokan dalam 2 lapangan usaha (barang dan jasa), maka stuktur perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha barang yaitu sebesar 71,82 persen; sedangkan untuk lapagan usaha jasa hanya sebesar 28,18 persen.

3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB Seram Bagian Timur mencapai 4,10 persen; sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Seram Bagian Timur adalah 1,61 persen dan tahun 2020 terkontraksi 0,06 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 di kabupaten Seram Bagian Timur selama tiga tahun terakhir. Hampir seluruh kategori Lapangan usaha pada tahun 2022 ini bertumbuh positif. Kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi hanya kategori pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 3,30 persen. Sedangkan untuk kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan, dapat diurutkan dari pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,31 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,48 persen, dan kategori Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju pertumbuhan 8,34 persen.

Tabel III.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2018-2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry and Fishing*	5.68	4.61	3.72	2.73	7.13
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	-10.79	-7.16	-2.44	-4.97	-3.30
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	4.63	1.28	-2.52	1.28	13.31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	7.16	3.76	4.18	5.71	4.64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	4.62	2.44	3.83	4.01	3.59
F	Konstruksi/*Construction*	7.04	3.78	-0.77	6.50	4.94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	8.40	3.20	-3.79	7.03	8.34
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	6.42	4.26	-8.08	2.74	5.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	3.10	4.39	-1.64	4.29	8.48
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5.47	4.30	1.01	4.60	7.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3.21	8.71	9.74	4.61	0.48
L	Real Estat/Real Estate Activities	1.70	1.15	-0.18	1.87	4.02
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1.79	3.63	-1.32	4.04	6.75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7.18	5.91	-0.04	4.72	5.96
P	Jasa Pendidikan/Education	6.50	4.18	-0.30	3.95	6.31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5.30	5.00	4.69	6.08	8.17
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	4.32	3.72	-2.14	1.14	6.75
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	0.38	1.00	-0.06	1.61	4.10

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

3.1.5 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala

atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Seram Bagian Timur (ADHB) mencapai 25,93 juta Rupiah. PDRB Perkapita di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022) mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 besarnya PDRB perkapita Seram Bagian Timur adalah 25,55 juta rupiah selanjutnya meningkat menjadi 22,66 juta rupiah di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 25,96 juta rupiah. Tahun 2021 PDRB per kapita Seram Bagian Timur mengalami penurunan dan kembali meningkay di tahun 2022 mencapai 25,93 juta rupiah. Secara rata-rata besarnya PDRB perkapita Seram Bagian Timur dalam periode lima tahun terakhir tercatat sebesar 24,07 juta rupiah.

Tabel III.5. PDRB dan PDRB Perkapita
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB/ at current price	2.850,26	2.904,40	2.914,08	3.177,71	3.638,14
- ADHK/ at 2010 Constant Price	1.917,69	1.936,88	1.935,79	1.966,86	2.047,51
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	25.546,13	25.661,76	25.964,55	23.172,48	25.936,53
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.187,79	17.113,30	17.247,95	14.342,75	14.596,81
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-1,04	1,85	-18,20	-0,67	1,80
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ *Population (Thousand People)*	113.180	112.233	137.133	140.271	143.438
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ *Population Growth (Percent)*	1,44	-0,84	22,19	2,29	2,26

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

3.1.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru,

SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut. Secara total, PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2022 mengalami peningkatan 14,49 persen. Nilai PDRB yakni dari 3.177,71 miliar rupiah (2021) menjadi 3.638,14 miliar rupiah di tahun 2022. Besaran nilai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lembaga non profit, pemerintah, investasi dan ekspor impor keluar wilayah maupun luar negeri.

Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, PDRB Seram Bagian Timur tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 4,10 persen dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai PDRB sebesar 1.966,86 miliar rupiah (2021) menjadi 2.047,51 miliar rupiah (2022). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan produksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada periode tahun 2018-2022 PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur ADHB meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 2.850,26 miliar rupiah (2018); 2.904,40 miliar rupiah (2019); 2.914,08 miliar rupiah (2020); 3.177,71 miliar rupiah (2021) dan 3.638,14 miliar rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Grafik 1 berikut ini:

Tabel III.6. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.612,12	1.714,51	1.765,02	1.842,24	2.024,91
2. Konsumsi LNPRT	40,58	44,78	47,95	51,36	57,61
3. Konsumsi Pemerintah	1.138,94	1.486,98	1.266,19	1.385,46	1.362,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.035,50	1.122,51	1.140,32	1.299,80	1.318,53
5. Perubahan Inventori	17,07	18,33	19,31	19,13	19,88
6. Ekspor	1.014,05	403,03	199,83	242,23	366,29
7. Impor	2.008,02	1.885,75	1.524,53	1.563,51	1.511,80

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022
Catatan : *Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Grafil III.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022 (miliar rupiah)

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Dalam PDRB Nominal Agregat yang menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk

domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel III.7 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	2.850,26	2.904,40	2.914,08	3.177,71	3.638,14
ADHK 2010	1.917,69	1.936,88	1.935,79	1.966,86	2.047,51
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
ADHB	25,18	25,33	21,25	22,65	25,36
ADHK 2010	16,94	16,89	14,12	14,02	14,27
Pertumbuhan (%)					
PDRB Perkapita ADHK 2010	(1,04)	(0,32)	(16,42)	(0,67)	1,80
Jumlah Penduduk (000 Orang)	113,18	114,68	137,13	140,27	143,44
Pertumbuhan Ekonomi SBT	0,38	1,00	(0,06)	1,61	4,10

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022

https://sbt

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerahdapat terselenggara dengan baik.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara proporsional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnyadi luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan ProgramKemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada;

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.,Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat.Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

1) Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2) Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD.
3) Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah;

a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penuruan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani.
b. Belum seluruhnya masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek

pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha mengindari pajak/retribusi daerah.

c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pelestarian Obyek wisata dengan baik yang menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata.
e. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.
e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,

b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata)
h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD
j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, dimana dalam Rancanagan Awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPJMD di tahun 2024. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 ditempuh melalui arah kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut dituangkan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel III.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2021 s/d 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Uralan	RealisasiTahun		No	Uraian	APBD Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2024*
		2021 (Audited)	2022 (Audited)				
4	**Pendapatan Daerah**	**983,280,410,513.25**	**950.159.289.436,39**	**4**	**PendapatanDaerah**	**845.708.005.858**	**1.174.282.757.560**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**34,530,112,971.87**	**32.089.143.351,39**	**4.1**	**Pendapatan Asli Daerah**	**26.807.973.858**	**20.527.753.458**
4.1.1	Pajak Daerah	6,153,168,689.54	6.645.109.774,90	4.1.1	Pajak Daerah	7.860.000.000	6.863.812.152
4.1.2	Retribusi Daerah	277,149,900.00	540.652.000,00	4.1.2	Retribusi Daerah	1.923.254.900	990.746.746
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,661,954,377.42	2.582.575.052,00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.586.456.000	4.359.359.683
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23,437,840,004.91	22.320.806.524,49	4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.438.262.958	8.313.834.877
4.2	**Pendapatan Transfer**	**921,653,356,305.00**	**894.124.370.025,00**	**4.2**	**Pendapatan Transfer**	**818.900.032.000**	**1.127.618.459.410**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	745,232,049,607.00	722.985.658.730,00	4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	807.045.776.000	1.111.859.976.149
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	48,848,965,053.00	38.934.349.982,00		Transfer Antar Daerah	11.854.256.000	15.758.483.261
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	500,895,943,000.00	499.601.146.344,00				
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	195,490,141,554.00	184.450.162 404,00		**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**26.136.544.691**
4.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya**	**161,378,367,000**	**153.130.379.000.00**		Dana Hibah		
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	161,378,367,000.00	152.051.538.000,00		Dana Darurat		
	Dana Insentif Daerah (DID)		1.078.841.000,00				
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15,042,939,698	18.008.332.295,00		Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		26.136.544.691
4.2.3.1	Bagi Hasil Pajak	14,722,539,698.00	18.008.332.295,00				
4.2.3.2	Bagi Hasil Lainnya	320,400,000.00	0,00				
4.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**27,096,941,236.38**	**23.945.776,060,00**				
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	9.997.100,00				
4.3.3	Pendapatan Lainnya	27,096,941,236.38	23.935.778.960,00				

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, maka proyeksi belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.9. Realisasi dan Proyeksi/target Belanja tahun 2021 s/d 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Uraian	Realisasi Tahun		No	Uraian	APBD Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2024*
		2021 (Audited)	2022 (Audited)				
5,	**BELANJA DAERAH**	**910,147,764,961.31**	**764.396.738.356,35**	**5,**	**BELANJADAERAH**	**845.708.005.858**	**1.174.282.757.560**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**750,335,591,531.66**	**580.033.857.984,14**	**5,1**	**BELANJAOPERASI**	**481.803.394.607**	**689.847.065.540**
5,1,01	Belanja Pegawai	277,322,539,158.40	277.705.404.573,20	5,1,01	BelanjaPegawai	352.403.394.607	373.161.702.740
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	203,842,106,293.26	213.485.315.396,14	5,1,02	BelanjaBarangdanJasa	120.000.000.000	221.814.155.561
5,1,04	Belanja Subsidi	1,053,830,000.00	2.387.930.000,00	5,1,04	BelanjaSubsidi	400.000.000	12.467.780.169
5,1,05	Belanja Hibah	10,191,651,242.00	44.829.249.134,00	5,1,05	BelanjaHibah	5.000.000.000	49.014.808.852
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	34,762,352,905.00	41.625.958.880,80	5,1,06	BelanjaBantuanSosial	4.000.000.000	33.388.618.218
	Belanja Bantuan Keuangan	223,163,111,933.00			BelanjaBantuanKeuangan		
5,2	**BELANJA MODAL**	**156,018,853,429.65**	**171.837.680.372,21**	**5,2**	**BELANJAMODAL**	**145.270.606.170**	**213.072.915.636**
	Belanja Modal tanah	200,000,000.00	250.000.000,00		BelanjaModal tanah		
5,2,02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,269,135,665.80	27.045.279.051,00	**5,2,02**	BelanjaModalPeralatan dan Mesin	22.725.429.770	43.747.264.717
5,2,03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,244,032,294.58	40.662.045.372,25	**5,2,03**	BelanjaModalGedungdan Bangunan	38.274.662.000	59.257.916.019
5,2,04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70,741,114,709.27	103.857.355.948,96	**5,2,04**	BelanjaModalJalan,Jaringan dan Irigasi	84.250.514.400	109.569.377.338
5,2,05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	564,570,760.00	23.000.000,00	**5,2,05**	BelanjaModalAsettetapLainnya	20.000.000	498.357.563
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**3,793,320,000.00**	**12.525.200.000,00**	**5,3**	**BelanjaTidakTerduga**	**10.185.152.381**	**5.054.572.605**
5,3,01	Belanja Tidak Terduga	3,793,320,000.00	12.525.200.000,00	5,3,01	BelanjaTidakTerduga	10.185.152.381	5.054.572.605
5,4	**Belanja Transfer**	**-**	207.404.884.667,50	**5,4**	**BelanjaTransfer**	**208.448.852.700**	**266.308.203.779**
5,4,02	Belanja Bantuan Keuangan	-	207.404.884.667,50	5,4,02	BelanjaBantuanKeuangan	208.448.852.700	266.308.203.779

3.5. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2024 kemudian dituangkan dalam Tabel 3.8 berikut:

Tabel III.10. Realisasi dan Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 s/d 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun		No	Uraian	APBD Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2024*
		2021 (Audited)	2022 (Audited)				
	Surplus / (Defisit)	**73,132,645,551.94**	**(21.642.333.587,46)**		**Surplus / (Defisit)**	**0,00**	
7,	**PEMBIAYAAN**			6,	**PEMBIAYAAN**		
7,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**56,232,293,301.41**	**127.847.972.292,43**	6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**4.750.000.000**	**4.600.000.000**
7,1,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**56,232,293,301.41**	127.847.972.292,43	6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.750.000.000	4.600.000.000
					Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**4.750.000.000**	**5.071.500.000**
7,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1,518,000,000.00**	**2.750.000.000,00**	6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.750.000.000**	**4.600.000.000**
7,2,1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,518,000,000.00	2.750.000.000,00	6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	4.750.000.000	4.600.000.000
7,2,2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0,00		**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**4.750.000.000**	**5.591.328.750**
	Pembiayaan Netto	**54,714,293,301.41**	**125.097.972.292,43**		**Pembiayaan Netto**	**0,00**	**0,00**
6,3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**127,846,938,853.35**	**103.455.638.704,97**	6,3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0,00**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal diketahui, kemudian disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program unggulan kepala daerah, yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya *(performance maintenance)*.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Seram Bagian

Timur Tahun 2021–2026 merupakan aktualisasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi objektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Tahun 2021-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;				
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	B 2,51-3,25
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)		Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB	B
		Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif		2,51-3,25
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN		Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	IPK dan IRB	AB 2,51-3,25
MISI 2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;				
Pengembangan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Iklm Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	5,71
		Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	33.2
		Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	67,5
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah,		Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komiditi unggulan daerah dan peningkatan ketahan pangan	Skor Pola Pangan Harapan(SPPH)	80,50
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	4,12 - 0,3548
		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	- 50,26
		Meningkatkan ketahanan	Wirausahaan	10,5

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
		ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat		
MISI 3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;				
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat	Gini Ratio	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75,8
		Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan		
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat		
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	tinggi
		Meningkatan kualtias anak, perempuan dan pemuda		
		Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualtas		66,20
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningktan disiplin dan penegakan protocol kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75,8
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan		
MISI 4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;				
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,0 - 81,0
		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	50,26

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
		Menguatkan perencanaan industir daerah	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	4,12 - 0, 3548
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD		
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat	Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Demokrasi (ID)	100
			Indeks Rasa Aman (IRA)	90
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Presentase Kerja sama	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	55,1
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	Wirausahaan	10,5
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,3
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	100
MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;				
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah		Mewujudkan konektifitas antara wilayah	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	38,7
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai		
		Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan		
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar		
Meningkatkan pelayanan tranportasi antar pulau dan/atau kepulauan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal,	Tingkat Aksesibilitas	55,1

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
		berdaya saing, dan memberikan nilai tambah		
		Tingkat ketersedian sarana dan prasarana pendukung		tinggi
MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT;				
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	Presentase Penduduk Miskin	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Develompment Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	IPKM	75,8
			AHH	62,2
			Gini Rasio	0,3548
			IKLH	77,0-81,0
			IPK dan IRB	2,51-3,25
			PDRB	4,12
			IRA	90
			IKID	50,26
			ID	100

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 mengacu dan selaras dengan tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema RKP Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***.

Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan'
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan konektivitas;

7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN);
8. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sementara itu, sasaran indikator makro pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,3%-5,7%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0%-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,0377 poin;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02 poin;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108 poin; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110 poin.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah **"Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas"**. Tema ini berdasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Infrastruktur dan konektivitas
5. Reformasi birokrasi;
6. Pemilihan legislatif, Pilkada dan Pilpres 2024;
7. Pembangunan berkelanjutan.

Mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 maka, dirumuskan **Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024** sebagai berikut :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan.
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata;
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul;
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas; dan
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *Good Governance*

4.2.3. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2024 berisi saran dan pendapat dari DPRD yang diperoleh dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui hasil rapat kerja, kunjungan lapangan, hasil jaring aspirasi masyarakat dan hasil reses anggota DPRD pada Daerah Pemilihan I, II dan III, telah terinventarisasi sejumlah persoalan pembangunan daerah yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran dan direkapitulasi dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.2. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SD N 5 Werinama Kec. Werinama/ Adm Tum	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Husin Rumadan, SE
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SD YPPK Elnusa Kec. Siwalalat/ Adm Elnusa	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Husin Rumadan, SE
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	SD Negeri 1 Werinama Kec. Werinama	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Abd. Latif Suin
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	SD Hatumeten Kec. Werinama	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Abd. Latif Suin
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kec. Siritaun Wida Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Samad Rumakabis
Bantuan Pembangunan 1 ruang belajar/ruang guru MA LKMD	Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Samad Rumakabis
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Tersebar di Tapil 3	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Kafa Hulihulis

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pemuda dan Olahraga	
Bantuan Dana hibah untuk pemuda	Kec. P. Gorom/Negeri Amarsikaru/Dusun Wawasa	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Kafa Hulihulis
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pulau Panjang	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Abd. azis Keliandan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDN Kian Darat	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Abd. azis Keliandan
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kecamatan Seram Timur/Desa Keffing	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Agil Rumakat
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kecamatan Bula	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Agil Rumakat
Bantuan Pemberdayaan Pemuda	Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Ismail Rumbalifar
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Bula/Adm Fatolo	Dinas Pendidikan, Kebudayaan	Abd. Kelilauw, S.Pd

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Kabupaten/Kota		Pemuda dan Olahraga	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kecamatan Gorom Timur/Negeri Miran	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Abd. Kelilauw, S.Pd
Bantuan Dana hibah beasiswa untuk siswa kurang mampu	Kecamatan Gorom Timur/Tersebar	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Noaf Rumau
Bantuan Pakaian Seragam untuk siswa dan siswi SD/SMP kurang mampu	Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Fadli Elbetan
Bantuan Dana olahraga	Fc. NAMAILU Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Fadli Elbetan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Samad Rumakabis
Penanggulangan penyakit Malaria	15 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Samad Rumakabis
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	15 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Samad Rumakabis
Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Kabupaten		Dinas Kesehatan	Samad Rumakabis

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Tersebar di Tapil 3	Dinas Kesehatan	Kaafa Hulihulis
Pembangunan Jalan Setapak untuk fungsi hunian	Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur	Dinas PUPR	Samad Rumakabis
Pembangunan jambatan dan Gorong-gorong jalan pemukiman baru	Kecamatan Bula/Desa Bula	Dinas PUPR	Agil Rumakat
Lanjutan Draenase	jalan baru KPU ke pantai Wailola Kecamatan Bula/Desa Bula	Dinas PUPR	Agil Rumakat
Normalisasi Sungai	Wai Ambahosi Kecamatan Bula/Adm Wailola	Dinas PUPR	Husin Rumadan
Pembangunan Air Bersih	Wailutin Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas PUPR	Husin Rumadan
Pembangunan Tanggul penahan Banjir	Dusun Wolok Kecamatan Kelimury	Dinas PUPR	Umar Gassam, SH
Pembangunan Air Bersih	Dusun Wolok Kecamatan Kelimury	Dinas PUPR	Umar Gassam, SH
Pembangunan Talud Penahan Ombak	Kecamatan Kelimury/Adm Taa	Dinas PUPR	Umar Gassam, SH
Peningkatan Jalan lapen	Kecamatan Bula/Adm WailolaAssalam 5	Dinas PUPR	Umar Gassam, SH
Pembangunan Cincin Penahan Ombak	Kecamatan Gorom Timur/Negeri Miran	Dinas PUPR	Zainudin Rumuar
Lanjutan pembangunan tanggul penahan banjir	Air But are jembatan penghubung rumuar - manaban Kecamatan Gorom Timur	Dinas PUPR	Zainudin Rumuar
Tanggul penahan banjir	Air Tela Miran Rumuar	Dinas PUPR	Zainudin Rumuar

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
	Kecamatan Gorom Timur		
Pembangunan Sumur Air Bersih	Kecamatan Teluk Waru/Desa Dawang	Dinas PUPR	Abd. Latif Suin
Pembangunan Jalan Setapak	Desa Duryar Rumoy tanjung kilnaur Kecamatan Teor	Dinas PUPR	Contansius Kolatfeka
Pembangunan Tambatan Tita/Pemecah Ombak	Kompleks Kampung Cina Kecamatan Seram Timur/Negeri Geser	Dinas PUPR	Alexander Patty
Pembangunan Tanggul Penahan Longsor	Kec. P. Gorom/Negeri Amarsikaru/Dusun Wawasa	Dinas PUPR	Kaafa Hulihulis
Pembangunan Jalan Setapak	Lorong Tumbuh Parang Kecamatan Bula Desa Bula	Dinas PUPR	Abdul Kelilauw
Pembangunan Talud Penahan Ombak	Kecamatan P. Panjang Adm Magat	Dinas PUPR	Abdul Kelilauw
Pembangunan Jalan Setapak	Air Kabur-kabur Kacamatan Bula Adm Wailola	Dinas PUPR	Abdul Kelilauw
Pembangunan Jalan Sertu	Keca. Seram Timur/ Negeri Urung	Dinas PUPR	Hasan Day
Pembangunan/Rehabilitasi air bersih	Kecamatan Kilmury/Adm Sumbawa	Dinas PUPR	Hasan Day
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Longsor Lainnya (Talud Penahan Longsor)	Kec. Gorom Timur	Dinas PUPR	Rudi Rumodar
Pembangunan Jalan setapak	Desa Limumir, Kecamatan Bula	Dinas PUPR	Fathul Kwairumaratu
Pembangunan jembatan penghubung antar kampung	Desa Limumir, Kecamatan Bula	Dinas PUPR	Fathul Kwairumaratu
Pembangunan gorong-gorong	Kecamatan Kilmury	Dinas PUPR	Fathul Kwairumaratu
Pembangunan talud penahan	Dusun Kilyaur, Desa Kildor,	Dinas PUPR	Gafar Warawara

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
ombak	Kecamatan Kesui Watubela		
Pembangunan jalan setapak	Desa Limumir, Kecamatan Bula	Dinas PUPR	Gafar Warawara
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Talud Penahan Ombak)	Udur Keliwouw/Kec. Gorom Timur	Dinas PUPR	Halaludin Sagey
Pembangunan Sumur Air Bersih	Desa Lapela Kecamatan Siwalalat	Dinas PUPR	Syarif Usman
Pembangunan lanjutan Jembatan Waigayan	Waigayan Kecamatan Bula/Desa Bula	Dinas PUPR	Syarif Usman
Pembangunan Draenasi	Jln. Mufakat Kecamatan Bula/Desa Bula	Dinas PUPR	Syarif Usman
Pembangunan Draenasi	Kecamatan Bula	Dinas PUPR	Wa Muhaya
Pembangunan Tanggul penahan longsor	Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas PUPR	Fadli Elbetan
Bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah tidak layak huni/masyarakat kurang mampu	Kecamatan Siritaun Wida Timur, dan Kecamatan Kian Darat	Dinas PKP	Samad Rumakabis
Lanjutan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas PKP	Husin Rumadan
Pembangunan Jalan Setapak	Dusun Waigondal Kecamatan Bula/desa bula	Dinas PKP	Abd. Latif Suin
Bantuan Material untuk rumah tidak layak huni	Tersebar didapil 2	Dinas PKP	Hasan Day
Pembangunan Draenasi di	kampung buton Jl. Gunung Teri Kecamatan Bula/Adm Wailola	Dinas PKP	Hasan Day
Pembangunan Jalan Setapak	Kec. P. Gorom/Kinali	Dinas PKP	Rudi Rumodar
Pembangunan Jalan Setapak	Kecamatan P. Gorom/Negeri	Dinas PKP	Agil Rumakat

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
	Day		
Bantuan Bahan bangunan untuk Rumah tidak layak huni	Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas PKP	Fadli Elbetan
Bantuan Alat Tangkap Nelayan (Jaring)	Kecamatan Seram Timur	Dinas Perikanan	Samad Rumakabis
Bantuan Rompong Nelayan	Kecamatan Seram Timur, dan Kecamatan Siritaun Wida Timur	Dinas Perikanan	Samad Rumakabis
Pengadaan Bantuan Bodi Fiber dan Mesin	Kecamatan Seram Timur, dan Kecamatan Siritaun Wida Timur	Dinas Perikanan	Samad Rumakabis
Pengadaan Mesin Yamaha 15 Pk		Dinas Perikanan	Umar Gassam
Pengadaan Transportasi roda 2 untuk penjualan hasil-hasil Nelayan	Tersebar didapil 2	Dinas Perikanan	Abd. Latif Suin
Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Katinting	Kec. Kesui Watubela	Dinas Perikanan	Abd. Latif Suin
Pengadaan Transportasi roda 2 untuk penjualan hasil-hasil Nelayan	Tersebar Didapil 3	Dinas Perikanan	Contansius Kolatfeka
Pengadaan body fiber dan mesin katinting	Kecamatan Seram Timur/tersebar	Dinas Perikanan	Alexander Patty
Pengadaan body fiber dan mesin katinting	Kecamatan Tutuk Tolo/Tersebar	Dinas Perikanan	Alexander Patty
Pengadaan Mesin Katinting Gx 160	Tersebar didapil 2	Dinas Perikanan	Alexander Patty
Pengadaan Body Fiber dan Mesin 15 Pk	Kec. P. Gorom/Negeri Amarsikaru/Dusun Wawasa	Dinas Perikanan	Kaafa Hulihulis
Pengadaan perahu Fiber dan Mesin Katinting untuk Nelayan	Tersebar didapil 3	Dinas Perikanan	Husean Kelilauw
Pengadaan Mesin Katinting Honda 5,5,	Kec. Gorom Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Pengadaan Motor/Kendaraan roda 2	Kec. Gorom Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar
Pengadaan Perahu Fiber Katinting	Kec. Gorom Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar
Bantuan Body Fiber dan Mesin Ketinting	Kecamatan Teluk Waru	Dinas Perikanan	Ismail Rumbalifar
Bantuan Bodi Fiber & mesin 15 PK	Kecamatan Seram Timur, dan Kecamatan Kilmury	Dinas Perikanan	Fathul Kwairumaratu
Bantuan bodi fiber dan mesin ketinting	Seram Lau, Kecamatan Seram Timur	Dinas Perikanan	Fathul Kwairumaratu
Bantuan pengadaan rompong untuk nelayan	Desa Otademan, Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Perikanan	Gafar Warawara
Pengadaan Body Fiber dan Mesin 15 Pk	Kecamatan Werinama/Adm Gusalaut	Dinas Perikanan	Syarif Usman
Pengadaan bantuan motor	Tersebar	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
Pengadaan bantuan body fiber dan mesin 15 Pk	Kecamatan Werinama	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
Pengadaan Bantuan Mesin 40 Pk	Kecamatan Bula	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
bantuan Motor Honda (roda dua) untuk pemasaran hasil-hasil Nelayan	Tersebar	Dinas Perikanan	Fadli Elbetan
Pengadaan bantuan mesin sensor	Kecamatan Siritaun Wida Timur, dan Kecamatan Kian Darat	Dinas Pertanian	Samad Rumakabis
Pengadaan bantuan bibit pala	Kecamatan Siritaun Wida Timur, dan Kecamatan Kian Darat	Dinas Pertanian	Samad Rumakabis
Pengadaan bantuan mesin parut kelapa	Kecamatan Tutuk Tolu, Kian Darat, dan Siritaun Wida Timur	Dinas Pertanian	Samad Rumakabis
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai sisin 1	Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Husin Rumadan

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai sisin 2	Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai sisin 3	Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai sisin 4	Kec. Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai net jaya	Kec. Werinama/Adm Bemo	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Lanjutan Kebun Rakyat kelompok wai von inan	Kec. Werinama/Adm Perak	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Pengadaan Ternak sapi	Kecamatan Bula	Dinas Pertanian	Husin Rumadan
Pengadaan Mesin Sensor Stil Mini Bar 80 dan Mesin Parut Sagu Honda	Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Abd. Latif Suin
Pengadaan bibit ternak kambing	Kecamatan Pulau Gorom	Dinas Pertanian	Contansius Kolatfeka
Pengadaan Alat transportasi pertanian angkutan hasil Bumi Roda 3 (Kaisar)	Kecamatan Teor	Dinas Pertanian	Contansius Kolatfeka
Pengadaan bantuan Mesin Parut Sagu	Tersebar didapil 2	Dinas Pertanian	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Ternak Sapi	Kecamatan Kilmury/Dusun Batu Mangar	Dinas Pertanian	Alexander Patty
Pengadaan Mesin Parut kelapa	Tersebar didapil 3	Dinas Pertanian	Abdul Kelilauw
Pengadaan Misin sensor Mini	Tersebar didapil 3	Dinas Pertanian	Abdul Kelilauw
Pembangunan Jalan Tani	Kec. Seram Timur/ Adm Manggis	Dinas Pertanian	Hasan Day
Pengadaan bantuan bibit pala dan cengkeh	Tersebar didapil 2	Dinas Pertanian	Hasan Day
Pengadaan Mesin Parut Sagu	Tersebar didapil 3	Dinas Pertanian	Husean Kelilauw

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Bantuan Kebun Negeri/Kebun Rakyat	Kec.Pulau gorom /Adm Sikaru	Dinas Pertanian	Husean Kelilauw
Bantuan Bibit Pala dan Cengkeh untuk Petani	Kecamatan Bula, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Bula Barat	Dinas Pertanian	Ismail Rumbalifar
Bantuan Ternak Sapi untuk masyarakat	Kecamatan Bula dan Teluk Waru	Dinas Pertanian	Ismail Rumbalifar
Bantuan ternak sapi untuk kelompok usaha masyarakat	Kecamatan Teluk Waru	Dinas Pertanian	Fathul Kwairumaratu
Pembangunan Jalan Tani	Desa Kurwar Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Pertanian	Gafar Warawara
Pengadaan bantuan bibit pala dan cengkeh untuk petani	Tersebar di Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Pertanian	Gafar Warawara
Kegiatan pengembangan tanaman pala	Kecamatan Werinama	Dinas Pertanian	Syarif Usman
Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan	Tersebar	Dinas Pertanian	Syarif Usman
pengembangan tanaman pala	Kecamatan Siwalalat	Dinas Pertanian	Syarif Usman
Pembangunan Kebun Rakya	dusun keliwouw Kecamatan Gorom Timur/Negeri Amarwat	Dinas Pertanian	Syarif Usman
Pengadaan Mesin Potong Rumput	Tersebar	Dinas Pertanian	Syarif Usman
Pengadaan Mesin Parut Sagu dan Mesin Parut Kelapa	Tersebar	Dinas Pertanian	Syarif Usman
Pengembangan tanaman sayur-sayuran	Tersebar	Dinas Pertanian	Noaf Rumau

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Pengembangan tanaman buah-buahan	Tersebar	Dinas Pertanian	Noaf Rumau
Pengembangan tanaman Pala Liat	Tersebar	Dinas Pertanian	Noaf Rumau
Pengembangan tanaman Cengkeh Raja	Tersebar	Dinas Pertanian	Noaf Rumau
Pengembangan tanaman jagung manis	Tersebar	Dinas Pertanian	Noaf Rumau
Bantuan Tanaman Pertanian	Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Dinas Pertanian	Fadli Elbetan
Bantuan KUBE Sembako	Seluruh Desa di Kecamatan Siritaun Wida Timur, dan Kian Darat	Dinas Sosial	Samad Rumakabis
Pengadaan Bantuan Perabot Rumah tangga	Tersebar didapil 2	Dinas Sosial	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Kube Mesin Londry	Kecamatan kilmury/Adm Gunak	Dinas Sosial	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Sembako untuk masyarakat tidak mampu	Kecamatan Seram Timur	Dinas Sosial	Hasan Day
Bantuan sembako untuk masyarakat tidak mampu	Tersebar	Dinas Sosial	Halaludin Sagey
Bantuan Sosial	Kec. Gorom Timur	Dinas Sosial	Rudi Rumodar
Bantuan sosial untuk masyarakat miskin	Desa Kilga, Kecamatan Kian Darat	Dinas Sosial	Fathul Kwairumaratu
Bantuan peralatan rumah tangga	Kecamatan Kilmury	Dinas Sosial	Fathul Kwairumaratu
Bantuan Sembako untuk masyarakat kurang mampu	Tersebar di Kecamatan Werinama/Siwalala	Dinas Sosial	Fadli Elbetan
Pengadaan Mesin 40 Pk		Dinas Perhubungan	Umar Gassam

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Bantuan Mobil Pick UP untuk Bumdes Desa Guliar	Desa Guliar, Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Perhubungan	Gafar Warawara
Penguatan Modal Usaha (Bantuan Mesin Foto Copy Type AM-C5000	Kecamatan Bula/Adm Kampung Gorom	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Abd. Latif Suin
Pembangunan Sarana dan Prasarana penampungan barang hasil Bumi	Kecamatan Teor	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Contansius Kolatfeka
Penguatan Modal Usaha untuk kelompok usaha Adel Aera	Kecamatan Teor	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Contansius Kolatfeka
Penguatan Modal Usaha untuk kelompok usaha SS	Kecamatan Teor	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Contansius Kolatfeka
Penguatan Modal Usaha UMKM	Kec. P. Gorom/Negeri Amarsikaru/Dusun Wawasa	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kaafa Hulihulis
Penguatan Modal Usaha	Kios Wandi Kecamatan P. Panjang	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kaafa Hulihulis
Benguatan Modal Usaha	Kios Hanura Indah Kecamatan Gorom Timur/Adm Miran Rumuar	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kaafa Hulihulis
Penguatan Modal Usaha	Kios Lua-lua Indah Kec. Kesui Watubela Adm Tanah baru	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kaafa Hulihulis
Penguatan modal Usaha UMKM untuk masyarakat	Tersebar didapil 2	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan	Hasan Day

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
		Perdagangan	
Penguatan Modal Usaha UMKM	Tersebar	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Halaludin Sagey
Penguatan modal Usaha UMKM untuk masyarakat	Tersebar didapil 3	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Husean Kelilauw
Penguatan Modal Usaha UMKM (Bantuan uang tunai)	Kec. Gorom Timur	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rudi Rumodar
Bantuan UMKM untuk masyarakat	Kecamatan Bula, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Bula Barat	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Ismail Rumbalifar
Bantuan UMKM untuk kelompok masyarakat	Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Fathul Kwairumaratu
Bantuan UMKM untuk kelompok masyarakat	Desa Kilaba, Kecamatan Kian Darat	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Fathul Kwairumaratu
Bantuan UMKM untuk kelompok masyarakat	Desa Bula, Kecamatan Bula	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Fathul Kwairumaratu
Bantuan beras untuk masyarakat miskin	Kecamatan Kilmury	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Fathul Kwairumaratu
Pengadaan Sembako untuk UMKM	Tersebar di Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Gafar Warawara

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Bantuan mesin parut	Tersebar di Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Kesui Watubela	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Gafar Warawara
Penguatan Modal Usaha (UMKM)	Tersebar	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Abd. Azis Keliandan
Penguatan Modal Usaha/Paket Pengadaan Mesin Cetak Spanduk dan Baleho (Merek Jade 1802)	Kecamatan Bula/Desa Bula	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Wa Muhaya
Penguatan Modal Usaha/Paket Mesin Air isi ulang Galong	Kecamatan Bula	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Wa Muhaya
Penguatan Modal Usaha/Paket Mesin Foto Copy (Canon)	Kecamatan Bula	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Wa Muhaya
Pembangunan Tanggul Penahan Banjir	Kecamatan Seram Timur/Negaeri Urung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasan Day
Pembangunan tanggul penahan banjir	Desa Miran Kelian, Kecamatan Gorom Timur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gafar Warawara
Pengadaan Mesin Parut Kelapa	Tersebar	Dinas Ketahanan Pangan	Halaludin Sagey
Bantuan Pembangunan Masjid	Mesjid Nurul Taqwa Desa Airnanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur	Bagian Kesra	Samad Rumakabis
Pengadaan Pakaian/Busana Muslim untuk ibu-ibu majelis Ta'ali	Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Desa Kwamor Mata	Bagian Kesra	Samad Rumakabis

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
	Wawa, Kecamatan Seram Timur		
Bantuan Dana Hibah pembanguna Masjid	Masjid Al-Hidayah Kecamatan Seram Timur/Desa Keffing	Bagian Kesra	Agil Rumakat
Pengadaan Kubah Masjid	Masjid Miran kelian Kecamatan Gorom Timur/Adm Miran Kelian	Bagian Kesra	Zainudin Rumuar
Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Mosholah	Mosholah Al-Iklas Waiketam Baru Kecamatan Bula Barat/Adm Waiketan Baru	Bagian Kesra	Abd. Latif Suin
Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Mosholah	Mosholah Jabal Ilmi MTs - Bula Kecamatan Bula/ Desa Bula	Bagian Kesra	Abd. Latif Suin
Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Masjid	Masjid Darul Naim Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Bagian Kesra	Abd. Latif Suin
Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Masjid	Masjid Afganistan Kecamatan Bula desa Bula	Bagian Kesra	Abd. Latif Suin
Bantuan Dana untuk TPQ	Kecamatan Bula desa Baula	Bagian Kesra	Abd. Latif Suin
Bantuan Dana Hibah rumah ibadah/Masjid	Kec. P. Gorom/Negeri Amarsikaru/Dusun Wawasa	Bagian Kesra	Kaafa Hulihulis
Bantuan Dana hibah pembangunan rumah ibadah	Kecamatan Gorom Timur/Negeri Rarat	Bagian Kesra	Abdul Kelilauw
Bantuan Dana hibah pembangunan rumah ibadah	Kecamatan P. Gorom/Negeri Amarsikaru Dusun Derek	Bagian Kesra	Abdul Kelilauw
Bantuan Dana hibah pembangunan rumah ibadah	Kecamatan P. Gorom/Adm Kilili	Bagian Kesra	Abdul Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan rumah ibadah	Kecamatan Kesui Watubela/Adm Kurwar	Bagian Kesra	Abdul Kelilauw
Bantuan Dana Hibah untuk ibu-ibu majelis Ta'alim/ kelompok pengajian	Kec. P. Gorom/Adm Dai Kaforin	Bagian Kesra	Abdul Kelilauw

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Bantuan Dana hibah pembangunan rumah ibadah	Tersebar didapil 2	Bagian Kesra	Hasan Day
Bantuan untuk Majilis Ta'alim	Tersebar didapil 2	Bagian Kesra	Hasan Day
Bantuan Untuk TPQ	Tersebar didapil 2	Bagian Kesra	Hasan Day
Bantuan Rumah Ibadah	Masjid Annasar Kec. Kian Darat/Negeri Kian	Bagian Kesra	Abd Azis Keliandan
Baju Muslim untuk ibu-ibu Majelis Taqlim	Kec. Kian Darat	Bagian Kesra	Abd Azis Keliandan
Pengadaan Baju pengajian untuk ibu-ibu majelis ta'alim	Tersebar	Bagian Kesra	Halaludin SAgey
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Nurul Huda Kec.Gorom Timur/Adm Bas	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Al-Bakri Kec.Gorom Timur/Adm Aran	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Al-Hijrah Kec.Gorom Timur/Adm Sagey	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Arrahman Kec.Gorom Timur/Adm Goha	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Raudah Tussalam Kec.Gorom Timur /Adm Keltufa 2	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana hibah pembangunan Masjid	Masjid Arrahman Kec.Gorom Timur /Adm Tunas Ilur	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana hibah pembangunan Masjid	Masjid Nurul Huddah Kec.Gorom Timur /Adm Keltufa 1	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana hibah pembangunan Masjid	Masjid Nurain Kec.Pualau / Adm Kilibingan	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah	Masjid Nurul Masi Kec. Gorom	Bagian Kesra	Husein Kelilauw

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
pembangunan Masjid	Timur / Negeri Kotasiri		
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Al-Munaza Kec. Gorom Timur / Negeri Kilkoda	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Iman Zikir Kec. Gorom Timur/Kilimuda	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Tuha Kec. Gorom Timur/Adm Tuha	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Miran Kelian Kec. Gorom Timur/ Adm Miran Kelian	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Bantuan Dana Hibah pembangunan Masjid	Masjid Tinarin Kec. Gorom Timur/Adm Tinarin	Bagian Kesra	Husein Kelilauw
Pengadaan Pakaian busana	Kec. Gorom Timur	Bagian Kesra	Rudi Rumodar
Bantuan Dana Hibah untuk Pembangunan Masjid	Kec. Gorom Timur	Bagian Kesra	Rudi Rumodar
Bantuan Pembangunan Mesjid	Desa Elnusa Kecamatan Siwalalat	Bagian Kesra	Ismail Rumbalifar
Bantuan Pembangunan Mesjid	Desa Aki Jaya, Kecamatan Bula Barat	Bagian Kesra	Ismail Rumbalifar
Bantuan Pembangunan Gereja	Desa Elnusa Kecamatan Siwalalat	Bagian Kesra	Ismail Rumbalifar
Bantuan Pembangunan Mesjid	Mesjid Al-Azis Wailola Baru Desa Limumir, Kecamatan Bula	Bagian Kesra	Ismail Rumbalifar
Bantuan pembangunan TPQ	Desa Bula, Kecamatan Bula	Bagian Kesra	Fathul Kwairumaratu
Pembangunan talud penahan banjir	Kecamatan Gorom Timur	Bagian Kesra	Gafar Warawara
Bantuan Perjalanan Ibadan Umrah	Tersebar di Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Kesui	Bagian Kesra	Gafar Warawara

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
	Watubela		
Bantuan hibah pembangunan mesjid	Tersebar di Kecamatan Pulau Gorom, dan Kecamatan Kesui Watubela	Bagian Kesra	Gafar Warawara
Bantuan Dana Hibah untuk TPQ	TPQ Asyarifa Bemo Kecamatan Werinama	Bagian Kesra	Gafar Warawara
Bantuan Dana Hibah untuk TPQ	TPQ Fatul Hayat Kecamatan Werinama	Bagian Kesra	Gafar Warawara
Pekerjaan Tempat Wudhu Masjid	Masjid Ar-Rahman Jln. Mufakat Dusun Waigondal Kecamatan Bula/Desa Bula	Bagian Kesra	Gafar Warawara
Bantuan Dana Hibah untuk pembangunan Masjid	Masjid Draunnaim Kecamatan Werinama/Negeri Werinama	Bagian Kesra	Fadli Elbetan
pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Tersebar	Kesbang Pol	Noaf Rumau
pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas kerukunan umaty beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Tersebar	Kesbang Pol	Noaf Rumau
pengembangan perpustakaan	Tersebar	Kesbang Pol	Noaf Rumau

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
(kegiatan pelayanan perpustakaan keliling)			

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Tahapan dan tata cara analisis isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2024, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada timbulnya permasalahan pembangunan. Melalui identifikasi yang cermat, teliti dan komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, diharapkan ditemukan berbagai isu strategis yang pemecahannya memerlukan langkah pendekatan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Mengindentifikasi dan selanjutnya menentukan suatu permasalahan pembangunan akan dapat menjadi isu strategis atau tidak. Isu strategis jika tidak segera mendapat respons, dikhawatirkan akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan tahun 2024.

Perumusan isu strategis tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal. **Isu strategis tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur** adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
3. Penanggulangan Prevalensi Stunting
4. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam
5. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan Konekvitas antar Wilayah.
6. Peningkatan Inovasi Daerah
7. Belum Optimalnya tata Kelola Pemerintan, Pemilu Serentak 2024 serta Perencanaan Jangka Panjang 2025 – 2045.

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

adalah ***"Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur"***.

Tema Pembangunan Tahun 2024 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis*** Sumberdaya Kepulauan" yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yakni : (1) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan, (2) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan, (3) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan.

Agar pembangunan dapat berjalan terarah dan dapat menjawab kebutuhan daerah, ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPJMD tahun 2021-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2024. **Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024** sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan.**

   Tujuan Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan (a) kualitas pendidikan dasar, (b), derajat kesehatan masyarakat (c) pemahaman dan implementasi ajaran agama, (d) kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas (e) pelestarian adat, budaya dan sejarah daerah.

2. **Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur.**

   Tujuan prioritas ini adalah untuk menangani permasalahan pembangunan terkait tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengalami peningkatan pada tahun 2022, diikuti juga dengan meningkatnya angka pengangguran. Penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangguran dilakukan dengan upaya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu berbasis potensi sumberdaya lokal, serta perluasan kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

3. **Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat.**

   Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya yang dilakukan melaluin prioritas ini adalah meningkatkan mutu produk unggulan daerah pertanian, parikanan dan pariwisata yang didukung dengan peningkatan sarana prasana produksi serta pengembangan potensi pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah *multiplayer effect* yang diperoleh berupa meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta membaiknya perekonomian daerah.

4. **Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah.**

   Prioritas ini menjawab kebutuhan akan infrastruktur serta konektifitas antar wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada wilayah kepulauan dan daerah pegunungan. Sasaran utama prioritas ini adalah meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah.

5. Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah; dan

Tujuan prioritas ini adalah mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan sekaligus pemulihan ekonomi yang terdampak cukup signifikan selama kurun 2020-2021, dan masih perlu upaya-upaya untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Sasaran prioritas adalah meningkatnya peran sektor UMKM terhadap ekonomi daerah yang dilakukan melalui beberapa arah kebijakan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan koperasi, serta peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan.

6. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tujuan prioritas ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi pelayanan secara elektrifikasi yang mempermudah dan memperpendek rentang kendali, meningkatnya kinerja pemerintahan, meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN, meningkatnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana dengan tercapainya kondisi tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, akan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Tabel IV.3. Keterkaitan antara Isu Strategis dan prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan
2.	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur
3.	Penanggulangan Prevalensi Stunting	Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat
4.	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam	
5.	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan Konekvitas antar	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
	Wilayah	Wilayah
6.	Peningkatan Inovasi Daerah	Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah
7.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintan, Pemilu Serentak 2024 serta Perencanaan Jangka Panjang 2025 – 2045	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tabel IV.4. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul	Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah
6.	Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	
7.	Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik	Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *good governance*	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

C. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan 2 (dua) komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Informasi penting yang perlu dijelaskan sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi adalah bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan strategi.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan langkah-langkah diatas maka, rumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Sasaran dan Prioritas Tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel IV.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1.	**Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan**	Meningkatnya SDM yang berkualitas	Meningkatnya mutu Pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dan siswa	- Pengelolaan Pendidikan - Pengembangan Kurikulum - Pendidikdan Tenaga Pendidikan - Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan - Perlindungan perempuan - Perlindungan khusus anak - Rehabilitasi sosial - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Pembinaan Keluarga Berencana	- Pengelolaan pendidikan sekolah dasar - Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama - Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup
		Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Perlindungan hak perempuan, anak dan Penyandang disabilitas dari tindak kekerasan	Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak		
				Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas		
		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada layanan dasar dan layanan rujukan	Peningkatan kualitas kesehatan layanan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan Masyarakat		
			Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan SDM kesehatan		
			Meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat		
			Penanganan	Percepatan penurunan		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Prevalensi stunting	prevalensi stunting melalui intervensi spesifik dan sensitive		daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial - Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota - Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota - Perencanaan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota - Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota - Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
2.	**Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur**	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Pemberdayaan sosial - Rehabilitasi sosial - Perlindungan dan jaminan sosial - Perencanaan tenaga kerja - Penempatan tenaga kerja - Hubungan industrial	- Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota - Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota - Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) - Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan informasi pasar kerja - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah
				Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu berbasis potensi Sumberdaya lokal		
			Meningkatkan upaya penanggulangan pengangguran	Perluasan kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kabupaten/kota - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya pemerataan aksessibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkatan prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	- Penyelenggaraan jalan - Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) - Pengelolaan Sumber Daya Air - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Pengembangan pemukiman Kawasan permukiman	- Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota - Pembangunan prasarana pertanian - Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota - Pengelolaan terminal penumpang Type C - Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota - Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota - Pengelolaan SDA dan
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan dan perdesaan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan		
				Peningkatan sarana dan Prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi		
		Meningkatnya Kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat		
			Pengembangan	Peningkatan sistem		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			sistem drainase	drainase perkotaan dan perdesaan		Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan PSU Perumahan - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah kabupaten/kota - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
3.	**Pengelolaan sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**	Meningkatnya peran sektor UMKM terhadap ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan	Penguatan kapasitas Kelembagaan dan pelaku UMKM dan Koperasi	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Pemberdayaan	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat		koperasi		Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi - Pengembangan UMKM	Daerah Kabupaten/ Kota - Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						keanggotaannya dalam 1 kabupaten/ kota - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Meningkatkan promosi investasi dan penciptaan iklim berusaha	Peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan	- Promosi penanaman modal - Pengembangan ekspor - Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Pelayanan Penanaman Modal - Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Perencanaan dan pembangunan industri - Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota - Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota - Pembuatan Peta

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
4.	**Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah**	Meningkatnya pemerataan aksessibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkatan prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	- Penyelenggaraan jalan - Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) - Pengelolaan Sumber Daya Air - Pengelolaan dan pengembangan	- Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota - Pembangunan prasarana pertanian - Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota - Pengelolaan terminal penumpang Type C - Pelaksanaan manajemen dan
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan dan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			perdesaan	Peningkatan sarana dan Prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi	sistem penyediaan air minum - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Pengembangan pemukiman Kawasan permukiman	rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota - Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan PSU Perumahan - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
		Meningkatnya Kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat		
			Pengembangan sistem drainase	Peningkatan sistem drainase perkotaan dan perdesaan		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Daerah kabupaten/kota - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
5.	**Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah**	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan produksi, Produktivitas serta mutu produk unggulan daerah	Pengembangan sarana Prasarana produksi dan mutu produk unggulan daerah	- Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian - Pengelolaan perikanan tangkap - Pengelolaan perikanan budidaya - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- Pengawasan penggunaan sarana pertanian - Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota - Pengembangan prasarana pertanian - Pembangunan prasarana pertanian - Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						pembudidaya ikan kecil - Pengelolaan pembudidaya ikan - Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota - Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
6.	**Optimalisasi Reformasi dan Pelayanan Publik**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan SDM yang inovatif, kreatif Serta peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	- Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penataan Organisasi
		Meningkatnya kinerja	Membangun open Government dalam	Perkuatan, keterbukaan		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan	informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan	- Pendaftaran Penduduk - Pencatatan Sipil - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Administrasi pemerintahan desa - Penyelenggaraan pengawasan - Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi - Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik - Pengelolaan Aplikasi Informatika - Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi - Pengelolaan keuangan daerah - Pengelolaan pendapatan daerah Pengelolaan barang milik daerah - Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Penataan Pendaftaran Penduduk - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Pencatatan sipil - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi - pemerintahan desa - Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan - Pendampingan dan
			Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib	Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku		
			Meningkatkan Sistem manajemen akuntabiliatas berbasis kinerja instansi pemerintah	Membangun Sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
		Meningkatnya Kinerja organisasi dan profesionalitas ASN	Meningkatkan sistem Pengendalian internal pemerintah	Peningkatan SPIP melalui perencanaan Dan penganggaran		
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur		
		Meningkatnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kondisi stabilitas politik, keamanan dan ketertiban	Peningkatan stabilitas politik, keamanan dan Ketertiban masyarakat		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					pembangunan daerah - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah - Penelitian dan pengembangan daerah - Penyelenggaraan pengawasan - Pengembangan sumber daya manusia - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum - Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	asistensi - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah - Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah - Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah - Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						- Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah - Pengelolaan barang milik daerah - Penyusunan perencanaan dan pendanaan - Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah - Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan - Penelitian dan pengembangan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan - Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan - Penyelenggaraan pengawasan internal - Setifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional - Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota - Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota - Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

4.3. Kebijakan Pembangunan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kerangka tataruang wilayah kabupaten yang tersusunatas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Konstelasi pusat-pusat kegiatan akan diberikan pada rencana sistem pusat pelayanan, sedangkan rencana jaringan prasaran awilayah akan meliputi sistem prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistemja ringan prasarana utama terdiri atas :

a. Rencana sistem jaringan transportasi darat;
b. Rencana sistem jaringan trans portasi laut;
c. Rencana sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :

a. Rencana sistem jaringan energi / kelistrikan ;
b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c. Rencana sistem jaringan sumberdaya air;
d. Rencanasistem jaringan persampahan;
e. Rencanasistem jaringandrainase;
f. Rencana pengembangansaranawilayah.

4.3.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk olehkota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah berdasarkan hirarki, yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan / atau administrasi masyarakat. Struktur ruang wilayah ini bertujuanuntuk membentuk ruang sebagai satu kesatuan yang dibentuk olehunsur-unsur fungsional, dimana satu sama lain mempunya isifat hubungan timbal balik, dan masing-masing mengemban fungsinya sebaga ipusat pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada pertimbangan agar didapatkan keterkaitan internal-eksternal yang lebih seimbang, dengan memperhatikan pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkat kankapasitas ekonomi dibeberapa wilayah prioritas. Konsepstruktur ruang kota untuk Kabupaten Seram Bagian Timur akan terdiriatas PKW, PKL dan PPK dan PPL dijelaskan pada Gambar IV.2.

Gambar IV.1. Konsep Struktur Ruang Kota Kabupaten Seram Bagian Timur

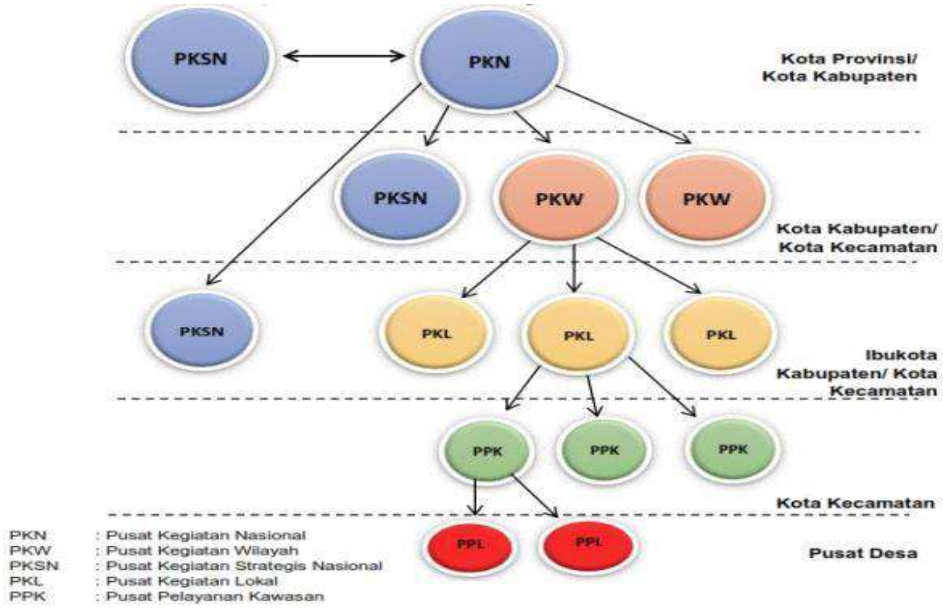

Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah :

1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusatkegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan / atau ;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) adalah :

1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dan mendukung struktur perkotaan yang direncanakan. Sistemtran sportasi yang direncanakan adalah sistem transportasi terintegrasi baik transportasi darat, laut maupun udara dengan pengembangan beberapa pintu gerbang *(multi gate system)*.

Pengembangan jaringan prasarana wilayah seperti listrik, air, dan prasarana pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan perkembangan penduduk dans truktur kota.

A. Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan dimaksud kansebagai kebijakan pembangunan agar tingkat pelayanan wilayah lebih efektif dan efisien, baik pelayanan pemerintahan, pelayanan fasilitas kehidupan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan program-program pengembangan/ pembangunan yang telah direncanakan, serta untuk memperpendek rentang pelayanan pemerintah, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pelayanan fasilitas kehidupan.

Pusat-pusat wilayah yang ditunjuk akan menjadi tempat konsentrasi fasilitas pelayanan umum sesuai kebutuhan wilayah belakangnya dan kecamatan-kecamatan yang dibawahinya.

Berdasarkan kondisi wilayah kabupaten seram bagian Timur, Wilayah pengembangan (WP) dibagi menjadi 6(Enam) yaitu :

1. **Wilayah Pengembangan – I**, dengan pusat pengembangan di Kota Bula(Kecamatan Bula). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP I meliputi pemerintahan, perkotaan, permukiman, pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan.
2. **Wilayah Pengembangan – II**, dengan pusat pengembangan di Kota Werinama (Kecamatan Werinama). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP II adalah perkotaan, pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, perkebunan, peternakan dan pariwisata.
3. **Wilayah Pengembangan – III**, dengan pusat pengembangan di Kota Geser (Kecamatan Seram Timur). Kegiatan yang akan dikembangkan diwilayah ini meliputi pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa dan pariwisata.
4. **Wilayah Pengembangan – IV**, dengan pusat pengembangan di Kota Kata loka (Kecamatan P. Gorom). Kegiatan yang akan dikembangkan diwilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan perdagangan dan jasa dan pariwisata.
5. **Wilayah Pengembangan – V**, dengan pusat pengembangan di Kota Waras-Waras (Kecamatan TutukTolu) Kegiatan yang akan dikembangkan diwilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata.
6. **Wilayah Pengembangan – VI**, dengan pusat pengembangan di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan & jasa dan pariwisata.

Selain pertimbangan dalam menentukan Wilayah Pengembangan diatas, juga keselarasannya dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang berlaku di wilayah Seram Bagian Timur. Program - program pembangunan demi kemudahan pengelolaan pelaksanaannya melibatkan proses pelimpahan kewenangan kepada perangkat pemerintah kecamatan. Oleh karena itu pembagian WP sesuai batas-batas kecamatan diwilayah ini diharapkan dapat memudahkan pengukuran pencapaian target-target pembangunan yang direncanakan dalam RTRW kabupaten. Petarencana wilayah pengembangan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Gambar IV.3.

Gambar IV.2. Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Seram BagianTimur

B. Sistem Perkotaan

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten dan berdasarkan hasil analisis dan kecenderungan perkembangan pusat-pusat kegiatan diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, sistem hierarki pusat-pusat pertumbuhan atau hirarki perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur akan dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten,

yaitu :

1. Kota yang berfungsi sebagai PusatKegiatan Wilayah (PKW), dalam hal ini merupakan kota yang termasuk kedalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN), berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur PKW terdapat di Kota Bula dan Kota Werinama;
2. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan kota yang termasuk ke dalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Provinsi. Kota ini merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan, merupakan pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan RTRW Provinsi PKL untuk Kabupaten Seram Bagian Timur ditentukan di Dataran Hunimua, Kota Geser dan Kota Kataloka;

   Dataran Hunimua adalah ibukota kabupaten definitif yang saat ini berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan dipromosikan menjadi *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*.
3. Kota atau wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-Waras (Kecamatan Tutuk Tolu).
4. Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya. PPL ditetapkan di Kabupaten Seram bagian Timur adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama,

Banggoi R, Waru, Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Utta, Lahema dan Teor.

Sistem pusat-pusat permukiman tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang yang ada, karena permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan pada sistem pusat-pusat permukiman.

Pusat kota-kota dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan kota tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya, baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah kota itu sendiri maupun secara regional atau wilayah kota di sekitarnya.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan kota yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan kota diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan
3. Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
4. Pusat Perhubungan dan Komunikasi
5. Pusat Produksi Pengolahan
6. Pusat Pelayanan sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain)

Kelengkapan prasarana dan sarana yang terdapat pada masing-masing kecamatan akan menjadikan kecamatan tersebut sebagai pusat dari wilayah belakangnya. Dipihak lain terdapat pengelompokkan kecamatan yang membentuk fungsi kecamatan berdasarkan lingkup pelayanan administrasi pemerintahan (Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan).

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kabupaten Seram BagianTimur sesuai dengan masing-masing hierarki pusat pelayanan dan skalapelayanan yang direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka perlu arahan fungsi untuk masing-masing kota yang

berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2028) dapatdilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6.
Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Hierarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
		Fungsi	Kewenangan						
PKW	Bula	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKW	Werinama	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKL	Dataran Hunimua	Regional	Kabupaten	x	x	x	x	x	x
PKL	Geser	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKL	Kataloka	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PPK	Tamher Timur	Kabupaten	Kecamatan		x	x	x	x	x
PPK	Waras - Waras	Kabupaten	Kecamatan		x	x	x	x	x
PPL	Atiahu	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Batuasa	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Kilmuri	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Urung	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Kwaos	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Salagor	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Kian	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Danama	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Banggoi R	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Waru	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Amarsekaru	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Miran	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	P.Panjang	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Utta	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Lahema	Kecamatan	Desa			x	x	x	x
PPL	Teor	Kecamatan	Desa			x	x	x	x

Keterangan:
A : Pusat Pemerintahan Kabupaten
B : Pusa Pemerintahan Kecamatan
C : Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
D : Pusat Perhubungan dan Komunikasi
E : PusatProduksiPengolahan
F : Pusat Pelayanan Sosial (kesehatan, pendidikan dan lain-lain)

Untuk mendukung wilayah tersebut diatas sesuai dengan hierarki kotanya masing-masing seperti:

1. Pusat Perdagangan, jasa dan pemasaranya itu direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti pasar, warung, toko dan bank disetiap wilayah hierarki perkotaan.
2. Pusat Pelayanan Sosial, yaitu :

   (1) Kesehatan, direncanakan pembangunan dan atau

penambahan fasilitas seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik setiap wilayah hierarki perkotaan. Khusus untuk rumah sakit umum yang semula hanya ada di Kota Bula (Kecamatan Bula), akan dikembangkan di Kota Kataloka (Kecamatan P. Gorom).

(2) Pendidikan, direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) disetiap wilayah hierarki perkotaan.

Gambar IV.3. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur

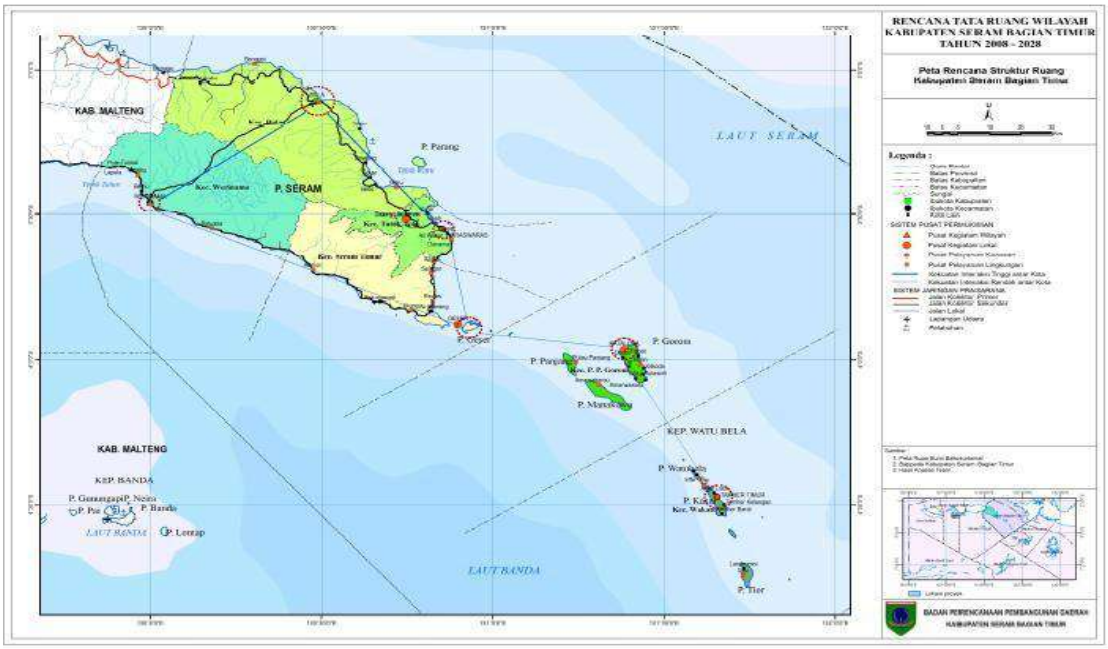

C. Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan

1. Rencana Sisetm Kawasan Perkotaan

Sistem kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai pusat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan dibedakan atas:

a. Kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota

b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kabupaten

c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi perkotaan
d. Kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan daerah yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan perkotaan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan,yaitu:

(1) Pusat Permukiman
(2) Pusat Perkotaan
(3) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
(4) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
(5) Pusat Produksi Pengolahan
(6) Pusat Pelayanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain).

Kawasan perkotaan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah wilayah–wilayah yang dimungkinkan untuk berkembang menjadi kota yang dapat menopang seluruh aktivitas yang berhirarki sebagai fungsi pelayanan. Rencana sistem perkotaan berada pada hirarki pusat pelayanan, yaitu :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdapat pada Kecamatan Bula dan Werinama
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat pada Kecamatan Seram Timur (Geser), Kecamatan Gorom (Kataloka) dan Dataran Hunimua yang akan dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Definitif.
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat pada Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-waras (Kecamatan Tutuk Tolu).

D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pengelolaan kawasan perkotaan dalam konteks pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengacu kepada Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang menetapkan Pusat-pusat Kegiatan Utama dan Pusat-pusat Pengembangan Wilayah. Pusat-pusat yang direncanakan merupakan pusat kegiatan atau pusat pelayanan yang nantinya akan memiliki fungsi sebagai kota yang menjadi orientasi perkembangan bagi kawasan disekitarnya. Pengelolaan kawasan perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan kawasan perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial ekonomi-budaya lainnya.
b. Mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan kawasan perkotaan.
c. Menyusun Rencana Detai Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar pengembangan kawasan perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya.
d. Mengembangkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekitarnya.
e. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan prospek pengembangan kawasan perkotaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

f. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perkotaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas terkait) untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

E. Rencana Sistem Kawasan Perdesaan

Sistem Perdesaan tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang perkotaan yang ada. Fungsi perdesaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan desa tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya yaitu sebagai pusat kegiatan dalam wilayah perdesaan itu sendiri.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan desa yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah kabupaten seram Bagian Timur, maka pengembangan perdesaan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu:

(1) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
(2) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
(3) Pusat Produksi Pengolahan
(4) Pusat Layanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain)

Adapun wilayah perdesaan yang termasuk di dalam kriteria tersebut adalah Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya kriteria pusat lingkungan adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama, Banggoi R, Waru , Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Utta, Lahema dan Teor.

Pada Wilayah Pulau Kesui (Kecamatan Kesui Watubela) akan dijadikan sebagai sentral produksi perikanan dengan cluster pengembangan ***minapolitan*** yang peruntukannya untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan penghasil rumput laut dan Tamher Timur dijadikan Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Dalam UU No. 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pengelolaan kawasan perdesaan adalah:

a. Untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang dapat mendukung kesatuan sistem dan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya.
b. Untuk menciptakan keserasian perkembangan kegiatan pertanian dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya.
c. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan keaneka ragaman hayati.
d. Agar sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dapat dimanfaatkan secara optimal.
e. Untuk mendorong terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat dan aman.

Pengelolaan kawasan perdesaan diwujudkan dalam bentuk:

1. Pengembangan ekonomi perdesaan
2. Penyempurnaan prasarana dan sarana dasar
3. Mengembangkan keterkaitan desa–kota
4. Peningkatan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan.
5. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensisosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat.
6. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perdesaan

dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas atau instansi terkait) secara bersama-sama dengan pemerintahan kecamataan dan pemerintahan desa untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

4.3.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. alam dan sumber daya buatan. Pola ruang kabupaten merupakan gambaran distribusi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya buatan. Penataan ruang berdasarkanfungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
3. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempa dan pantai, sempa dan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air;

4. Kawasan suaka alam dan cagar alam, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
6. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

B. Rencana Hutan Lindung

Secara umum kawasan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Timur direncanakan seluas 96.878,54, Hadengan rincian untuk wilayah Kecamatan Bula dengan luas 36.791,13Ha, Kecamatan Werinama dengan luas 37.723,43Ha, Kecamatan Seram Timur dengan luas 16.196,22 Ha, Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas 246,86 Ha, Kecamatan Pulau-Pulau Gorom dengan luas 4.208,20Ha, dan Kecamatan Kesui Watubela dengan luas 1.712,70,Ha dari luas hutan secara keselurahn. Kawasan Hutan Lindung ini meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air yang berada pada seluruh wilayah hutan yang tersebar diseluruh kecamatan.

D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

1. Kawasan Sempa dan Pantai

Kasawan Lindung Sempa dan Pantai Meliputi :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratur) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2. Kawasan Sempa dan Sungai

Kawasan lindung sempa dan sungai, meliputi:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai ; dan
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Hal ini penting ditetapkan untuk memperkecil tekanan terhadap kawasan-kawasan sumber air dan sedimen. Perlindungan sempa dan sungai merupakan upaya untuk menekan proses sedimentasi yang akan terjadi diperairan pesisir.

3. Kawasan Lindung Spiritual

Kawasan Rencana Kawasan Lindung spiritual di Kabupaten Seram Bagian Timur berada di Desa Bati Kecamatan Kian Darat.

4. Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan Lindung kearifan lokal yaitu“Sasi” yang di berlakukan diseluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar IV.4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar 4.6 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur

E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan hutan mangrove yang terdistribusi di Kecamatan Goromter dapat di Pulau Desa Kataloka, Pulau Panjang, dan Danau Sole dengan luas kurang lebih 29.347 Ha;
2. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Seram Timur terdistribusi

di Kuamor, Desa Airnanang dan Pulau Keffing dengan luas kurang lebih 7.650 Ha;

3. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Bula terrdistribusi di Desa Bula dan dusun di sekitarnya, Desa Englas dan di Pulau Parang dengan luas kurang lebih 32.492 Ha;
4. Kawasan hutan mangrove diKecamatan Werinama terdapat di Desa Bemo dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 5.719 Ha.
5. Suaka alam laut di Karang Bais, Pulau Kon dan Pulau Garogos.
6. Habitat lebah madu yang berada di desa werinama – kecamatan Werinama

Sedangkan kawasan cagar alam meliputi :

a. Kawasan terumbu karang disepanjang perairan pulau-pulau kecil di Kepulauan Watubela, P. Gorom, Pulau Geser, Pulau Panjang, Pulau Parang dan Pulau Karang Bais.
b. Kawasan konservasi populasi rusa yang berada pada Desa Atiahu Kecamatan Werinama;
c. Kawasan Taman Buru pengembangbiakan satwa Rusa yang berada pada Dusun Nif–Desa Dawang Kecamatan Bula
d. Kawasan Pulau akat yang terdapat populasi Burung Kenari.

F. Kawasan Rawan Bencana Alam

Rencana zonasi menurut UU No. 27 Tahun 2007 adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pada kawasan zona rawan bencana, polapengelolaan kawasan dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusiadi kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Tujuan dari pengaturan kegiatan manusi adik

awasan rawan bencana adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan kriteria dan data terkait (Laporan Data dan Analisa), maka diperoleh gambaran wilayah-wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki resiko multi bencana. Resiko multi bencana yang dimaksud adalah resiko bencana gempa, tsunami, banjir dan longsor. Kawasan yang memiliki risiko paling tinggi terdapat di pulau geser.

Hasil identifikasi kawasan-kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa ada beberapa potensi rawan bencana yang perlu ditangani secara serius, antara lain : abrasi, kecelakaan laut, banjir, erosi dan sedimentasi. Beberapa lokasi yang teridentifikasi merupakan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten seram Bagian Timur antara lain :

1. Di muara DAS Masiwang dan Waibobot berpotensi untuk terjadinya banjir yang mengakibatkan sedimentasi di wilayah sekitarnya.
2. Daerah rawan gempa tektonik adalah di Bula, Waru, Masiwang dan kawasan sebelah utara pulau-pulau kecil di Kecamatan Seram Timur yakni Pulau Geser, Gorom, Manawoka dan Madorang.
3. Di bagian selatan yakni di Undur, Kilmuri, Batuasa serta Banda dan sekitamya yang merupakan daerah batas lempeng tektonik adalah daerah rawan tektonik berskala besar berpeluang terjadi tsunami.
4. Daerah sekitar Pulau Igar, Pulau Kon, Pulau Panjang dan antara Pulau Geser dan Pulau Keffing yang terimbas oleh ruseddies.
5. Daerah muara sungai Masiwang dan Salas berpotensi untuk terjadinya bencana pelayaran karena adanya "saaru".
6. Daerah rawan abrasi pantai berada di daerah Kepulauan

Gorom, Watubela dan Werinama Arahan-arahan dalam

pengelolaan kawasan rawan bencana antara lain :

1. Sosialisasi Kawasan-kawasan rawan bencana kepada publik;
2. Membatasi arah pengembangan pemukiman dan pengembangan fasilitas publik pada kawasan tersebut;
3. Apabila kegiatan pembangunan fisik akan dilakukan pada kawasan ini, sedini mungkin dilakukan peringatan untuk melakukan pembangunan fisik yang memberikan tekanan pada tahap konstruksi;
4. Vitalisasi kelembagaan pemantau dan pengawas dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

G. Rencana Kawasan Lindung Geologi

Rencana kawasan lindung geologi di kawasan sekitar mata air yang tersebar diseluruh mata air di Kabupaten Seram Bagian Timur.

H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya

Rencana kawasan lindung lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan Pulau Karau Karang bais, Sebagai Taman Bawah Laut.
2. Kawasan Pulau Kon dan Pulau Garogos, sebagai tempat pelestarian sumber makanan ikan dan taman bawah laut.
3. Kawasan Pulau Akat, sebagai taman bawah laut.
4. Kawasan Pulau Igar, sebagai taman bawah laut.
5. Kawasan Pulau Kurkof sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.
6. Kawasan Pulau Baam sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.

I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kegiatan budidaya dilakukan diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pengembangan

kawasan budidaya ini dilakukan untuk saling mendukung pengembangan kawasan lindung guna menjaga kelangsungan pengembangan kawasan budidaya. Selain itu rencana pengembangan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan fungsi, sinergi potensi, daya dukung, keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut, dengan strategi pengembangan diantaranya:

1. Menciptakan peluang dan pemerataan pengembangan ekonomi bagi setiap jenis dan golongan usaha, serta mencadangkan bagian bagian tertentu dari kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut untuk kepentingan pelayanan umum;
2. Program pembangunan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah.
3. Meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan kota.

Berikut adalah potensi kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur :

Table IV.7. Potensi Kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
Madu	WP.I	Kec.Werinama	Werinama,Tum,Gusalaut,Osong,Batuasa,Bemo
	WP.II	Kec. Siwalalat	Atiahu, Tunsai,Polin
	WP.III	Kec. Seram Timur	Urung
	WP.IV	Kec. Kilmuri	Kilmuri
Gaharu	WP.I	Kec.Werinama	Tersebar di seluruh Wilayah Hutan Werinama
	WP.II	Kec. Seram Timur dan Kec. Kian Darat	Kilmuri, Urung, Kwaos, Kian Laut, Kian Darat
	WP.III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote, Banggoi, Bula, Salas, Dawang, Belis, Waru
	WP.IV	Kec. Tutuk Tolu	Danama, Kilbat, Sesar, Gah (Kufar)
	(Dataran Pulau Seram)		

Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
Rotan	WP.I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo,Atiahu, Tunsai, Polin, Elnusa, Lilyama, Hatumeten, Batuasa, Tobo, Osong, Gusalaut, Tum
	WP.II	Kec. Seram Timur dan KecKilmuri	Kilmuri,Urung
	WP.III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote,Banggoi,Salas,Dawang,Solan,Belis,waru
	WP.IV	Kec. Tutuk Tolu	Gah (Kufar), Waras - Waras
	(Dataran Pulau Seram)		
Damar	WP.I	Kec.Werinama	Osong, Tum, Bemo, Werinama (Balakeu)
	WP.II	Kec.BulaBarat	Jakarta Baru
Karet	WP.I	Kec.Werinama	Bemo/Werinama

Gambar IV.7. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur

J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi konversi;

1. Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang sesuai dengan kriteria kawasan penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai fungsinya dan eksploitasinya

dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih.

2. **Hutan Produksi Tetap**

   Merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. **Hutan Produksi Konversi**

   Merupakan hutan yang dapat di konversi menjadi kawasan lain seperti kawasan yang diarahkan sebagai kawasan budidaya lainnya yang mempunyai prospek lebih menguntungkan dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

   Luasan kawasan hutan produksi terbatas, tetap dan konversi diuraikan pada Tabel IV.5 berikut.

Tabel IV.8.
Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	LUAS LAHAN (Ha)		
	HP Terbatas	HP Tetap	HP Konversi
Bula	105.391,53	35.599,87	51.517,19
Werinama	96.014,08	1.411,22	29.789.67
Seram Timur	48.447,88	6.543,84	37.616.42
P.Gorom	20.555,32	-	9.061.01
Tutuk Tolu	-	3.225,65	20.401.48
Kesui Watubela	-	-	-
Total	**270.408,82**	**46.780,58**	**148.385.77**

Status lahan yang masuk pada hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) akan di alih fungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena kawasan tersebut sudah dibangun kawasan pemukiman dan infrastruktur lainnya.

Berikut ini usulan alih fungsi hutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain :

Tabel IV.9.
Usulan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Desa Hote – Desa Jakarta Baru	HP	1. Pada lokasi sekitar DAS Bobi dan sepanjang pesisir pantai Desa Hote - Banggoi telah didiami oleh Pemukiman Penduduk Lokal 2. Pemukiman Transmigrasi UPT.T,UPT.Y,UPT. Z. 3. Terdapat areal sawah di Desa Jakarta Baru dan di Desa Waiketam Baru	APL	1. Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah 2. Perkebunan : Telah memperloleh Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemukiman Lokal dan Transmigrasi	13,00
Desa Banggoi – Desa Waimatakabo	HPK	1. Terdapat pemukiman Penduduk Lokal : Desa Banggoi dan Desa Waimatakabo 2. Pemukiman Transmigrasi UPT R, UPT 12, UPT D5, Wimatakabo,UPTD 6. 3. Terdapat areal sawah di Desa Waimatakabo dan Desa Akibobo	APL	Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah Perkebunan : Termasuk dalam ijin lokasi Perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Banggoi Internasional Argo	7.745
Desa Bula – Dusun Englas	HPK	1. Lokasi Pemukiman Penduduk 2. Merupakan Areal Wisata Pantai 3. Areal untuk Pinjam Pakai Kawasan Pertambangan a.n. PT. Kuppec		Pemukiman Lokal, Pengembangan Wisata Pantai dan Lokasi Pengembangan Industri	1.041
Desa Nif –Desa Dawang	HP/HPK	Lokasi Pemukiman Penduduk		Areal Pelestarian Rusadan tanaman Wisata Baru	800
Desa Solan	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	366
Desa Belis		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	387
Desa Waru		Areal Pemukiman Penduduk	HPK	Perkebunan dan Pemukiman	1.573
Desa Gaa		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemabangunan KawasanBandaraSBT	445
Desa Gaa Kec. Tutuk Tolu	HPK	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber ProducersII	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	6.02
	HPT	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber ProducersII	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	2.09
Desa Salagor /KianLaut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan Marmer	1.622
Desa Kian Laut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
Dusun Air Nanang	HP	Areal Hutan Mangrove	Kawasan Konsevasi	Pelesatarian Hutan dan Ekosistem Mangrove	500
Desa Urung	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	1.635
Desa Kilmuri	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	2.846

Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Dusun Tum /GusaLaut	HP	Areal Pemukiman Penduduk dan IUPHHK PT. Pribumi Sakti daya	APL	Pemukiman, Perkebunan kelapa sawit dan Pengembangan Transmigrasi	
Desa Werinama	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan	2.500
Desa Werinama	HPK/HPT	Areal Pemukiman Dan Habitat Lebah Madu alam	Kawasan Konsevasi	Pelesatarian Habitat Lebah Madu	2.000
Desa Bemo	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
DAS Bobot	HPK/HPT	Areal Das Bobot dan Wilayah Pekan Rusa	Kawasan Konsevasi	Areal Pelestarian Rusadan Areal Taman Wisata Baru	

K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi:

1. Kecamatan Bula : Dusun Sesar dan Wailola, Dusun Nif,
2. Kecamatan Teluk Waru: Desa Belis, Desa Waru
3. Kecamatan Bula Barat Desa Banggoi.
4. Kecamatan Seram Timur : Desa Guli-guli, Desa Undur
5. Kecamatan Kilmuri: Desa Kilmury.
6. Kecamatan Kian Darat : Desa Selagor,DusunAruan,DesaKian.
7. Kecamatan Gorom Timur : Desa Miran, Desa Amarwatu, Desa Amar dan Desa Nama.
8. Kecamatan Werinama : Desa Batuasa, Desa Bemo.
9. Kecamatan Siwalalat : Desa Atiahu
10. Kecamatan Tutuk Tolu : Dusun Kufar, Desa Gah, Desa Danama dan Desa Kilga
11. Kecamatan Kesui Watubela : Desa Ilili dan Desa Amarlaut

L. Kawasan Peruntukan Pertanian

Keberadaan kegiatan pertanian ini diarahkan pengembangan nya terutama pada wilayah yang mempunyai jenis tanah dengan tingkat kesuburan tinggi serta sebagian besar penduduknya mempunyai budaya bertani. Alokasi pengembangan kegiatan ini diantaranya direncanakan di:

1. Kecamatan Bula dengan komoditas utama tanaman padi;
2. Kecamatan Seram Timur dan Werinama dengan komoditas utama jagung, ketela dan umbi-umbian.

Produk-produk pertanian tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupatan Seram Bagian Timur juga dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku pengolahan agro industri yang bisa dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan pertanian ini perlu ditingkatkan produksinya bahkan bila memungkin produksinya dapat mensuplai kebutuhan ekspor.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kawasan budidaya pertanian, maka pengelolaan pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada peningkatan produksi tanaman semata, tetapi juga kepada usaha-usaha untuk mempertahankan sumberdaya lahan selama mungkin.

Tabel IV.10. Luas Lahan Kawasan Pertanian

Kecamatan	Luasan(Ha)		Presentase	
	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering
Bula	-	1.797	-	0,76
Werinama	44	1.210	0,01	0,63
SeramTimur	-	273	-	0,28
P.P.Gorom	-	91	-	0,67
TotokTolu	-	696	-	1,64
Wakate	-	1.110	-	18,25
Total	**44**	**5.176**	**0,01**	**0,88**

Sedangkan untuk potensi pertanian menyebar di Kecamatan Bula dan Kecamatan Werinama :

1. Waimatakabo
2. Waisamet
3. Akebobo D6
4. Waiketam Baru
5. Jakarta Baru
6. Sumber Agung
7. Jembatan Basah

8. Waikudal/Batuasah
9. Kec. Werinama

Sedangkan untuk hortikultura dialokasikan lahan yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan, yang meliput :

a. Kecamatan Bula dengan luas kurang lebih 1.525 Ha;
b. Kecamatan Werinama dengan luas kurang lebih 750 Ha;
c. Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas kurang lebih 250 Ha.

Gambar IV.7. Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur

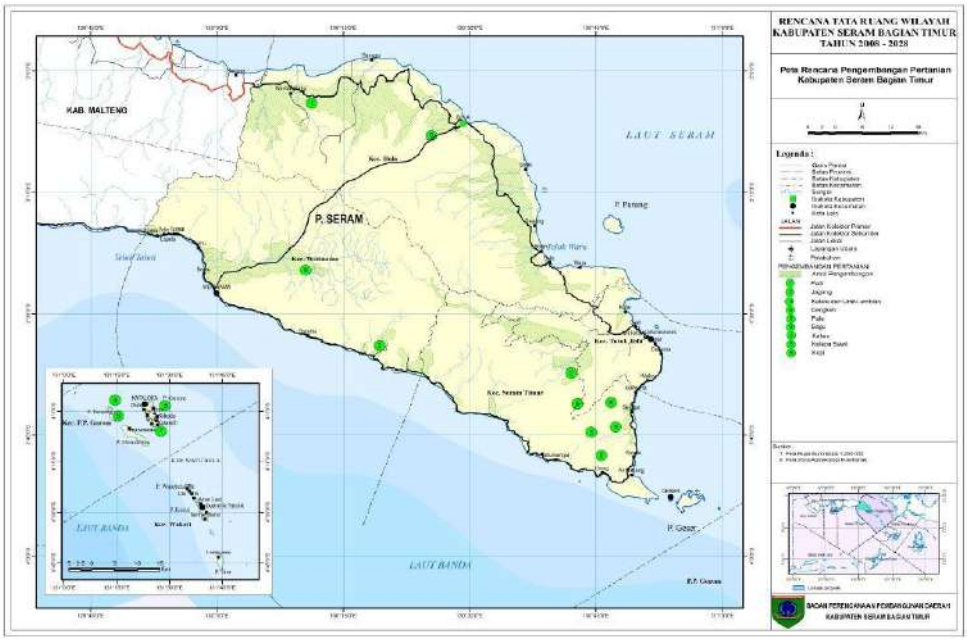

M. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan dengan jenis komoditi utama berupa aneka buah-buahan dan hasil perkebunan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang baik. Agar jenis tanaman ini mempunyai nilai ekonomis tinggi perlu dilakukan upaya penguasaan teknologi pertanian dan perkebunan, baik melalui pelatihan, bimbingan atau studi banding. Untuk itu diperlukan peranaktif Pemerintah Kabupaten terutama dalam membangun BLK-BLK di sentra – sentra kegiatan pertanian yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para petani guna meningkatkan kemampuan

untuk menguasai teknologi pertanian dan perkebunan.

Pengembangan kawasan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur di alokasikan di Kecamatan Seram Timur (Cengkeh dan Kopi), Bula (kelapa) dan Pulau Gorom (Cengkeh, Kelapa, Pala) serta di lokasi lain yang potensial untuk dikembangkan kegiatan perkebunan. Produk-produk perkebunan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk juga dipasarkan di Ambon dan Surabaya.

Pada saat ini kawasan perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur baru memproduksi bahan mentah atau bahan baku, dan kedepan diharapkan akan dapat dinaikkan nilai tambahnya menjadi produk olahan yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan industri olahan hasil perkebunan. Namun demikian didalam upaya pengembangannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya masukan teknologi (berupa pengetahuan, alat dan metoda) untuk menyediakan lahan perkebunan siap tanam.
2. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal jenis dan kualitas bibit yang akan ditanam.
3. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan tanaman (berupa pemupukan dan penggunaan obat - obatan tanaman).
4. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan lahan perkebunan, sehubungan dengan teridentifikasikannya sebagian wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai kawasan yang rawan longsor dan rawan gempa.
5. Penggunaan jenis dan kuantitas pupuk dan obatan-obatan tanaman yang ramah lingkungan, untuk mencegah pencemaran terhadap air tanah dan air permukaan / sungai.
6. Adanya masukan teknologi pasca panen secara kontinyu.

Tabel IV.11.
Luas Lahan Perkebunan

KECAMATAN	LUASAN LAHAN (HA)	%
Bula	96.931	30,44
Werinama	119.047	37,39
Seram Timur	1.908	0,59
P.Gorom	70.286	22,07
TotokTolu	29.762	9,35
Wakate	477	0,15
Total	**318.411**	**100**

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi Perkebunan dengan komuditas unggulan adalah Pala, Cengkeh, Coklat dan Kelapa, tetapi yang menjadi komoditas unggulan Primer adalah Pala dengan penyebaran lokasi terbesar berada pada kecamatan P.Gorom dan Kesui Watu bela. Berikut ini tabel wilayah sebaran komoditas unggulan (Tabel 4.10)

Tabel IV.12. Wilayah Komoditas

No	Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komodit Unggulan Masing-Masing Kecamatan
1	Pala	WP.I	Kec. Pulau Gorom, Gorom Timur dan Pulau Panjang	Kataloka, Ondor, Day, Mida, Amarwatu, KotaSirih, Kilkoda, Miran, Rarat, Amarsekaru, Pulau Panjang
		WP.II	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Tamher Warat, Kelangan, Teor
		WP.III	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Polin, Tunsai, Lapela, Hatumeten
		WP.IV	Kec.TutukTolu	Danama, Kilbat, Kilmoy,Sesar, Air Kasar
2	Cengkeh	WP.I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Atiahu, Tunsai Polin Batuasa, Tobo
		WP.II	Kec. TutukTolu	Danam, Kilbat, Kilmoy, Sesar, Air Kasar,
		WP.III	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Utta, Amar laut, kelangan, Tamher Timur, Tamher Warat, Teor(Kilwouw)
		WP.IV	Kec. P. Gorom dan Gorom Timur	Ondor, Kataloka, Amar sekaru, Mida, Day, Amarwatu, Miran, Rarat
3	Coklat	WP.I	Kec. TutukTolu	Gah, Waras - waras
		WP.II	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Atiahu, Werinama, Bemo, Batuasa, Tum, Osong, Elnusa, Abuleta, Lapela, Lilyama, Dihil.
		WP.III	Kec.Bula,Kec.BulaBarat,Kec.TelukWaru	Waru,Salas,Dawang, Hote,Banggoi

No	Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komodit Unggulan Masing-Masing Kecamatan
4	Kelapa	WP.I	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo, Atiahu, Elnusa, Lapela, Dihil, Lilyama
		WP.II	Kec.TutukTolu	Waras-waras,Gah
		WP.III	Kec. Kesui Watubela, Kec.Pulau GoromKec, Pulau Panjang, dan Kec.Teor	Teor (Rumui, Rumalusi, Kilwouw, Kerkar, Wermaf Lapang), Kesui (Tamher Warat, Tamher Timur, Utta)
		WP.IV	Kec. Bula, kec. Bula Barat dan Kec.Teluk Waru.	Hote Banggoi, Salas, dawang, Belis, Waru, Karai

N. Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kawasan yang baik bagi kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan laut melalui kegiatan penangkapan ikan di wilayah mereka, baik di wilayah Pulau-Pulau Gorom, Seram Timur, Bula maupun Werinama. Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan di seluruh wilayah ini terdiri dari empat golongan besar sumber daya perikanan tangkap, yaitu sumber perikanan pelagis, demersal, udang dan karang.

Bila mengacu pada kondisi ideal suatu perairan yang dijadikan sebagai daerah penangkapan, maka kriteria yang dibutuhkan adalah :

Perairan harus memiliki kondisi, dimana ikan datang dengan mudah secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, dan daerah itu merupakan suatu tempat yang baik bagi habitat mereka.

Perairan tersebut akan menjadi tempat dimana nelayan dengan mudah mengoperasikan alat penangkapan ikan. Perairan tersebut akan dialokasikan sebagai suatu tempat yang bernilai ekonomis.

Pemilihan suatu perairan sebagai daerah penangkapan akan dibuat dengan pengertian yang pantas secara efisien, menyenangka ndan penangkapannya bernilai ekonomi. Dengan demikian, lingkungan perairannya harus memadai sesuai dengan

tingkah laku ikan berdasarkan data hasil penelitian kondisi oseanografi dan meteorologi, musim penangkapan diperoleh dari akumulasi berbagai pengalaman penangkapan setelah dilakukan operasi penangkapan ikan oleh nelayan, dan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan prinsipekonomi.

Perairan yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timurbila mengacu pada batas wilayah administratif menurut UU No: 32 Tahun 2004 memiliki batas wilayah terjauh adalah 1/3 dari 12 mil laut atau 4 mil laut dari batas surut terendah, bila tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan wilayah perairan Kabupaten atau Provinsi lainnya yang berdampingan. Wilayah ini merupakan daerah penangkapan yang legal dimiliki untuk dimanfaatkan sumberdayanya oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, pada kenyataannya masyarakat setempat terutama nelayan penangkap ikan juga melakukan aktifitas penangkapan ikan sampai di luar batas perairan 4 mil laut tersebut. Luas perairan (daerah penangkapan ikan) per wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur pada batas 0-4 mil laut adalah 5.947,98 Km^2 dan 4-12 mil laut adalah 11.198,28 Km^2.

b. Budidaya Perikanan

Rencana pengembangan budidaya perikanan yang dapat digunakan untuk kegiatan seluas 8.274,69 ha, luasan tersebut terbagi pada beberapa wilayah perairan yaitu perairan Kecamatan Bula padalokasi Pulau Parang dengan total luas ±536 Ha, Kecamatan Seram Timur pada lokasi P. Keffing, P. Geser, P. Kilwaru, P. Seram Laut, P. Kifar, P. Neding, Desa Kuffar, Desa Urung dengan total luas ± 5.348 Ha dan Kecamatan Gorom pada lokasi P. Garogos, P. Panjang, P. Manawoka dengan total luas ±2.391 Ha. Areal terluas yang dapat dimanfaatkan sebagai areal kegiatan usaha budidaya laut adalah perairan Desa Kuffar.

Tabel IV.13. Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya

Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Budidaya
P. Parang	323,43	Ikan Kerapu
P. Parang	119,92	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Parang	92,46	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Keffing	794,66	Rumput laut, Teripang
P. Geser	99,81	Rumput laut
Kilwaru	407,98	Rumput laut
P. Seram Laut	324,87	Rumput laut
P. Kifar	356,80	Rumput laut
P. Neding	356,80	Rumput laut
P. Garagos	315,24	Rumput laut
P. Panjang	1.080,10	Rumput laut, Teripang
Manawoka	254,70	Rumput laut
P. Gorom	733,62	Rumput laut, Ikan
Kufar	2.123,74	Udang
Urung	924,85	Penyu
Jumlah	**8.274,69**	

Gambar IV.8. Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur

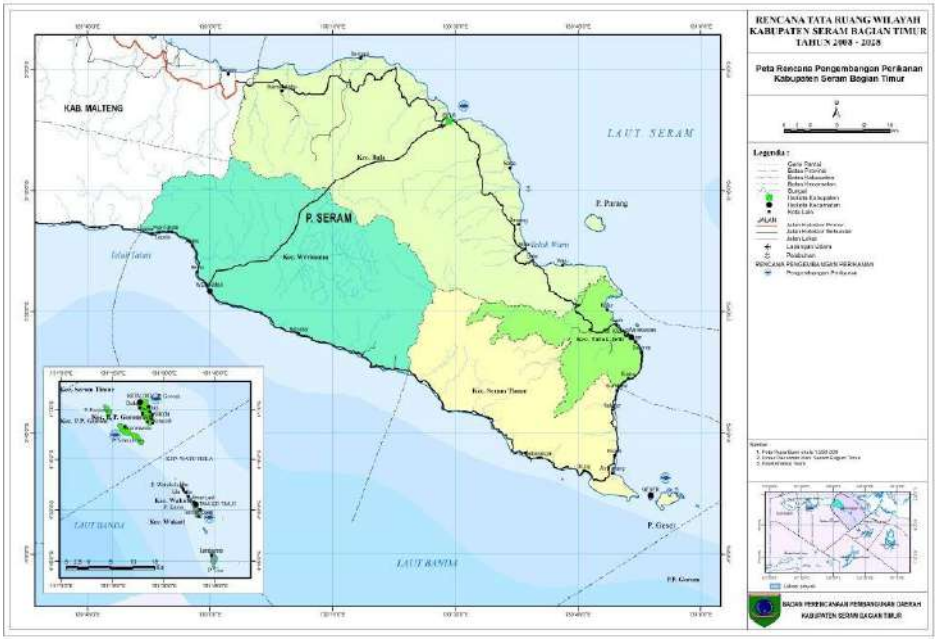

c. Pengolahan Ikan

Rencana pengolahan ikan berada di Desa Kuffar Kecamatan Tutuk Tolu.

O. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan saat ini yang sudah berkembang berupa penambangan Minyak bumi dan menjadi primadona pertambangan dan energi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pertambangan minyak ini berada di Kecamatan Bula telah di eksploitasi sejak jaman Belanda dankini dikelola oleh swasta. Selain minyak bumi terdapat pula bahan galian Cyang telah di kembangkan dan dipasarkan ke kabupaten lain. Di pesisir pantai Kecamatan Bula, Kecamatan Geser dan Kecamatan Werinama diindikasikan terdapat bahan tambang Zirkon. Potensi pertambangan dan energi selain minyak bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur dijelaskan pada Tabel IV.11.

Tabel IV.14. Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Hasil Tambang	Lokasi	Jumlah Cadangan (M^3)	Keterangan
Lempung	1. W. Bobi (Bula) 2. W. Balasai (Bula) 3. Pantai Sisai-Pantai Fufa 4. W. Nief (bula) 5. Werinam	7.500.000 23.680.000 4.790.000 52.960.000 17.250.000	Bahan baku genteng, bata dan tembikar
Batu Gamping (Marmer)	1. Desa Gah 2. Desa Selangor 3. Desa Tah 4. Pulau Kasui	3.987.500.000 3.256.333.333 58.660.000 783.291.666	Bahan baku marmer, semen portland, dan keperluan industry lainnya.
Emas	Kecamatan Bula	Belum diketahu	Dalam tahap penelitian
Zirkon	Pesisir pantai Bula, Geser Dan Werinama	Belum diketahu	Dalam tahap penelitian
Batubara	Kecamatan Bula	Belum diketahu	Dalam tahap penelitian

Jenis Hasil Tambang	Lokasi	Jumlah Cadangan (M³)	Keterangan
Sirtu	1. W.Bobo 2. W.Matakabo 3. W.Bobi 4. W.LolaBesar 5. W.Fufa 6. W.BulaBesar 7. W.Botifar 8. W.Kola 9. W.Nief 10. W.Dulak 11. W.Koba 12. W.Nolt 13. W.Mud 14. W.Nawil 15. W.Nusalaut 16. W.Laita 17. W.Bobot	1.210.800 7.548.000 3.666.000 2.454.000 2.254.000 1.048.000 2.054.000 2.188.000 2.880.000 44.580 902.400 829.200 525.800 839.000 226.200 54.720 30.330.000	

Kawasan pertambangan di Kabupaten Seram Bagian Timur di kembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan kondisi geologis yang rawan gempa. Agar kawasan pertambangan ini tidak merusak lingkungan, kegiatan ini perlu diawasi secara ketat perkembangannya dan dibuat aturan yang mengharuskan para investorini untuk menguruk bekas galiannya agar tidak meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang dapat menimbulkan dampak negatif / kerusakan terhadap lingkungan. Investor juga memiliki kewajiban menanami kembali kawasan yang telah mereka reklamasi dengan pohon-pohon spesies lokal yang pernah ada di kawasan ini sebelumnya. Kegiatan pertambangan galian C pada pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan perlu dibatasi, sehingga dapat dihindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada aspek-aspek pelestarian lingkungan, kegiatan penambangan ini harus dibatasi dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kegiatan penambangan pasir pantai atau sungai yang berada di daerah rawan bencana harus dihentikan. Izin eksploitasi untuk Kuasa Penambangan (KP) diberikan setelah investor melakukan penelitian daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang akan dilakukan. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah bencana lingkungan yang kerap terjadi di daerah pertambangan dan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Adapun pengelolaan kawasan pertambangan adalah:

(a) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

(b) Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus di rehabilitasi / reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/ atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

(c) Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*topsoil*) untuk keperluan rehabilitasi / reklamasi lahan bekas penambangan.

Gambar IV.10 Peta Konsesi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur

P. Kawasan Peruntukan Industri

Upaya pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pengembangannya pada kegiatan industri skalakecil dan menengah yang berbasis pada pengembangan sumber dayaalam lokal. Kawasan industri merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (industrial estate) di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui badan / dinas / instansi terkait, atau yang penanganan pengembangan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten, yang dilengkapi berbagai prasarana dan sarana transportasi, jaringan utilitas, serta fasilitas penunjang lingkungan.

Pengembangan kawasan industri dipengaruhi oleh jenis industri komoditas unggulan dan keterkaitan industri terhadap perekonomian. Keterkaitan kegiatan industri terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Keterkaitan ke belakang adalah hubungan industri tersebut dengan sektor / industri yang menyediakan bahan baku. Keterkaitan kedepan adalah hubungan antara industri tersebut dengan sektor/industri yang menggunakan output industri tersebut. Penentuan daerah industri berdasarkan potensi daerah masing - masing, mengingat Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah kepulauan maka penentuan lokasi industri menyebar berdasarkan potensi unggulan daerah setempat :

Tabel 4.15. Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Industri	Potensi	Pengelola
Bula	Meubel	Kayu	Dinas Koperindag
Werinama	Meubel dan Anyaman	Kayu dan Rotan	Dinas Koperindag
Seram Timur	Pengolahan Ikan, Udang dan Rumput Laut	Perikanan	Dinas Perikanan dan Dinas Koperindag
P. Gorom	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Cengkeh dan Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian

Kecamatan	Industri	Potensi	Pengelola
Tutuk Tolu	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
Kesui Watubela	Pengolahan Ikan, Udang, Rumput Laut, Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian

Untuk menghindari dampak lingkungan, kegiatan industri yang akan dikembangkan perlu di lakukan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta memperhatikan pengolahan limbah industri mengikuti baku mutu lingkungan yang berlaku. Sedangkan untuk melayani kegiatan masyarakat yang bekerja / berkunjung di lingkungan industri, padatiap zona / sentra kawasan industri akan dikembangkan pusat pelayanan yang dilengkapi fasilitas dan prasarana yang memadai dengan jenis pelayanan sesuai arahan rencana struktur tata ruang.

Q. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan analisis kondisi biofisik, oseanografi dan kehadiran habitat utama dengan disertai keanekaragarnan sumberdaya hayati didalamnya rnaka terdapat sejumlah lokasi di perairan pesisir dan laut Kabupaten Seram Bagian Timur yang layak dikembangkan rnenjadi daerah wisata yaitu wisata budaya dan wisata alam. Pariwisata budaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan lokasi-lokasi yang menjadi pengembangan wisata alam dimaksud adalah:

1. Kecamatan Seram Timur:
   - Kiffura;
   - Keffing;
   - Urung;
   - Kon;
2. Kecamatan Pulau Gorom
   - Garogos
   - Amarsekaru;
   - Gorom;
   - Wawatu.

3. Kecamatan Werinama
   - Tobo;
   - Hatumeten;
   - Osong;
   - Batuasa.
4. Kecamatan Bula
   - Englas;
   - Sesar;
   - Waihul.
5. Kecamatan Teluk Waru
   - Pulau Parang,
6. Kecamatan Bula Barat
   - Hote;
   - Silihan.
7. Kecamatan Tutuk Tolu
   - Pulau Akat.
8. Kecamatan Kesui Watubela
   - Pulau Igar;
   - Pulau Baam.
9. Kecamatan Teor
   - Pulau Kurkaf.

Seluruh lokasi yang disebut di atas memiliki keindahan pesisir pantai, terumbu karang danke ragaman biota yang cukup tinggi, sehingga memberikan nuansa panorama pesisir dan bawah laut yang unik dan menarik. Lokasi-lokasi tersebut merupakan spot untuk berenang (*Skin Diving*) dan menyelam *(Scuba Diving)* baru, serta ekowisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Berikut ini merupakan potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur yang tersaji dalam Tabel IV.13

Tabel IV.16. Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Danau Sole	Wisata Bahari (Karang, Magrove, Ikan, Pasir Putih)	Amar sekaru	Pulau Gorom
Pantai Gumummae	Wisata Bahari (Surfing dan Diving) dan Wisata Alam	Bula	Bula
Karang Bais	Wisata Bahari / Wisata Bawah Laut (Ikan, Terumbu Karang, Surfing, Diving)	Hote	Bula Barat

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Pulau Akat	Penyangga Kota Kabupaten Hunimua, Wisata Bahari, Pulau Terapung (Ikan, Burung Kenari, Surfing, Diving	Air Kasar	Tutu kTolu
Pulau Madoran, Kidan, Neden	Wisata Bahari	Kian Darat	Kian Darat
Gugus Pulau Nukus, Khon dan Garogos	Wisata Bahari, dan Wisata Alam	Kataloka	Pulau Gorom
Gugus Batu	Wisata Sejarah dan Budaya	Kian Darat	Kian Darat
Penangkaran Rusa	Wisata cagar Alam (dijadikan Taman Perburuan Rusa)	Nif dan Werinama	Bula dan werinama
Air Terjun	Wisata Alam	Gusa Laut	Werinama

Gambar IV.10. Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur

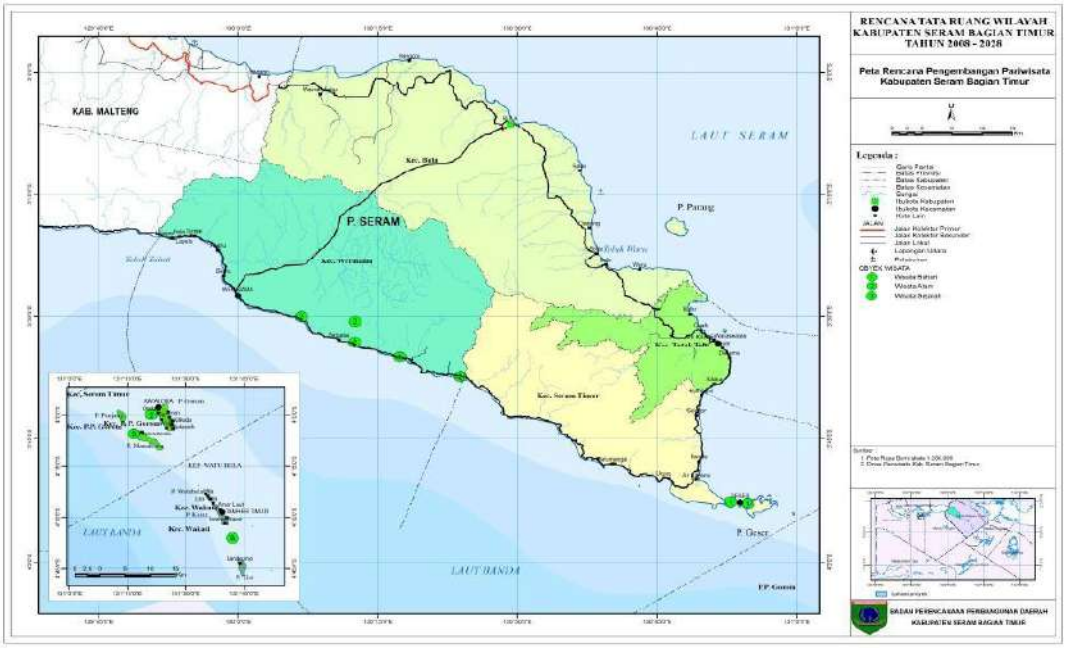

R. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan

permukiman bertujuan untuk :

1) Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia 2) Memberikan arah bagi distribusi penduduk dan pertumbuhan wilayah 3) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain. Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah terbentuknya satuan-satuan lingkungan berupa kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Pengembangan kawasan perumahan di upayakan menggunakan konsep *neigh borhood unit* yang dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana pelayanan umum yang memadai, sehingga penduduk yang tinggal di lingkungan perumahan tersebut sudah dapat terlayani kebutuhan pokoknya oleh pusat pelayanannya

Gambar IV.11. Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Pengembangan kawasan perumahan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil yang umumnya tumbuh secara alami dan dibangun secara horisontal sesuai kebutuhan, sedangkan penyediaan fasilitas pelayanan umum dapat dibangun melalui swadaya masyarakat yang dibantu oleh pemerintah

kabupaten. Sedangkan pengembangan lingkungan perumahan oleh pemerintah kabupaten dititik beratkan pada penataan lingkungan perkampungan, yang dilakukan melalui perbaikan dan peremajaan rumah dan lingkungannya, seperti program perbaikan kampung dengan mengikutsertakan sumberdaya masyarakat setempat.

Pada saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pengembangan pemukiman transmigrasi memakai Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP) yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Werinama dan Kecamatan Bula.

Tabel IV.17. Penyebaran Lokasi Transmigrasi

Kecamatan	UPT	Lokasi
Kec. Bula Barat	UPT.U	Aki Ternate
	UPT.R	Banggoi
	UPT.T	Jakarta Baru
	UPT.X	Banggoi
	UPT.Y	Hote
	UPT.Z	Hote
Kec.Werinama	UPT Batuasa	Batuasa

BAB.V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

Indikasi rencana program tahun 2024 didasarkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Maluku guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 8 (Delapan) Kelompok diantaranya ; 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024.

Pada dasarnya, Program kegiatan yang disusun pada level Kabupaten mengacu pada program yang disusun pada level nasional dan provinsi. Ada 7 Prioritas Nasional (PN) yang menjadi acuan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangnan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbunhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim; dan
7. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Sinkronisasi dan keterkaitan Prioritas Pembangunan tersebut disajikan dalam tabel V.1 berikutini:

Tabel V.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
PN 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Provinsi Ke 1 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Prioritas Daerah Ke 1 : Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan
	Prioritas Provinsi Ke 4 : Pemantapan Kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau	Prioritas Daerah Ke 2 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur
	Prioritas Provinsi Ke 5 : Penguatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	
PN 2 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Provinsi Ke 3: Pemantapan Suasana Kondusif, Damai,harmonis Dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi Dan Pariwisata	Prioritas Daerah Ke 3 : Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat
PN 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Provinsi Ke 6: Pemantapan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata Dan Berkualitas;	Prioritas Daerah Ke 1 : Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan
		Prioritas Daerah Ke 2 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur
		Prioritas Daerah Ke 4 : Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah
		Prioritas Daerah Ke 5 : Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah
PN 4 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Prioritas Provinsi Ke 2: Pengeloalaan Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Industri Pengolahan Yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan	Prioritas Daerah Ke 3 : Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi

Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
		Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat
PN 5 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Provinsi Ke 3: Pemantapan Suasana Kondusif, Damai,harmonis Dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi Dan Pariwisata	Prioritas Daerah Ke 6 : Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	Prioritas Provinsi Ke 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mutu Pelayanan Publik	
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim		
PN 7: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Provinsi Ke 6 : Pemantapan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata Dan Berkualitas;	Prioritas Daerah Ke 4 : Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah

Prioritas RKPD dicapai melalui instrumen program prioritas. Program prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 disajikan dalam tabel V.2. berikut ini.

Tabel V.2 Program Prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2024

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM	66,20	- Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - PendidikdanTenaga Pendidikan - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan - Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75,8		
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur	indeks Konektifitas Daerah (IKD)	50,26	- Pemberdayaan sosial - Rehabilitasi sosial - Perlindungan dan jaminan social - Penanganan Bencana - Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengembangan Permukiman - Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Perencanaan dan Pembangunan Industri - Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Penanganan Kerawanan Pangan - Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengelolaan Perikanan Tangkap - Pengembangan Perumahan	- Dinas Sosial - Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			- KawasaN Permukiman - Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Penempatan Tenaga Kerja - Hubungan Industrial - Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Pengelolaan Pendidikan - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Pengelolaan sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan penguatan Potensii Unggulan daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (IID)	100	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi - Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengembangan UMKM	- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	67,5		
Peningkatan dan pengembangan infrastruktur serta konektifitas antar wilayah	Tingkat Aksesibilitas	55,1	- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) - Pengelolaan Pelayaran - Pengelolaan Perbangan - Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Pengembangan pemukiman - Penataan Bangunan Gedung - Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Penyelenggaraan jalan - Pengembangan Perumahan - Kawasan Permukiman - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	- Dinas Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat
		Tinggi		

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Umum (PSU)	
Peningkatan investasi daerah dan penguatan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID	100	- Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian - Pengelolaan perikanan tangkap - Pengelolaan perikanan budidaya - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	- Dinas Pertanian - Dinas Perikanan
	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	67,5		
Optimalisasi Reformasi dan Pelayanan Publik	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	B	- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Pendaftaran Penduduk - Pencatatan Sipil - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Administrasi pemerintahan desa - Penyelenggaraan pengawasan - Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi - Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik - Pengelolaan Aplikasi Informatika - Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi - Pengelolaan keuangan daerah - Pengelolaan pendapatan daerah Pengelolaan barang milik daerah - Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah - Penelitian dan pengembangan daerah	- Badan Kepegawaian, Pelatihan dan SDM - Inspektorat Daerah - Bappeda Litbang - Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Administrasi dan Kependudukan - BKPSDM
		2,513,25		
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	2,513,25		

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

Secara lengkap renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.3. Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	92.350.000.000
2	DINAS KESEHATAN	171.638.742.000
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GORAN RIUN	27.215.000.000
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULA	46.450.399.503
3	DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG	109.242.230.900
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PERMUKIMAN	25.456.500.000
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.500.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.925.500.000
7	DINAS SOSIAL	19.210.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	4.682.220.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.920.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.018.193.018
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.315.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL	4.253.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.652.045.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	7.774.150.000
15	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA, STATISTIK dan PERSANDIAN	5.705.000.000
16	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9620.147.391
17	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.405.000.000
18	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	2.482.836.971
19	DINAS PERIKANAN	16.753.000.000
20	DINAS PARIWISATA	9.095.000.000
21	DINAS PERTANIAN	21.430.354.456
22	SEKRETARIAT DAERAH	55.893.107.915

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
23	SEKRETARIAT DPRD	78.090.000.000
24	BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.970.000.000
25	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23.077.500.000
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.306.175.000
27	INSPEKTORAT DAERAH	14.832.900.000
28	KECAMATAN BULA	650.000.000
29	KECAMATAN BULA BARAT	690.000.000
30	KECAMATAN TELUK WARU	600.000.000
31	KECAMATAN TUTUK TOLU	875.000.000
32	KECAMATAN KIAN DARAT	745.000.000
33	KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	1.080.000.000
34	KECAMATAN KELIMURY	674.000.000
35	KECAMATAN WERINAMA	659.000.000
36	KECAMATAN SIWALALAT	700.000.000
37	KECAMATAN SERAM TIMUR	525.000.000
38	KECAMATAN PULAU GOROM	810.000.000
39	KECAMATAN GOROM TIMUR	675.000.000
40	KECAMATAN PULAU PANJANG	925.000.000
41	KECAMATAN KESUI WATUBELA	665.000.000
42	KECAMATAN TEOR	760.000.000
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.450.050.000
Jumlah/Total Pagu		***841,747,052,154***

Tabel V.4. Rencana Kerja Program/Kegiatan Stunting
Kabupaten Seram BagianTimur Tahun 2024

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**200.000.000,00**		
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			**200.000.000,00**		
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - *Belanja Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**200.000.000,00** *200.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**150.000.000,00**		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**150.000.000,00**		
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Belanja Penyediaan Layanan bagi Anak*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**150.000.000,00** *150.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**150.000.000,00**		
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			**150.000.000,00**		
	2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota - *Belanja Fasilitasi Penetapan Masyarakat hukum Adat*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**150.000.000,00** *150.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**1.800.000.000,00**		
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			**1.800.000.000,00**		
	2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat - *Belanja Penetapan MHA*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**100.000.000,00** *100.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	

	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - *Belanja Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPM, Posyandu*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**300.000.000,00** *300.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - *Belanja Pemanfataan TTG*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**250.000.000,00** *250.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - *Belanja Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**150.000.000,00** *150.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - *Belanja Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Paket*	**1.000.000.000,00** *1.000.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	JUMLAH				**2.300.000.000,00**		

OPD : Dinas Sosial

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**3.000.000.000,00**		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			**3.000.000.000,00**		
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan - *Penyedian Permakanan, Asupan Gizi Bagi Penderita Stuntting dan PMKS Lainnya*	*(Kec. Tutuk Tolu, Kiandarat, Werinama, Siwalalat, Teluk Waru dan P. Gorom, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*850 KPM*	**1.500.000.000,00** *1.500.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang - *Penyediaan Sandang dan Pangan*	*(Kab. Seram Bagian Timur, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*150 KPM*	**750.000.000,00** *750.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - *Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	*(Kab. Seram Bagian Timur, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**750.000.000,00** *750.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**5.000.000.000,00**		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			**5.000.000.000,00**		
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - *Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*	*(Kab. Seram Bagian Timur, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*15 Kecamatan*	**750.000.000,00** *750.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - *Pengelolaan Data Fakir Miskin / Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*	*(Kecamatan Bula, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**750.000.000,00** *750.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÃ‚Â - *Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga / Individu*	*(Kab. Seram Bagian Timur, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*850 KPM*	**1.500.000.000,00** *1.500.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - *Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat / Pemulihan Ekonomi*	*(Kab. Seram Bagian Timur, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*200 KPM*	**2.000.000.000,00** *2.000.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
		JUMLAH			**8.000.000.000,00**		

OPD : Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**1.550.000.000,00**		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			**350.000.000,00**		
	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan - *Pemantuaan Stok, Pasokan dan Harga Pangan*	*(15 Kecamatan, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*15 Laporan*	**200.000.000,00** *200.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia - *Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia*	*(Kecamatan Gorom Timur (Desa Tunas Ilur dan Desa Solang), Teluk Waru (Desa Namalena), Kian Darat (Desa Angar), Seram Timur (Desa Kilwaru), Bula Barat (Desa Jembatan Basa), KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*5 Unit Usaha*	**150.000.000,00** *150.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			**1.200.000.000,00**		
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - *Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun*	*(15 Kecamatan, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Dokumen*	**200.000.000,00** *200.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumberdaya lokal*	*(15 Kecamatan, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*4 Laporan*	**1.000.000.000,00** *1.000.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	JUMLAH				**1.550.000.000,00**		

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**550.000.000,00**		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			**550.000.000,00**		
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga - *PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**300.000.000,00** *300.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK - *TERSEDIANYA LAPORAN PROGRAM KKBPK*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**250.000.000,00** *250.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**1.500.000.000,00**		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			**550.000.000,00**		
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - *PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TINGKT KECAMATAN, DESA DAN MINILOKA KARYA*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**300.000.000,00** *300.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK - *TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**250.000.000,00** *250.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			**650.000.000,00**		
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - *TERSEDIANYA ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI FASKES*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**200.000.000,00** *200.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	

	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - *PENINGKATAN PESERTA MKJP*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**200.000.000,00** *200.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak - *PELAYANAN KB BERGERAK*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**250.000.000,00** *250.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			**300.000.000,00**		
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB - *TERLAKSANYA PEMBINAAN KAMPUNG KB*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**300.000.000,00** *300.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**1.488.000.000,00**		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			**1.488.000.000,00**		
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - *TERSEDIANYA BIAYA OPERASIONAL BAGI KADER BKB DAN BKR*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**594.000.000,00** *594.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - *TERSEDIANYA BIAYA OPERASIONAL UNTUK KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA (BKB)*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**594.000.000,00** *594.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - *SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEHJATERAAN KELUARGA*	*(KECAMATAN, KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*	*1 Kegiatan*	**300.000.000,00** *300.000.000,00*	*Dalam Pembahasan*	
	JUMLAH				**3.538.000.000,00**		

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5UNSUR ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	5.01	**PERENCANAAN**					
	5.01.03	***PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***					
	5.01.03.2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***					
	5.01.03.2.01.04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*		250.000.000	*Dalam Pembahasan*	
	5.01.03.2.01.05	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*		250.000.000	*Dalam Pembahasan*	
	5.01.03.2.01.08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	*(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)*		250.000.000	*Dalam Pembahasan*	
		Total			***750.000.000***		

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Apabila ditelaah, jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 29 jenis layanan, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel V.5. PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA SPM TAHUN 2024

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Siswa Usia 12 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Pertama	Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional	500 siswa	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Perlengkapan siswa	jumlah siswa yang mendaptakan Bantuan Perlengkapan Siswa (Seragam Sekolah)	500 siswa	600.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300 siswa	1.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Mebeluer	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan Meja Kursi Siwa	200 pasang	400.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang di Rehab	15 Ruang	3.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pendidikan sekolah dasar	Jumlah Siswa Usia 6 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan DASAR	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah DASAR	Jumlah siswa yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional	700 siswa	700.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Perlengkapan siswa	jumlah siswa yang	600 siswa	600.000.000	Dinas Pendidikan,

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						mendaptakan Bantuan Perlengkapan Siswa (Seragam Sekolah)			Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350 siswa	1.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Mebeluer	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan Meja Kursi Siwa	400 pasang	600.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang di Rehab	20 Ruang	4.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa Usia 5 tahun yang berpartisipasi dalam pendidiikan ANAK USIA DINI	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan ANAK USIA DINI	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah DASAR	Jumlah siswa yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional	200 siswa	200.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan Perlengkapan siswa	jumlah siswa yang mendaptakan Bantuan Perlengkapan Siswa (Seragam Sekolah)	300 siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Pengadaan APE PAUD	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan Alat Permainan Edukatif	350 siswa	1.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengadaan Mebeluer	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan Meja Kursi Siwa	200 pasang	300.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang di Rehab	10 Ruang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah								**17.700.000.000**	
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) di Tahun Berjalan	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.203	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun satu tahun	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.058	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (usia 0 - 28 hr)	Bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.912	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Balita	Anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	12.080	200.000.000	Dinas Kesehatan

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		kesehatan sesuai satandar				standar			
	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.535	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.763	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (usia 15-59 Thn)	Usia Produktif yang mendapat edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.580	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (Usi > 15 Thn)	Penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.368	200.000.000	Dinas Kesehatan

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus	Penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan penderita diabetes militus (DM)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	276	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan ODGJ berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Jumlah orang terduga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.161	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pelayanan Kesehatan		Penyediaan biaya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.190	200.000.000	Dinas Kesehatan
Jumlah								**2.400.000.000**	
Pekerjaan Umum	Infrastruktur Bangunan Pengaman Lingkungan Permukiman	Peningkatan Kenyamanan Masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Meminimalisir resiko banjir	575 Meter	2.300.000.000	Dinas PUPR

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Meminimalisir resiko Longsor	150 Meter	600.000.000	Dinas PUPR
					Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersedianya bangunan pengaman air Pasang untuk pemukiman	2400 Meter	9.600.000.000	Dinas PUPR
	Penyediaan Air Minum	Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Adanya Jaringan Air Minum dan Jaringan Pengairan yang baik	250 SR	2.445.200.000	Dinas PUPR
	Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah	Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		125 KK	1.538.800.000	Dinas PUPR
	Penyediaan sistemPengelolaan Air Limbah	Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SistemDrainase Lingkungan		517 Meter	1.550.000.000	Dinas PUPR
	Infrastruktur Jalan Setapak dan Jembatan Penghubung	Tersedianya fasilitas transportasi Lingkungan	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		1600 Meter	4.000.000.000	Dinas PUPR
	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tersedianya fasilitas transportasi darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Meningkatnya kualitas konstruksi Jalan	1 Km	2.500.000.000	Dinas PUPR
					Rekonstruksi Jalan	Meningkatnya kualitas	8,75 Km	35.008.000.000	Dinas PUPR

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						konstruksi Jalan			
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Meningkatnya kualitas konstruksi Jalan	3 Km	500.000.000	Dinas PUPR
					Pembangunan Jembatan	Meningkatnya kualitas konstruksi Jembatan	15 Meter	4.500.000.000	Dinas PUPR
			Program pengembangan jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruks		1 Kegiatan	600.000.000	Dinas PUPR
	Meningkatkan Penataan Ruang	Telaksannya Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruan	Adanya Dokumen Penataan Ruang	1 Kegiatan	300.000.000	Dinas PUPR
JUMLAH								**65.442.000.000**	
Bidang Perumahan	Pelayanan Dasar		Program Pengembangan Perumahan						
				Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten /Kota					
		Jumlah Dokomen Data Rumah Sewah Milik Masyarakat, Rumah Susun			Pendataan Rumah Sewah Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunya Dokomen Data Rumah Sewah Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah	15 Kec	300.000.000	DPKP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		dan Rumah Khusus				Khusus			
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	331 Rmh	16.750.000.000	DPKP
			Program Kawasan Permukiman						
				Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 Ha					
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	15 Kec	450.000.000	DPKP
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
		Jumlah Rumah			Perbaikan Rumah Tidak	Terlaksananya	1.600	32.000.000.000	DPKP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rmh		
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
		Jumlah Rumah Tidak Layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnnya permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang di perbaiki			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Terlaksanya Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	1.686 Rmh	33.720.000.000	DPKP
JUMLAH								**99.970.000.000**	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketentraman , Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Presentasi Penanganan Gangguan TRANTIBUM		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedia Upah Kerja dan Biaya Oprasional Tenaga Pencegahan Gangguan TRANTIBUM	100%	5.400.000.000	Satpol PP
					Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan PERDA dan	Presentasi Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan	100%	175.000.000	Satpol PP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					PERKADA	Ketertiban Umum			
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungn Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraa n TRANTIBUM LINMAS Tingkat Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	Satpol PP
					Pemberdayaan Perlindungan Mayarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Frekuensi Perlindungan Mayarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	75.000.000	Satpol PP
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Kapasitas SDM Anggota SATPOL PP dan SATLINMAS	100%	150.000.000	Satpol PP
					Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	100%	50.000.000	Satpol PP
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	150.000.000	Satpol PP
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Ketenteraman dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana TRANTIBUM	100%	150.000.000	Satpol PP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Ketertiban Umum				
		frekuensi Penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	200.000.000	Satpol PP
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksanya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	150.000.000	Satpol PP
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati Walikota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati Walikota	100%	250.000.000	Satpol PP
		Frekuensi Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Frekuensi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	100%	350.000.000	Satpol PP
	Ketentraman , Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran	Presentasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	Satpol PP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadan Kebakaran	100%	2.000.000.000	Satpol PP
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	250.000.000	Satpol PP
					Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000	Satpol PP
		Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	100.000.000	Satpol PP
					Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Adanya Standarisasi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	50.000.000	Satpol PP
		Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Adanya Data Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab	100%	100.000.000	Satpol PP

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Kejadian Kebakaran			
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaa Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulngan Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Penanggulngan Kebakaran	100%	250.000.000	Satpol PP
Jumlah								**10.270.000.000**	
Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan sosial	300 Jiwa	350.000.000	Dinas Sosial
	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat kebutuhan dasar	250 Jiwa	500.000.000	Dinas Sosial
	Lansia Terlantar	JumlahLansia Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat kebutuhan dasar	500 Jiwa	500.000.000	Dinas Sosial

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Gepeng	Jumlah Gelandangan dan pengemis	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis	20 Jiwa	750.000.000	Dinas Sosial
	Bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana Alam	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyedian Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang tertangani	2500 Jiwa	2.000.000.000	Dinas Sosial
Jumlah								**4.100.000.000**	

Tabel V.6. Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas	Jumlah Usulan	Sumber Dana		
		APBD Kab	APBD Prov	APBN
Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan	14	4.550.000.000		
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	0	-		
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Dengan penguatan potensi unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat	0	-		
Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Serta Konektifitas Antar Wilayah	9	58.150.000.000		
Peningkatan Investasi Daerah dan penguatan Inovasi Daerah	2	1.000.000.000		
Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik	57	14.857.000,00		
TOTAL	**123**	**78.357.000.000**		

Tabel V.7. Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	USULAN
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	94
2	DINAS KESEHATAN	64
3	DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG	41
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PERMUKIMAN	30
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48
7	DINAS SOSIAL	31
8	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	41
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	25
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22
12	DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL	36
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21
14	DINAS PERHUBUNGAN	20
15	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA, STATISTIK dan PERSANDIAN	25
16	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38
17	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18
18	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	21
19	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	43
20	DINAS PARIWISATA	30
21	DINAS PERTANIAN	27
22	SEKRETARIAT DAERAH	68
23	SEKRETARIAT DPRD	53
24	BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35
25	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	54
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25
27	INSPEKTORAT DAERAH	22
28	KECAMATAN BULA	13
29	KECAMATAN BULA BARAT	13
30	KECAMATAN TELUK WARU	13
31	KECAMATAN TUTUK TOLU	13
32	KECAMATAN KIAN DARAT	13
33	KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	13
34	KECAMATAN KELIMURY	13
35	KECAMATAN WERINAMA	13
36	KECAMATAN SIWALALAT	13
37	KECAMATAN SERAM TIMUR	13

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	USULAN
38	KECAMATAN PULAU GOROM	13
39	KECAMATAN GOROM TIMUR	13
40	KECAMATAN PULAU PANJANG	13
41	KECAMATAN KESUI WATUBELA	13
42	KECAMATAN TEOR	13
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29
TOTAL		**1.209**

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program prioritas pembangunan dijabarkan pada tabel berikut :

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 merupakan tahun keenam dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama

dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah khususnya yang dapat merepresentasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD sehingga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2024
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Angka	B 2,51-3,25
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	4,12
Gini Ratio	Angka	0,3548
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Skor Persen	Tinggi 66,20
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persen	75,8
Peningkatan penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Persen	100
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100
Peningkatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman	Persen	100
Peningkatan Fasilitasi Kesehatan Lainnya	Persen	100
Jumlah nilai investasi berskala nasional	Persen	50,26
Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persen	90

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2024
Presentase kerjasama	Persen	55,3
Indeks infrastruktur wilayah	Persen	55,1
Presentase penduduk miskin	Persen	23,10

6.2 Indikator Kinerja Kunci

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci.

Tabel VI.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Indeks Inovasi Daerah	Angka	5,71
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	80,50
Pertumbuhan PDRB	Persen	4,12
Gini Ratio	Angka	0,3548
Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26
Wirausahaan	Persen	10,5
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Tenaga Kerja Trampildan Sertifikasi	Persen	55,1
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8
Indeks Pembangungan Manusia	Skor	Tinggi
	Persen	66,20
Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8
Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100
Indeks Rasa Aman (IRA)	Persen	90
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0-81,0

Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7
Tingkat Aksesibiltas	Persen	55,1
	Skor	Tinggi
ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN		
Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B
	Angka	2,51 – 3,25
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B
	Angka	2,51 – 3,25

6.3 Indikator Makro Pembangunan

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2024 menyesuaikan dengan target Indikator Nasional Tahun 2024. Target indikator kinerja makro tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel VI.3. Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
1	Presentase Penduduk Miskin (%)	Persen	23,10
2	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	Angka	66,20
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	4,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6.70
5	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Angka	19.200
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	3,80 – 4,40
7	PDRB per kapita ADHK (juta rupiah)	Angka	15,200
8	PDRB per kapita ADHB (juta rupiah)	Angka	27,530

6.4 Arah Kebijakan DAK Tahun 2024

DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dengan ditetapkanya Tema RKP Tahun 2024 yakni: "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" maka arah kebijakan DAK difokuskan untuk mendukung 5 arah kebijakan RKP 2024 yakni:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Penguatan Daya Saing Usaha.
4. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas.

BAB. VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dapat terwujud secara optimal.

Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrument pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrument pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tatacara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target - target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing-masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tatacara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi

tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tatacara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
6. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2024 setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional

dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang focus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 ditetapkan, tidak akan lagi menerima perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun pagu anggaran.

Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur secara menyeluruh